

**TRANSAKSI *BILL* HOTEL PERSPEKTIF ULAMA
KOTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Disusun Oleh

AYU HAYATI

NIM. 160 213 0073

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
TAHUN 2020 M / 1441 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : TRANSAKSI *BILL* HOTEL PERSPEKTIF
ULAMA KOTA PALANGKA RAYA

NAMA : AYU HAYATI

NIM : 1602130073

FAKULTAS : SYARI'AH

JURUSAN : SYARI'AH

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARI'AH

JENJANG : STRATA 1 (S1)

Palangka Raya, 21 Juli 2020

Menyetujui:

Pembimbing I,



Drs. SURYA SUKTI, M.A.
NIP. 19650516 199402 1 002

Pembimbing II,



ERRY FITRYA PRIMADHANI, M.H.
NIP. 19900418 201609 0 722

Wakil Dekan I Bidang Akademik,



Drs. SURYA SUKTI, M.A.
NIP. 19650516 199402 1 002

Ketua Jurusan Syari'ah,



MUNIB, M.H.
NIP. 19600907 199003 1 002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Sdr. Ayu Hayati

Palangka Raya, ²⁰ Juli 2020

Kepada
Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**
IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalāmu'alaikum Wa Rahmatullāh Wa Barakātuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : AYU HAYATI

NIM : 160 213 0073

**JUDUL : TRANSAKSI *BILL* HOTEL PERSPEKTIF ULAMA
KOTA PALANGKA RAYA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

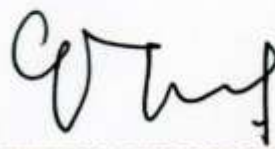
Wassalāmu'alaikum Wa Rahmatullāh Wa Barakātuh

Pembimbing I,



Drs. SURYA SUKTI, M.A.
NIP. 19650516 199402 1 002

Pembimbing II,



ERRY FITRYA PRIMADHANI, M.H.
NIP. 19900418 201609 0 722

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**TRANSAKSI *BILL* HOTEL PERSPEKTIF ULAMA KOTA PALANGKA RAYA**” oleh **AYU HAYATI, NIM 160 213 0073** telah dimunaqasyahkan oleh Tim *Munaqasyah* Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Sabtu
Tanggal : 25 Juli 2020 M
04 Dzulhijjah 1441 H

Palangka Raya, 30 Juli 2020

Tim Penguji:

1. <u>Norwili, M.H.I</u> Ketua Sidang/ Penguji	()
2. <u>Eka Suriansyah, M.S.I</u> Penguji I	()
3. <u>Drs. Surya Sukti, M.A</u> Penguji II	()
4. <u>Erry Fitrya Primadhany, M.H.</u> Sekretaris Sidang/ Penguji	()

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Abdul Helim, M.Ag.
NIP. 19770413 200312 1 003

TRANSAKSI *BILL* HOTEL PERSPEKTIF ULAMA KOTA PALANGKA RAYA

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya praktik transaksi *bill* hotel yang lazim dilakukan ASN dengan alasan pembuktian pada lembar pertanggung jawaban perjalanan dinas. Fokus penelitian ini adalah mengkaji transaksi *bill* hotel dan mengemukakan pandangan Ulama kota Palangka Raya terhadap praktik tersebut. Adapun rumusan masalahnya adalah (1) Bagaimana praktik transaksi *bill* hotel di kota Palangka Raya? (2) Mengapa terjadi praktik transaksi *bill* hotel di kota Palangka Raya? (3) Bagaimana pandangan Ulama kota Palangka Raya terhadap transaksi *bill* hotel?

Penelitian empiris dalam hukum Islam ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan *ushūl fiqh* dan pendekatan *fiqh*. Objeknya adalah transaksi *bill* hotel dan pandangan Ulama kota Palangka Raya terkait transaksi *bill* hotel yang didasarkan pada sumber hukum Islam dan metode *istinbāṭ* hukum. Data penelitian dihimpun dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini: (1) Praktik transaksi *bill* hotel dilakukan dengan dua cara yaitu: *pertama* ASN langsung membeli *bill* hotel tanpa menginap di hotel. *kedua* ASN menginap terlebih dahulu di hotel, kemudian pada saat *check out* harga kamar dimark up, atau pada saat *check out* membeli *bill* hotel tambahan. (2) Transaksi *bill* hotel dilakukan untuk memenuhi laporan bukti perjalanan dinas atau laporan hasil kegiatan ASN. (3) Pandangan Ulama kota Palangka Raya menyatakan transaksi *bill* hotel yang mengandung rekayasa atau tipuan adalah haram. Namun dalam suatu kasus (dua) Ulama memperbolehkan transaksi tersebut karena adanya unsur kemaslahatan. Adapun terkait akad praktik transaksi ini yaitu: 1 (satu) Ulama menyebutkan transaksi ini merupakan jual beli. Sedangkan 2 (dua) Ulama lain menyebutkan transaksi ini merupakan jual beli dan ijarah, adapun 2 (dua) Ulama yang berbeda menyebutkan transaksi tersebut batil/ transaksi tidak halal.

Kata Kunci: transaksi, *bill* hotel, perspektif Ulama

THE HOTEL BILL TRANSACTIONS ON THE PERSPECTIVE OF ULAMA IN PALANGKA RAYA CITY

ABSTRACT

This research has been motivated by the practice of hotel bill transactions that were commonly carried out by ASN on the grounds of proof on the official travel responsibility sheet. The focus of this study was to examine hotel bill transactions and express the views of the Ulama city of Palangka Raya to the practice. The formulation of the problem are (1) how does the practice of hotel bill transactions in the city of Palangka Raya? (2) Why does the practice of hotel bill transactions occur in the city of Palangka Raya? (3) What is the view of the Ulama city of Palangka Raya on hotel bill transactions?

The empirical research in Islamic law used a conceptual approach, the *uṣhūl fiqh* approach, and the *fiqh* approach. The object is the hotel bill transaction and the view of the Ulama in Palangka Raya city related to hotel bill transactions which are based on Islamic legal sources and *istinbāṭ* legal methods. Research data collected by observation, interview, and documentation methods.

The results of this study: (1) The practice of hotel bill transactions are done in two ways: first, the customer is directly buying a hotel bill without staying at the hotel. Secondly, the customer stays at the hotel, and then when checking out the price of the room is marked up, or when checking out buy additional hotel bills. (2) Hotel bill transactions are conducted because they are to fulfill the official travel evidence report or Civil Servant activity report. (3) The view of the Ulamas of Palangka Raya city-states that a hotel bill transaction containing engineering or deception is unlawful or haram, but there is one case in the transaction that is allowed by 2 (two) Ulamas to be carried out because there is an element of *maṣlaḥah*. Regarding the contract of practice for this transaction: 1 (one) Ulama stated the transaction was a sale and purchase. However 2 (two) Ulamas stated the transaction was a sale and purchase and *ijarah*, and 2 (two) Ulamas called that is an invalid transaction / non-halal transaction.

Keywords: *transactions, hotel bills, Ulamas perspective*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, dan yang menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, dan membekalinya dengan hati serta menganugrahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur peneliti kepada Allah SWT karena syukur adalah *taşarrafu an-ni‘ām fi riḍol mun‘īm*, yakni menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pemberi Nikmat. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada keharibaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan kita umat beliau hingga akhir zaman.

Dapat terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang berkenan memberikan bantuan kepada penulis. Untuk itu, penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung, telah membantu dalam penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada:

1. Bapak Dr. Khairil Anwar, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, atas segala sarana dan prasarana yang disediakan untuk kami selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga beliau selalu

diberikan kesehatan, hidayah dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.

2. Bapak Dr. Abdul Helim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, atas segala pelayanan yang diberikan kepada kami di bawah naungan Fakultas Syari'ah. Semoga Fakultas Syari'ah semakin maju dan banyak diminati para pegiat ilmu-ilmu syariah.
3. Bapak Drs. Surya Sukti M.A. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Erry Fitrya Primadhani, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, atas segala bimbingan, arahan dan motivasi. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan kemudahan dalam menjalani kehidupan.
4. Bapak Abdul Khair, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik selama kuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, atas semua bimbingan, arahan, saran, motivasi, kesabaran dan keramahan. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT.
5. Bapak Rahimin, M.Pd.I. selaku Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palangka Raya yang telah memberikan izin dan arahan selama penulis melakukan penelitian.
6. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
7. Seluruh staf Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama berkuliah.

8. Mama tercinta Siti Aisyah dan Abah tersayang alm. Khairil Anwar, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada keduanya, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya. Saudara peneliti Dwina Rahayu Adiyati dan Luqman Farits Adiyat semoga Allah jadikan semuanya bermanfaat bagi agama dan Negara.
9. Mahasiswa Program Studi HES angkatan 2016, sahabat sekaligus keluarga baru penulis yang telah membantu, menyemangati, menghargai dan kebersamai perjuangan penulis selama berkuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka raya
10. Segenap Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Keluarga Besar KSR PMI IAIN Palangka Raya, Keluarga Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia kota Palangka Raya, GenBI Kalimantan Tengah periode 2018, DEMA Fakultas Syariah masa khidmat 2017/2018, DEMA IAIN Palangka Raya masa khidmat 2019 dan Kelompok KKN Desa Danau Pantau yang telah memberikan banyak hal berarti saat penulis berkuliah di IAIN Palangka Raya.
11. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu.

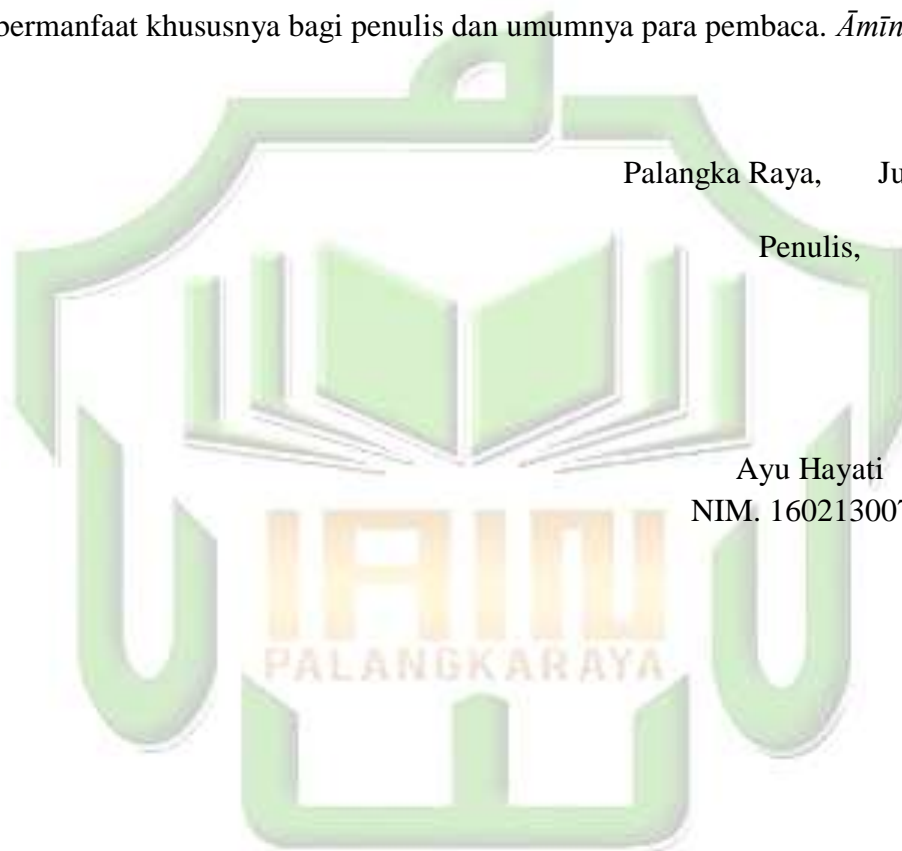
Semoga Allah SWT, melimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *Āmīn*.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritis dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah SWT, semoga yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. *Āmīn*.

Palangka Raya, Juli 2020

Penulis,

Ayu Hayati
NIM. 1602130073



PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Hayati

NIM : 1602130073

Tempat Tanggal Lahir : Palangka Raya, 11 Agustus 1998

Program Studi : Hukum Ekonomi Syaria'ah

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“TRANSAKSI *BILL* HOTEL PERSPEKTIF ULAMA KOTA PALANGKA RAYA”** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Juli 2020

Penulis,



Ayu Hayati

NIM. 1602130073

MOTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْكُمْ
بِالصَّدْقِ ، فَإِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ
وَيَتَحَرَّى الصَّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صَدِيقًا ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى
الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ
عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a.: Rasulullah SAW bersabda:
“Hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran menuntunmu kepada kebenaran,
dan kebenaran menuntunmu ke surga. Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan
selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah SWT sebagai orang yang jujur. Dan
hindarilah olehmu berlaku dusta karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan,
dan kejahatan menuntunmu ke neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta
dan selalu dusta sehingga tercatat di sisi Allah SWT sebagai pendusta”.

(HR. Muslim)

PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku persembahkan kepada Engkau ya Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa bersyukur, berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga dengan keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagi diriku untuk terus meraih cita-citaku.

Aku persembahkan skripsiku ini kepada:

Ayahanda Khairil Anwar (alm)

Terimakasih atas perjuanganmu mendidikku dan mengajarkanku tentang pondasi kehidupan. Semoga kebahagiaan akhirat bersamamu.

Ibunda Siti Atsyah

Tidak bisa aku menggambarkan bagaimana perjuanganmu ibu. Engkau pahlawan hidupku, sinar duniaku, kunci surgaku. Terimakasih telah menyayangi dan mengasihiku dari aku kecil hingga aku dewasa. Semoga kebahagiaan dunia dan akhirat untukmu.

Saudara-saudaraku

Dwina Rahayu Adiyati dan Luqman Farits Adiyat

Terimakasih telah menemani, mengajarkan, dan menjadi penyemangat diriku di kehidupan ini.

Calon-calon penegak hukum

HES 2016

Atas semua pengalaman, kebersamaan, dan ilmu yang telah kita bagi bersama. Sampai jumpa di puncak kesuksesan kita semua.

dan

Orang-orang baik yang Allah hadirkan disampingku. Terimakasih atas segala bantuan, kemurahan hati, kesabaran dan pembelajaran kehidupan yang tak pernah aku lupakan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Berikut adalah pedoman transliterasi Arab Latin:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	`	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقلين	Ditulis	<i>muta'addiqin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	ditulis	A
◌ِ	Kasrah	ditulis	I
◌ُ	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya’ mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas’ā</i>
Kasrah + ya’ mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

J. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), batil (dari *bāṭil*) dan sahih (dari *ṣaḥih*). Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	xi
MOTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR BAGAN.....	xxiii
DAFTAR SINGKATAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Deskripsi Teoretik.....	16
1. Jual Beli	16
2. Ijarah (Upah-Mengupah)	27

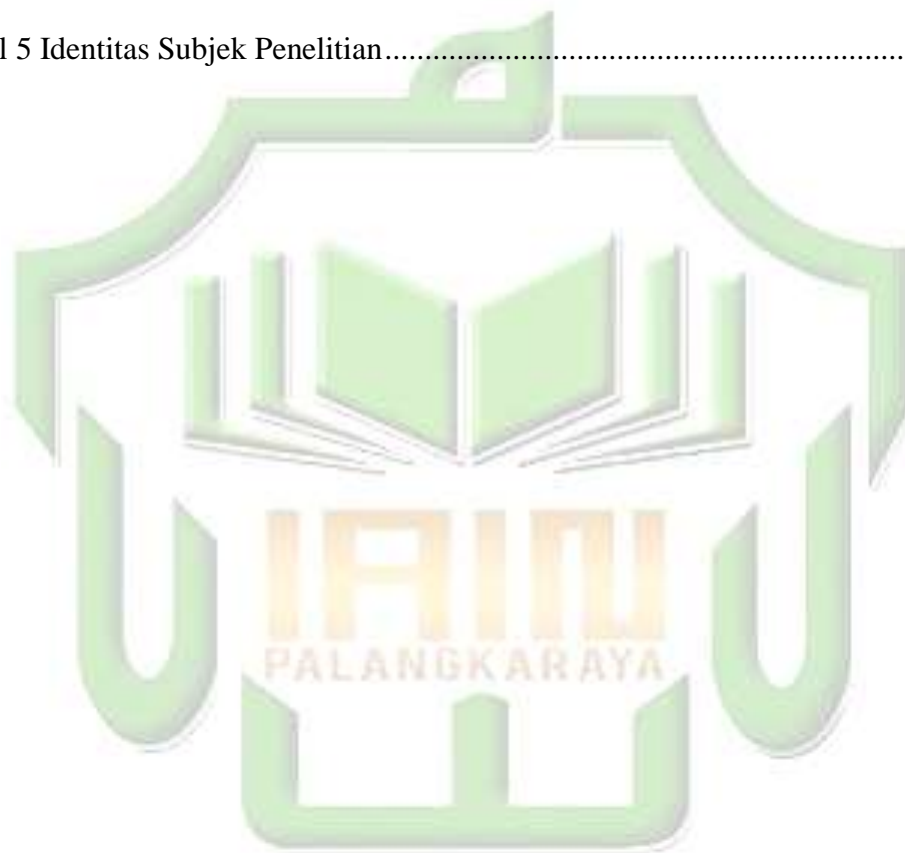
3. <i>Syubhat</i>	36
C. Kerangka Teoritik	40
D. Kerangka Pikir	46
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Waktu dan Tempat Penelitian	49
1. Waktu Penelitian.....	49
2. Tempat Penelitian	50
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	50
1. Jenis Penelitian	50
2. Pendekatan Penelitian	51
C. Objek Penelitian dan Subjek Penelitian	52
D. Teknik Pengumpulan Data.....	53
1. Wawancara.....	54
2. Observasi	55
3. Dokumentasi	56
E. Teknik Triangulasi Data.....	57
F. Teknik Analisis Data.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	61
A. Gambaran Umum Penelitian	61
1. Lokasi Penelitian.....	61
2. MUI Kota Palangka Raya	72
3. Subjek Penelitian	74
B. Hasil Penelitian	76
1. Praktik Transaksi <i>Bill</i> Hotel di Kota Palangka Raya dan Latar Belakang Terjadinya Transaksi <i>Bill</i> Hotel di kota Palangka Raya	76
2. Pandangan Ulama Kota Palangka Raya terkait Transaksi <i>Bill</i> Hotel.....	89
C. Analisis Data	103
1. Praktik Transaksi <i>Bill</i> Hotel di Kota Palangka Raya	103
2. Latar Belakang Terjadinya Transaksi <i>Bill</i> Hotel di Kota Palangka Raya.....	112

3. Pandangan Ulama Kota Palangka Raya terkait Transaksi <i>Bill</i> Hotel.....	121
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	146
A. Kesimpulan	146
B. Saran.....	148
DAFTAR PUSTAKA	149



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jadwal Penelitian.....	49
Tabel 2 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Palangka Raya Tahun 2019	66
Tabel 3 Nama Akomodasi Hotel di Kota Palangka Raya Tahun 2019	67
Tabel 4 Nama Akomodasi Selain Hotel di Kota Palangka Raya Tahun 2019	70
Tabel 5 Identitas Subjek Penelitian.....	74



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Pikir	48
------------------------------	----



DAFTAR SINGKATAN



ASN	: Aparatur Sipil Negara
ATK	: Alat Tulis Kantor
Cet	: Cetakan
dkk.	: dan kawan kawan
dll.	: dan lain lain
dsb.	: dan sebagainya
H.	: Hijriyah
HR.	: Hadis Riwayat
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
M	: Masehi
NIM	: Nomor Induk Mahasiswa
NIP	: Nomor Induk Pegawai
No.	: Nomor
RA	: <i>Radiyallahu 'anhu/Radiyallahu 'anhā</i>
SAW	: <i>Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
SWT	: <i>Subḥānahū wa ta'ālā</i>
t.dt.	: tanpa data
UIN	: Universitas Islam Negeri
Vol.	: Volume

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur, memelihara dan mengayomi hubungan antara hak dan kewajiban antar sesama manusia untuk menghindari benturan-benturan kepentingan yang dimungkinkan terjadi. Tatanan hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban dalam hidup masyarakat inilah yang disebut dengan hukum muamalah. Dalam bermuamalah realita menunjukkan perkembangan kehidupan dan peradaban manusia lebih progresif dan semakin kompleks dibandingkan dengan ketentuan otentik para Ulama dan syari'ah, sehingga muncullah deviasi¹ di antara keduanya.² Artinya, banyak transaksi modern yang belum tersentuh oleh fatwa dan komentar para Ulama terkait. Transaksi tersebut merupakan terobosan baru dalam dunia modern.

Dalam hal ini kita harus cermat, apakah transaksi ini memiliki pertentangan yang substansif atau tidak dengan kaidah *fiqh*? Di antara banyaknya transaksi modern, salah satunya adalah transaksi *bill* hotel. Transaksi *bill* hotel dilakukan oleh ASN³ (Aparatur Sipil Negara) untuk melengkapi laporan pertanggung

¹ *Deviasi* dalam KBBI diartikan sebagai penyimpangan. Perilaku menyimpang diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat.

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), ix.

³ Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 Ayat (1).

jawaban perjalanan dinas yang mengharuskan adanya *bill* hotel sebagai bukti penginapan saat melakukan perjalanan dinas. Praktik transaksi *bill* hotel ini ternyata juga terjadi di kalangan ASN di kota Palangka Raya.⁴ Praktiknya bermula saat seorang mendatangi hotel kemudian menanyakan ke petugas *front office* apakah bisa melakukan transaksi *bill* hotel di hotel tersebut, jika ya, maka *bill* hotel itu dibeli dengan harga yang ditentukan oleh penjaga *front office*. Jika tidak, maka ASN akan mencari hotel yang lain, yang bisa melakukan transaksi *bill* hotel.⁵

Adapun alasan yang digunakan ASN untuk melakukan transaksi *bill* hotel biasanya adalah untuk hemat biaya, karena ASN adalah orang dalam kota tersebut (tanpa harus menginap, perjalanan bisnis tersebut dapat dilakukan). Bisa juga sebagai upah lelah dari perjalanan dinas maka ASN meminta kepada petugas *front office* untuk menuliskan harga penginapannya lebih dari harga sebenarnya, karena ASN beralasan itu merupakan hak yang diberikan negara kepada para pejabat dinas (ditentukan besaran maksimalnya) jadi, bila tidak diambil maka akan dikembalikan kepada negara, dan anggaran tahun depan pun akan dipotong untuk perjalanan dinas yang sama.⁶

Berdasarkan hasil observasi awal penulis dengan mendatangi hotel L dan BT, *bill* hotel yang dijual ada beberapa variasi. Ada *bill* hotel yang hanya ada cap stempel hotel dengan ttd penjaga *front office* (*print out bill* hotel kosong), lalu

⁴ Wawancara awal penulis dengan AHN dan AMW, (Palangka Raya, 12 dan 13 Juni 2019).

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

untuk harganya pembeli sendiri yang menulisnya, untuk kisaran harga *bill* hotelnya adalah Rp.50.000,- sampai Rp.100.000,-. Ada pula sistem yang lain yaitu *bill* hotel tersebut telah tertera harga yang diinginkan pembeli (penjual dan pembeli bersepakat untuk menuliskan biaya penginapan sesuai keinginan pembeli). Pada sistem ini harga *bill* hotelnya berdasarkan besaran harga penginapannya dikali (x) 10%, misal: harga penginapan Rp. 350.000,- , lalu dikali (x) 10%, maka harga *bill* hotelnya adalah Rp. 35.000,-⁷

Penyebutan transaksi ini di lapangan memang jual beli, tetapi apabila dilihat dari konsep objek yang diperjual-belikan, maka hal ini juga sesuai dengan konsep *al-ijārah alā al-‘amāl* (*ijarah* yang bersifat pekerjaan), dimana objek akadnya yaitu berupa benda yang dapat diambil manfaat dan terdapat upah atas jasa yang dipergunakan. Walaupun manfaatnya pada masa yang akan datang.⁸ Jadi apabila dipandang transaksi ini sebagai *al-ijārah alā al-‘amāl*, maka dalam praktiknya objek perjanjian (akad) dalam transaksi ini adalah jasa pegawai hotel dalam memberikan jasa menjual *bill* hotel, yang mana atas jasa tersebutlah pegawai hotel mendapatkan upah dari pelanggan hotel yang membutuhkan *bill* hotel tersebut yang biasanya digunakan untuk laporan perjalanan dinas.

Dalam sebuah transaksi pemberian upah atau jual beli, akad yang dipakai haruslah sesuai dengan syari'ah, yaitu tidak mengandung *garar* (ketidakpastian atau penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga uang), *ẓulm* (penganiayaan),

⁷ Observasi awal penulis (sebelum penelitian), (Palangka Raya, 15 Juni 2019).

⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal wa al-Haram fi al-Islam*, terj. Tim Penerbit Jabal (Bandung: Jabal, 2009), 61.

risywah (suap), barang haram dan maksiat.⁹ Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita.

Mengingat ketidakjelasan status hukum dalam transaksi tersebut maka membawa kepada perkara (*syubhat*) yang halal dan haramnya pun menjadi tidak jelas. Padahal Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ الْحَلََالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ¹⁰

Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat -yang masih samar- yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada pengembakla yang menggembaklakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan-Nya.”¹¹

Di satu sisi praktik ini *syubhat* tapi ada unsur manfaatnya, namun Islam menganjurkan untuk menjaga diri dari hal-hal buruk, tentu ini menjadi menarik sejauh mana elastisitas hukum Islam dapat mentolerir praktik transaksi *bill* hotel tersebut dan apakah dengan alasan pembuktian pada lembar pertanggung jawaban

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 552.

¹⁰ HR. Bukhari No. 2051 dan Muslim No. 1599.

¹¹ Muhammad Abduh Tuasikal, “Hadist Al-Arbain An-Nawawiyah-06 Hati-Hati Dengan Syubhat dan Jaga Hati”, *Buletin Rumaycho.com* (Yogyakarta: Rumaycho, t.th.), 1.

perjalanan dinas tersebut dapat membenarkan praktik demikian. Permasalahan di atas akan diangkat oleh peneliti menggunakan perspektif Ulama di kota Palangka Raya. Penulisan skripsi ini berusaha untuk memaparkan argumen dan pemikiran ulama mengenai persoalan transaksi *bill* hotel tersebut yang mana penulis rasa menarik mengingat pandangan Ulama dipengaruhi oleh pemahamannya akan suatu hukum bisa beragam, baik dari dasar hukum ataupun telaah hukum/ kajian *uṣūl fiqh*nya, sehingga dengan berbagai ragam pandangan yang diperoleh dapat terbentuk suatu pemahaman dan kajian hukum yang komprehensif (menyeluruh).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut melalui sebuah penelitian dengan mengangkat judul **“Transaksi Bill Hotel Perspektif Ulama Kota Palangka Raya.”**

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik transaksi *bill* hotel di kota Palangka Raya?
2. Mengapa terjadi transaksi *bill* hotel di kota Palangka Raya?
3. Bagaimana pandangan Ulama kota Palangka Raya terhadap transaksi *bill* hotel?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan praktik transaksi *bill* hotel di kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan latar belakang dan alasan terjadinya transaksi *bill* hotel di kota Palangka Raya.
3. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan pandangan Ulama kota Palangka Raya terhadap transaksi *bill* hotel.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoretis dan kegunaan berbentuk praktis.

1. Kegunaan teoretis penelitian ini adalah:
 - a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan serta memberikan kontribusi yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai praktik transaksi *bill* hotel di kota Palangka Raya.
 - b. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik untuk penelitian yang bersangkutan maupun penelitian lain, sehingga kegiatan penelitian ini dapat dilakukan secara berkesinambungan.
 - c. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur kesyariahan khususnya bidang Hukum Ekonomi Syariah pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- b. Sebagai bahan rujukan yang dapat dimanfaatkan oleh para ulama, praktisi hukum, masyarakat umum, para pejalan dinas dan penulis lain dalam memahami tentang transaksi *bill* hotel di kota Palangka Raya.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang menunjukkan apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya, apa yang diukur dan bagaimana mengukurnya. Maksudnya bahwa definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep penelitian sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variabel atau konsep tersebut melalui penelitian.

Penelitian ini berjudul “*Transaksi Bill Hotel Perspektif Ulama Kota Palangka Raya*”. Untuk memperjelas arah dan tujuan penelitian, serta memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa kata kunci sebagai definisi operasional:

1. Pengertian Transaksi

Transaksi menurut Sunarto Zulkifli dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Akuntansi Perbankan Syariah*, adalah kejadian ekonomi/keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri

dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariah yang berlaku.¹² Adapun menurut Skousen dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Akuntansi Keuangan* menyatakan bahwa transaksi adalah pertukaran barang dan jasa antara (baik individu, perusahaan-perusahaan dan organisasi lain) kejadian lain yang mempunyai pengaruh ekonomi atas bisnis.¹³

Dalam pembahasan penelitian ini, transaksi mengarah kepada tiga bentuk praktik yaitu jual beli, ijarah, dan *syubhat*. Karena transaksi *bill* hotel ini, tidak bisa sepenuhnya disebut jual beli¹⁴ sebab bisa juga disebut dengan salah satu macam ijarah yaitu ijarah yang bersifat pekerjaan¹⁵ (*al-ijārah alā al-a'māl*). Yang mana jika disebut ijarah maka objek perjanjian (akad) adalah upah petugas *front office* dalam memberikan jasa *memark up bill* hotel atau memberikan *bill* hotel kosong kepada ASN yang membutuhkan *bill* hotel yang biasanya digunakan untuk laporan perjalanan dinas.

Karena ketidakjelasan status hukum transaksi tersebut maka hal ini membawa kepada perkara *syubhat* yang ketentuan hukumnya tidak diketahui secara pasti, apakah dihalalkan atau diharamkan.

¹² Sunarto Zulkifli, *Dasar-Dasar Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 10.

¹³ Skousen, *Pengantar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Salembak Empat, 2007), 71.

¹⁴ Karena *bill* hotel bukan merupakan komoditas yang dijual secara terbuka, barang tersebut pada hakikatnya didapatkan pada saat seseorang melakukan *check out* di hotel sebagai bukti pembayaran.

¹⁵ Objek akadnya berupa benda yang dapat diambil manfaat dan terdapat upah atas jasa yang dipergunakan.

2. Pengertian *Bill* Hotel

Menurut sumber yang penulis dapatkan dari istilah-istilah perhotelan, *bill* hotel artinya tagihan biaya hotel.¹⁶ *Bill* hotel sering juga disebut kwitansi hotel. Umumnya, jika seseorang ingin menginap dan melakukan pemesanan kamar di hotel, sewaktu akan *check out* maka akan mendapatkan *bill*/ kwitansi hotelnya.

Jika mengacu pada pengertian kwitansi secara umum, pengertiannya adalah surat yang diterbitkan oleh penanda tangan pada tanggal dan tempat tertentu yang berisi perintah membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang pada saat diperlihatkan.¹⁷ Jadi, *bill*/ kwitansi hotel adalah surat yang diterbitkan hotel yang berisi perintah membayar biaya penginapan atau pemesanan kamar hotel yang ditujukan kepada pelanggan hotel tersebut. Dimana dalam penelitian ini *bill*/ kwitansi hotel inilah yang diperjualbelikan atau *dimark up* untuk keperluan laporan perjalanan dinas atau laporan kegiatan.

3. Pengertian Perspektif/ Pandangan Ulama

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ulama adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam. Kata Ulama berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak dari kata '*ālim*. '*Ālim* adalah isim *fa'il* dari kata

¹⁶ Pegi-Pegi, "Istilah Perhotelan yang Harus Kamu Ketahui", dalam <https://www.pegipegi.com/travel/30-istilah-perhotelan-yang-harus-kamu-ketahui/> (15 Januari 2020).

¹⁷ Yegi Saputri, Jhon Fernos, "Mekanisme Penerbitan Cek Dan Bilyet Giro Sebagai Alat Pembakayan Giral pada pt. Bank tabungan Negara (tbk) Cabang Padang", t.dt.

dasar: ilmu. Jadi *'ālim* adalah orang yang berilmu dan Ulama adalah orang-orang yang memiliki ilmu.¹⁸

Menurut Ensiklopedia Islam, Ulama adalah orang yang memiliki ilmu agama dan pengetahuan. Sebagai orang yang mempunyai pengetahuan luas, maka Ulama sebagai tokoh Islam, yang patut dicatat adalah mereka sebagai kelompok terpelajar yang membawa pencerahan kepada masyarakat sekitarnya.¹⁹ Mereka dapat dikatakan para pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas mengayomi, membina, dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.²⁰

Adapun yang dimaksud perspektif menurut Nanang Martono dalam Metode Penelitian Kuantitatif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena. Perspektif dapat diartikan sebagai cara seseorang menilai sesuatu yang bisa dipaparkan baik secara lisan maupun tulisan.²¹

Jadi yang dimaksud pandangan/ perspektif Ulama dalam penelitian ini ialah cara pandang Ulama Palangka Raya terhadap praktik transaksi *bill* hotel yang terjadi di kota Palangka Raya.

¹⁸ Shabri Shaleh Anwar, *Pelopop al-Qur'an Kota Seribu Parit Indragiri Hilir: KH. Bustani Qadri*, t. dt., 43.

¹⁹ Muhammad Nur Aziz, "Peran Ulama dalam Perang Sabil di Ambarawa Tahun 1945" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, t.th), 24.

²⁰ Amaliya Fahimatul Muchlisoh, "Jual Beli Rambut di Salon Kecantikan Perspektif Ulama Kota Palangka Raya" (Skripsi--IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2019), v.

²¹ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014),

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan urutan rangkaian penyajian sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.
- BAB II : Kajian Pustaka, meliputi penelitian terdahulu, deskripsi teoretik, kerangka teoretik, dan kerangka pikir serta pertanyaan penelitian.
- BAB III : Metode Penelitian, meliputi waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis, yang terdiri dari gambaran umum penelitian (Lokasi Penelitian, MUI Kota Palangka Raya, Subjek Penelitian), hasil penelitian dan analisis yang berisi praktik transaksi *bill* hotel di kota Palangka Raya, latar belakang terjadinya transaksi *bill* hotel di kota Palangka Raya dan pandangan Ulama kota Palangka Raya terhadap transaksi *bill* hotel.
- BAB V : Penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, website, dan sebagainya, penulis tidak menemukan penelitian yang membahas tentang *bill* hotel, namun penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini, yaitu antara lain:

1. **Nurun Najmi** tahun 2018, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan judul **“Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Di Kabupaten Aceh Besar Menurut Akad *Ijarah Bi Al-Amal*”**. Fokus penelitian ini adalah mengetahui praktik jual beli kotoran hewan di kabupaten Aceh Besar dan ketentuan hukum jual beli kotoran hewan menurut akad *al-ijārah alā al-a'māl*. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

Praktik jual beli kotoran hewan yang dilakukan oleh para pihak (masyarakat) yang terkait adalah dibolehkan dalam pandangan Islam, apabila kotoran hewan tersebut memiliki nilai manfaat, hal ini sesuai dengan konsep jual beli mengenai syarat benda yang diperjualbelikan (*ma'qūd alaīh*) mengandung manfaat dan masyarakat harus menggunakan akad yang dibenarkan *syara'* yaitu *al-ijārah alā al-a'māl* ketika bertransaksi. Meskipun faktanya, pada saat bertransaksi kebanyakan masyarakat, tidak menggunakan akad *ijarah*, melainkan akad jual beli. Berdasarkan konsep *al-ijārah alā al-a'māl*, pemberian upah atas jasa pengangkutan kotoran hewan dibolehkan,

karena objek akadnya berupa manfaat suatu benda yang merupakan salah satu rukun *al-ijārah alā al-a'māl*.²²

Persamaan penelitian Nurun dengan penulis adalah terletak pada persoalan praktik jual beli yang objeknya bukan merupakan komoditas yang dijual secara terbuka. Adapun perbedaan penelitian Nurun dengan penelitian penulis dapat dilihat pada fokus penelitiannya, yakni Nurun terfokus pada penggunaan akad *al-ijārah alā al-a'māl* dalam transaksi jual beli kotoran sapi. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah meneliti tentang praktik transaksi *bill* hotel dan pandangan ulama kota Palangka Raya terkait praktik transaksi *bill* hotel yang digunakan untuk laporan pertanggung jawaban perjalanan dinas atau laporan kegiatan ASN.

2. **Siti Fatimah** tahun 2017, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya dengan judul **“Pendalilan Usaha Hotel Syariah Tanpa Sertifikasi Di Kota Palangka Raya”**. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian normatif empiris (*socio-legal research*) dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

(1) Pertama, belum dilakukannya sosialisasi Permen Parekraf No. 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah kepada masyarakat terutama terhadap pemilik hotel yang menerapkan sistem syariah. Kedua, pemilik hotel tidak mendaftarkan diri sebagai usaha pariwisata. Ketiga, pembinaan dan pengawasan hanya dilakukan terhadap usaha hotel syariah yang telah mendaftarkan diri. (2) Akibat hukum yang diterima oleh pemilik hotel. Pertama, tidak ada kepastian hukum. Kedua, pemilik hotel tidak boleh mendalilkan diri sebagai syariah jika belum mendaftarkan diri dan melakukan proses sertifikasi usaha hotel syariah. (3) Substansi Permen Parekraf No. 2 Tahun 2014 bersifat Fakultatif. (4)

²² Nurun Najmi, “Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Di Kabupaten Aceh Besar Menurut Akad *Ijarah Bi Al-Amal*” (Skripsi--UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018), iv.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata belum pernah melakukan koordinasi dengan MUI yang membahas pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah sekaligus mengenai sertifikasi usaha hotel syariah.²³

Persamaan penelitian Fatimah dengan penulis adalah terletak pada persoalan jasa hotel. Adapun perbedaan penelitian Fatimah dengan penelitian penulis dapat dilihat pada fokus penelitiannya, yakni Fatimah terfokus pada usaha hotel syariah tanpa sertifikasi. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah meneliti tentang praktik transaksi *bill* hotel dan pandangan Ulama kota Palangka Raya terkait praktik transaksi *bill* hotel yang digunakan untuk laporan pertanggung jawaban perjalanan dinas atau laporan kegiatan ASN.

3. **Amaliya Fahimatul Muchlisoh** tahun 2019, Jurusan Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya dengan judul **Jual Beli Rambut di Salon Kecantikan Perspektif Ulama Kota Palangka Raya**. Penelitian ini terfokus pada bagaimana praktik jual beli rambut pada salon kecantikan dan pandangan ulama Palangka Raya terhadap transaksi jual beli tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

Praktik jual beli rambut di salon kecantikan Palangka Raya dalam praktiknya pemilik salon tidak pernah menyampaikan bahwa hasil potongan rambut yang telah digunting ini ingin dibawa pulang atau ditinggal, maka kemungkinan adat kebiasaan yang berlaku adalah siapapun orang yang ingin potong rambut maka rambut tersebut langsung menjadi hak milik salon karena pemilik salon beranggapan rambut yang sudah dipotong berarti tidak dimanfaatkan lagi oleh pemilik rambut. Adapun pandangan ulama terhadap jual beli rambut tersebut 4 (empat) diantaranya sepakat jika transaksi tersebut hukumnya haram, karena berpegang pada hadis atau dalil-dalil mutlak

²³ Siti Fatimah, "Pendalilan Usaha Hotel Syariah Tanpa Sertifikasi Di Kota Palangka Raya" (Skripsi--IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2017), v.

yang mengharamkan transaksi jual beli rambut, sedangkan ulama yang membolehkan karena adanya unsur kemanfaatan atau *kemaşlahahan* dari barang yang tidak najis.²⁴

Persamaan penelitian Amaliya dengan penelitian penulis dapat dilihat dari subjek penelitian yaitu Ulama kota Palangka Raya. Adapun perbedaan penelitiannya, yakni Amaliya terfokus pada jual beli rambut yang digunakan sebagai bahan pembuatan rambut palsu dan menyambung rambut dengan meneliti pandangan Ulama kota Palangka Raya mengenai adanya mazhab yang membolehkan dan tidak memperbolehkan jual beli rambut tersebut. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah meneliti tentang praktik transaksi *bill* hotel dan pandangan Ulama kota Palangka Raya terkait praktik transaksi *bill* hotel yang digunakan untuk laporan pertanggung jawaban perjalanan dinas atau laporan kegiatan ASN .

Berdasarkan dari 3 penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan di atas, dimana terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Maka sudah tampak jelas antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah berbeda. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui dan memahami mengenai transaksi *bill* hotel dan pandangan Ulama mengenai transaksi tersebut. Oleh karena itu, sepanjang pengetahuan penulis belum ditemukan adanya penelitian yang serupa dengan penelitian yang dilakukan penulis.

²⁴ Amaliya Fahimatul Muchlisoh , “Jual Beli Rambut, v.

B. Deskripsi Teoretik

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli berasal dari bahasa Arab *al-ba'i*, *at-tijārah*, *al-mubādalah* yang artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter.²⁵ Dapat dikatakan pula proses tukar-menukar barang dengan barang. Adapun secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar menukar *māl* (barang atau harta) dengan *māl* yang dilakukan dengan cara tertentu atau tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab dan kabul atau *mu'aqā'* (tanpa ijab kabul).²⁶

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.²⁷ Adapun makna jual beli (*al-ba'i*) menurut para ulama yaitu:

- 1) Menurut Ulama Hanafiyah: "*Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.*"²⁸
- 2) Menurut Ulama Malikiyah: "*Jual beli adalah akad mu'awadah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati*

²⁵ Ismail Nawawi Uha, *Fiqh Mu'amalah Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 128.

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

²⁷ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 15.

²⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 113.

*kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.*²⁹

- 3) Menurut Ulama Shafi'iyah: *"Jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya."*³⁰
- 4) Menurut Ulama Hanabilah: *"Makna jual beli dalam syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba atau bukan utang."*³¹

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik dengan cara tertentu (ijab dan kabul).

Adapun menurut penjelasan Ulama Hanafiyah, *māl* (harta atau barang) adalah segala sesuatu yang disukai oleh tabiat manusia dan bisa disimpan sampai waktu dibutuhkan. Akan tetapi, definisi ini dikritik oleh Ahmad Mustafa az-Zarqa, yang kemudian beliau ganti dengan definisi yang lain, yaitu *māl* adalah semua barang yang memiliki nilai material menurut orang.³² Berdasarkan hal inilah maka menurut ulama Hanafi, manfaat dan hak-hak tidak termasuk kategori

²⁹ Muslich, *Fiqh Muamalat*, 175.

³⁰ Ibid., 175-176.

³¹ Ibid., 177.

³² Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, 26.

māl (harta atau barang), sementara mayoritas ahli *fiqh*, hak dan manfaat termasuk harta yang bernilai. Pasalnya, menurut mayoritas ulama, tujuan akhir dari kepemilikan barang adalah manfaat yang ditimbulkannya.³³

Pada masyarakat primitif jual beli dilangsungkan dengan cara saling menukarkan harta dengan harta, tidak dengan uang sebagaimana yang berlaku pada zaman ini. Hal tersebut berlaku karena pada zaman itu masyarakat belum mengenal adanya uang sebagai alat tukar.³⁴ Setelah mengenal uang, jual beli barang yang ditukar dengan uang adalah bentuk jual beli yang berlaku di masyarakat hingga sekarang.³⁵

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam seperti yang telah diatur di dalam Al-Qur'an, hadis, dan *ijma'*.

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...³⁶

...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...³⁷

³³ Ibid.

³⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 112.

³⁵ Ibid.

³⁶ Al-Baqarah, 2: 275.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata* (Bandung: Syaamil Al-Qur'an), 47.

Allah berfirman pula dalam surah Al-Baqarah ayat 198, yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَقَضْتُم مِّنْ عَرَفَتٍ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَلَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ
لَمِنَ الضَّالِّينَ³⁸

Bukanlah suatu dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafah, dan berdzikirlah kepada Allah di *Masy'arilharam*. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.³⁹

Ayat di atas menerangkan bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang yang mencari karunia Allah dengan cara berdagang. Namun, janganlah meninggalkan amal ibadah kepada Allah saat telah dilaksanakannya kegiatan perdagangan tersebut. Dalam Sabda Rasulullah disebutkan:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ).⁴⁰

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' ra. bahwa Nabi SAW. pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Rasulullah menjawab: Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.⁴¹

Berdasarkan hadis di atas jual beli yang baik atau jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak

³⁸ Al-Baqarah, 2: 198.

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 31.

⁴⁰ HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim.

⁴¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughal Maram min Adillatil Ahkam*, terj. Ahmad Najieh (Semarang: Pustaka Nuun, 2011), 213.

curang, dan tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.

Sesuai dengan sabda Rasulullah:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Jual beli berlaku dengan saling ridha”

Para Ulama juga telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan harus diganti dengan barang lain yang sesuai.⁴²

c. Syarat dan Rukun Jual Beli

Menurut fuqaha kalangan Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan kabul⁴³, yang menunjukkan adanya saling menukar atau sejenisnya (*mu'aṭā'*)⁴⁴. Dengan kata lain rukunnya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang.⁴⁵ Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari: *'āqid/ al-mutā'aqidaīn/ 'āqidāni* (penjual dan pembeli), *ṣigat/ akad* (ijab dan kabul), *ma'qūd alaīh* (objek akad).⁴⁶

Seperti yang dijelaskan di atas, menurut Ulama Hanafiyah yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/ taraḍi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi,

⁴² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 75.

⁴³ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 55.

⁴⁴ *Mu'aṭā'* adalah gerakan atau isyarat yang menunjukkan maksud jual beli tanpa ijab dan kabul. Lihat Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 55.

⁴⁵ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 28.

⁴⁶ Huda, *Fiqh Muamalah*, 55.

karena unsur hati yang lebih sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara yang saling memberikan barang dan harga barang (*ta'aṭi*).⁴⁷

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur Ulama di atas, antara lain:

1) Syarat-syarat orang yang berakad

- a) Berakal. Menurut Ulama Hanafiyah anak kecil yang telah *mumayiz* apabila akad yang dilakukannya membakwa keuntungan bagi dirinya maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membakwa kerugian bagi dirinya, maka hukumnya tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayiz* itu mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, hukumnya sah apabila walinya mengizinkan.⁴⁸

Sedangkan menurut jumhur ulama orang yang melakukan akad jual beli itu haruslah balig dan berakal, apabila masih *mumayiz*, maka jual belinya tidak sah sekalipun mendapat izin dari walinya.⁴⁹

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), 80.

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2010), 73.

⁴⁹ Ibid.

b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri.⁵⁰

2) Syarat-syarat yang terkait dengan ijab dan kabul

- a) Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal.
- b) Kabul sesuai dengan ijab.
- c) Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.⁵¹

Di zaman modern ini, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apa pun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di swalayan. Dalam *fiqh* Islam, jual beli seperti ini disebut dengan *ba'i al-mu'āṭa*. Menurut jumhur ulama jual beli seperti ini boleh, apabila ini telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri, karena hal ini telah menunjukkan unsur saling rela dari kedua belah pihak. Akan tetapi, menurut Ulama Syafi'iyah transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui ijab dan kabul, maka dari itu menurut mereka jual beli seperti kasus di atas adalah tidak sah.⁵²

⁵⁰ Ibid., 74.

⁵¹ Contoh: Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan kabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama *fiqh*, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan kabul.

⁵² Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, 73-74 .

3) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan

- a) Hendaknya barang yang akan dijual itu ada. Dengan demikian, jual beli barang yang tidak ada tidak sah, juga semua barang yang dikhawatirkan tidak ada.⁵³ Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu dikecualikan menurut sebagian Ulama Hanafiyah, seperti jual beli *salam*, *istiṣnā*, dan menjual buah di atas pohonnya setelah muncul sebagian.⁵⁴
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia (barang berharga).⁵⁵ Hendaknya barang yang dijual itu harta yang bernilai.⁵⁶
- c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.⁵⁷ Artinya barang itu terpelihara dan berada di bawah otoritas seseorang.
- d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.⁵⁸
- e) Hendaknya barang harus bersih (tidak najis).⁵⁹

⁵³ Contoh: menjual anak dari anak unta, menjual air susu yang masih ada di dalam tetek kambing, dll.

⁵⁴ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 37.

⁵⁵ Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, 75.

⁵⁶ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 37.

⁵⁷ Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, 75.

⁵⁸ Ibid, 76.

⁵⁹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 65.

d. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Bentuk jual beli dari segi hukum menurut ulama Hanafiyah dibentuk menjadi tiga, antara lain:

1) Jual beli yang sah

Jual beli yang dapat dikatakan sah adalah jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, barang bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan *khiyar* lagi.⁶⁰

2) Jual beli yang batil

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batil apabila salah satu atau seluruh rukun dan objeknya tidak terpenuhi, atau jual beli yang pada dasarnya tidak disyariatkan.⁶¹ Hukum transaksi ini adalah bahwa agama tidak menganggapnya terjadi. Jika tetap dilakukan, maka tidak menciptakan hak kepemilikan. Jual beli batil dibagi atas beberapa macam:

- a) Menjual sesuatu yang tidak ada;
- b) Jual beli sesuatu yang tidak bisa diserahkan;⁶²
- c) Jual beli yang mengandung unsur *garar* (manipulasi);⁶³
- d) Jual beli benda najis dan barang bernajis;
- e) Jual beli *al-'urbūn*.⁶⁴

⁶⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 121.

⁶¹ Ibid.

⁶² Contoh: burung yang sedang terbang di angkasa, ikan di air, unta yang terlantar, kuda yang sakit mata, barang rampasan yang ada di tangan perampasnya, dan budak yang lari, baik diketahui tempatnya maupun tidak. Juga jual beli rumah dan tanah yang dikuasai lawan. Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 96.

⁶³ Imam Isnawi dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa *garar* adalah jual beli yang mengandung dua kemungkinan dan kemungkinan besarnya adalah adanya ketidakjelasan di dalamnya. Lihat Ibid., 96.

f) Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang.⁶⁵

3) Jual beli yang *fāsid* (rusak)

Menurut Imam Hanafi, muamalah yang *fāsid* pada hakikatnya atau esensinya tetap dianggap sah namun yang rusak atau tidak sah adalah sifatnya,⁶⁶ atau dalam bahasa lain jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi tidak legal dari sisi sifatnya.

Menurut Ulama Hanafiyah, jual beli yang *fāsid*, antara lain sebagai berikut:⁶⁷

a) Jual beli *al-majhūl* yaitu benda atau barangnya secara keseluruhan belum diketahui, dengan syarat ketidakjelasan itu bersifat menyeluruh. Namun apabila sifat ketidakjelasan sedikit, jual belinya sah karena hal tersebut tidak membawa perselisihan.⁶⁸

b) Jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat dan jual beli yang disandarkan⁶⁹, seperti ucapan penjual kepada pembeli:

“Saya jual mobil saya ini kepada Anda bulan depan setelah mendapat gaji”.

⁶⁴ Jual beli dengan uang muka. Seseorang membeli sebuah barang lalu ia membayarkan satu dirham saja atau sebagian kecil dari harga barang kepada penjual, dengan syarat jika jual beli dilanjutkan maka satu dirham yang telah dibayarkan itu akan terhitung sebagai bagian dari harga. Namun apabila tidak terjadi jual beli, maka satu dirham yang telah dibayar akan menjadi pemberian (hibah) bagi penjual. Lihat buku Ibid., 118-119.

⁶⁵ Ibid., 121.

⁶⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, 132-133.

⁶⁷ Ibid., 133.

⁶⁸ Untuk standar mengenai jelas atau tidaknya sifat barang adalah tradisi masyarakat setempat (*‘urf*).

⁶⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 128.

- c) Menjual barang yang gaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli, Ulama Hanafiyah memperbolehkan jual beli seperti ini apabila sifat-sifatnya disebutkan dengan syarat sifat-sifatnya tersebut tidak berubah sampai barang itu diserahkan.
- d) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta, jual beli tersebut hukumnya sah, apabila orang buta tersebut memiliki hak *khiyar*.
- e) Jual beli barang dengan harga (alat tukar) yang haram.⁷⁰
- f) Jual beli *al-ajl*.⁷¹
- g) Jual beli anggur untuk tujuan membuat *khamr*, apabila penjual anggur tersebut mengetahui hal tersebut, maka hukumnya para ulama berbeda pendapat. Menurut Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah menganggap jual beli itu sah, tetapi hukumnya makruh. Adapaun Mazhab Maliki dan Hanbali menganggap jual beli tersebut batil.
- h) Jual beli sebagian barang yang tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah. Menurut Ulama Hanafiyah hukumnya *fāsid*.

⁷⁰ Jual beli ini dianggap batal menurut selain Mazhab Hanafi.

⁷¹ Jual beli *al-ajl* adalah menjual barang secara kredit lalu membelinya dengan tunai. Contoh jual beli seperti ini adalah seseorang menjual barangnya senilai Rp 100.000,- dengan pembakyanan ditunda selama satu bulan. Setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang membeli kembali barang tersebut dengan harga yang rendah misalnya Rp 75.000,- sehingga penjual tetap berhutang kepada pemilik barang sebesar Rp 25.000,-

- i) Dua transaksi jual beli dalam satu jual beli atau dua syarat dalam satu jual beli.⁷²
- j) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matang. Apabila disyaratkan buah-buahan itu dibiarkan sampai matang maka jual belinya *fāsid* karena tidak sesuai dengan tuntutan akad.⁷³

2. Ijarah (Upah-Mengupah)

a. Pengertian Ijarah (Upah)

Istilah ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwad* dalam bahasa Indonesia adalah ganti dan upah.⁷⁴ Adapun ijarah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai upah atau sewa yang diberikan kepada seseorang setelah bekerja sama sesuai dengan hukum Islam.⁷⁵

Adapun makna ijarah menurut Ulama Hanafiyah adalah akad atas manfaat disertai imbalan. Hampir senada dengan apa yang dikemukakan oleh Ulama Syafi'iyah yang menyebutkan ijarah adalah akad suatu manfaat⁷⁶ yang mengandung maksud tertentu, mubah dan kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun menurut Ulama Malikiyah yang memiliki definisi yang sama dengan Ulama

⁷² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 136.

⁷³ Ibid., 50.

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, dkk, cet. IV (Jakarta: Pena, 2006), 203.

⁷⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online/daring (dalam jaringan).

⁷⁶ Kata “manfaat” berfungsi untuk mengeluarkan akad atas barang karena barang hanya berlaku pada akad jual beli dan hibah.

Hanafiyah, bahwa ijarah adalah memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu disertai imbalan.⁷⁷

Menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁷⁸

Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad ijarah ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad ijarah adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad ijarah kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad ijarah tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. Ijarah dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.⁷⁹

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa ijarah merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mu'ajjir* oleh seorang *musta'jir*

⁷⁷ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 387.

⁷⁸ Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh*, 138.

⁷⁹ M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, t.th), 180.

yang jelas dan disengaja dengan cara memberikan penggantian (kompensasi/ upah).

Akad ijarah tidak boleh dibatasi oleh syarat, akad ijarah juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad ijarah hanya ditujukan pada manfaat.⁸⁰ Antara sewa dan upah juga terdapat perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti, “para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Jadi dapat dipahami bahwa ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah mengupah.”⁸¹

b. Dasar Hukum Ijarah (Upah)

Mayoritas ulama membolehkan akad ijarah dengan dalil Al-Qur'an, sunnah dan *ijma'*. Allah berfirman:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْزُقْنَهُنَّ ۖ فَإِنْ وَضَعْنَ ۖ
أُجُورَهُنَّ ۚ

...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya (upah) kepada mereka...⁸³

⁸⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 115

⁸¹ Ibid.

⁸² Ath-Thalaaq, 65: 6.

⁸³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 559.

Firman Allah yang mengisahkan tentang perkataan salah seorang putri Nabi Syu'aib A.S.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ...⁸⁴

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya....⁸⁵

Ayat di atas menerangkan bahwa ijarah telah disyariatkan oleh Islam, dalam ayat ini terdapat pernyataan seorang anak yang diucapkan kepada ayahnya untuk mengambil seorang untuk bekerja dan memberikan imbalan yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan waktu dan manfaat yang dapat diterima oleh ayah tersebut.

Adapula Sabda Rasulullah SAW.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ وَأَمَرَنِي فَأَعْطَيْتُ الْحُجَّامَ أَجْرَهُ⁸⁶

“Bahwa Nabi *Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* berbekam dan beliau perintahkan aku untuk memberikan upah kepada tukang bekamnya”.

c. Rukun dan Syarat Ijarah (Upah)

Rukun ijarah menurut Hanafiyah adalah ijab dan kabul, yaitu dengan lafal ijarah, *isti'jar*, *iktirā'* dan *ikrā'*. Sedangkan rukun ijarah menurut mayoritas ulama ada empat, yaitu dua pelaku akad (pemilik

⁸⁴ Al-Qashash, 28: 26.

⁸⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 388.

⁸⁶ HR. Ahmad No. 1130, Ibnu Majah No. 2163 dan dihasankan Syuaib al-Arnauth.

sewa dan penyewa), *ṣigat* (ijab dan kabul), upah, dan manfaat barang.⁸⁷

1) *‘Āqidain*

‘Āqid adalah pelaku akad yaitu *mu’jir* dan *musta’jir*. *Mu’jir* adalah pekerja atau orang yang memberikan jasa kepada orang yang memberikan pekerjaan. *Mu’jir* disebut juga sebagai *ājir*. *Musta’jir* adalah orang yang memberikan pekerjaan kepada pekerja (*ājir*).⁸⁸

2) *Ṣigat Akad*

Dalam pertukaran objek akad, ijarah sama dengan jual beli. Secara umum, *ṣigat* ijarah (ijab dan kabul) diisyaratkan bersesuaian dan harus dalam satu majelis akad seperti yang dipersyaratkan dalam akad jual beli. Maka akad ijarah tidak sah bila ijab dan kabul tidak bersesuaian antara objek akad dan batas waktu.⁸⁹

3) *Ma’qūd alaīh* (manfaat dan *ujrah*)

Seperti transaksi pertukaran lainnya, dalam ijarah juga terdapat dua buah objek akad, yaitu manfaat atas pekerjaan yang dilakukan dan uang sewa atau upah. Objek akad tersebut adalah sebagai berikut:

a) Manfaat

⁸⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 387.

⁸⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 42.

⁸⁹ Ibid.

Barang yang diakadkan harus sesuai dengan yang dibolehkan dalam agama dan menurut kebiasaan yang memang dapat disewakan atau dimanfaatkan.

b) Upah atau imbalan

Selain disebut *ujrah*, upah atau sewa dalam ijarah juga terkadang juga disebut dengan *al-musta'jar fih* yaitu: harta yang diserahkan pengupah kepada pekerja sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dikehendaki akad ijarah.⁹⁰ Upah merupakan sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajjir*.⁹¹

Syarat ijarah, dikaitkan dengan rukunnya diantaranya sebagai berikut:

- 1) Syarat yang terkait dengan akad (pihak yang berakad/ *mu'jir* dan *musta'jir*):
 - a) Menurut Madzhab Syafi'i dan Hanbali, yang dikutip oleh M. Yazid Afandi bahwa kedua orang yang berakad telah berusia akil balig, sementara menurut Madzhab Hanafi dan Maliki, orang yang berakad cukup pada batas *mumayyiz* dengan syarat mendapatkan persetujuan wali.⁹²

Bahkan golongan Syafi'iyah memasukkan persyaratan pada '*āqid* termasuk *rusyd*. Yaitu mereka mampu melakukan sesuatu atas dasar rasionalitas dan kredibilitasnya. Maka, menurut

⁹⁰ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), 18.

⁹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, 231.

⁹² M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, 183.

Imam Syafi'i dan Hanbali seorang anak kecil yang belum balig tidak dapat melakukan ijarah, bahkan Imam Syafi'i menambahkan sebelum *rusyd* tidak dapat melakukan akad ijarah. Berbeda dengan kedua imam tersebut, Imam Abu Hanifah membolehkan, asalkan dia sudah *mumayyiz* dan atas seizin orang tuanya.⁹³

- b) Ada kerelaan pada kedua belah pihak atau tidak ada paksaan. Orang yang sedang melakukan akad ijarah berada pada posisi bebas untuk berkehendak, tanpa ada paksaan salah satu atau kedua belah pihak oleh siapapun.⁹⁴

2) Syarat yang terkait dengan *ma'qūd alaīh* (objek ijarah):

- a) Objek ijarah bisa diserahterimakan dan tidak cacat; artinya objek ijarah tersebut adalah milik sah *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan jika *musta'jir* (orang yang menyewa) meminta barang tersebut sewaktu-waktu, *mu'jir* bisa menyerahkan pada waktu itu. Dapat diserahkan secara langsung dan dimanfaatkan secara langsung.
- b) Mempunyai nilai manfaat menurut *syara'*. Yaitu manfaat yang menjadi objek ijarah diketahui sempurna dengan cara menjelaskan jenis dan waktu manfaat ada di tangan penyewa.
- c) Upah diketahui oleh kedua belah pihak (*mu'jir* dan *musta'jir*).

⁹³ Ibid.

⁹⁴ Ibid., 183-184.

- d) Objek ijarah dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki) maupun *syara'* dan tidak cacat. Jika terjadi cacat ulama *fiqh* sepakat bahwa penyewa memiliki hak *khiyar* untuk melanjutkan atau membatalkannya.
 - e) Objek ijarah adalah sesuatu yang dihalalkan *syara'*.
 - f) Objek bukan kewajiban bagi penyewa. Misal menyewakan untuk melaksanakan shalat.⁹⁵
- 3) Syarat upah, hendaknya;
- a) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
 - b) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.
 - c) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap, yaitu manfaat dan pembayaran uang sewa yang menjadi objek sewa menyewa.⁹⁶

Sementara itu Sayyid Sabiq berpendapat bahwa syarat-syarat ijarah ada lima yaitu:

- 1) Kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan transaksi.
- 2) Objek yang disewakan diketahui manfaatnya.
- 3) Objek yang disewakan dapat diketahui kadar pemenuhannya.

⁹⁵ Ibid., 184.

⁹⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, 231.

- 4) Benda yang disewakan dapat diserahkan.
- 5) Kemanfataannya mubah bukan yang diharamkan.⁹⁷

d. Macam-Macam Ijarah (Upah)

Di dalam *fiqh* muamalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua :

- 1) Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
- 2) Upah yang sepadan (*ajrun misli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaanya (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Adapun apabila dilihat dari segi objeknya, akad ijarah dibagi menjadi dua:

- 1) Ijarah manfaat (*al-ijārah alā al-manfa'ah*), misalnya sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Dalam hal ini *mu'ajjir* mempunyai benda- benda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'ajjir* mendapatkan imbalan tertentu dari *musta'jir*, dan *musta'jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang dibolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama *fiqh* sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.

⁹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 19-20.

2) Ijarah yang bersifat pekerjaan (*al-ijārah alā al-a'māl*) ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut ulama *fiqh*, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan buruh tani. *Mu'ajjir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajjir* mendapatkan upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'ajjir*.⁹⁸

3. Syubhat

Syubhat (الشبهة) berasal dari akar kata *syabaha-yasybahu* yang berarti menyamakan atau menyerupakan. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam *syubhat* berarti sesuatu yang ketentuan hukumnya tidak diketahui secara pasti, apakah dihalalkan atau diharamkan. Dalam pengertian yang lebih luas *syubhat* ialah sesuatu yang tidak jelas apakah benar atau tidak, atau masih mengandung kemungkinan benar atau salah.⁹⁹

Syubhat adalah sesuatu yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya karena banyak manusia yang tidak mengetahui hukumnya. Adapun Ulama mereka dapat mengetahui hukum dari *naş* atau *qiyas* atau sebagainya, apabila seseorang meragukan sesuatu apakah halal atau haram sementara

⁹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, 236.

⁹⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1759.

tidak ada *naş* dan *ijma'* sebagai hasil ijtihad mujtahid lalu mendapatkan dalil *syar'i*-nya lalu dijumpainya halal maka ia menjadi halal, tetapi terkadang ada dalilnya, namun tidak tertutup kemungkinan keraguan (*ihtimal*) yang jelas maka lebih utama bersikap *warā'* dengan meninggalkannya.¹⁰⁰

Hukum *syubhat* didasarkan pada hadist Nabi SAW, dari An Nu'man bin Basyir RA ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ الْحَالَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ¹⁰¹

Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara *syubhat* -yang masih samar- yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menghindarkan diri dari perkara *syubhat*, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang terjerumus dalam perkara *syubhat*, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada pengembakla yang menggembaklakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan-Nya.¹⁰²

Terhadap persoalan *syubhat*, Islam memberikan suatu garis yang disebut *warā'* (sikap berhati-hati karena takut berbuat haram), dimana dengan sifat ini seorang muslim diharuskan menjauhkan diri dari masalah yang masih *syubhat* sehingga ia tidak akan terseret kepada perbuatan yang

¹⁰⁰ Muchtar Ali, "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah", *Ahkam*, Vol. XVI, No. 2 (Juli 2016), 296.

¹⁰¹ HR. Bukhari No. 2051 dan Muslim No. 1599.

¹⁰² Tuasikal, "Hadist Al-Arbain, 1.

haram.¹⁰³ Pengertian *warā'* menurut Imam Muhammad bin Ismail, adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang belum jelas halal dan haramnya karena takut terjatuh pada perkara yang haram.¹⁰⁴

Syubhat membutuhkan pemikiran tersendiri untuk menentukan statusnya. *Syubhat* adalah antara dua sisi halal dan haram, bisa jadi ia lebih dekat kepada yang halal dan atau ia bisa lebih dekat kepada yang haram. Status *syubhat* dalam hadis Nabi Muhammad SAW. yang penulis paparkan di atas, bisa dikategorikan dalam tiga hal;

- a. Kelompok yang memasukan *syubhat* sebagai perkara yang haram.

Alasannya adalah sabda Nabi SAW. *“Barangsiapa yang menghindar dari yang samar maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang terjatuh dalam perkara yang samar maka sangat tinggi sekali potensinya untuk terjerembab pada suatu yang terlarang”*.¹⁰⁵

- b. Kelompok yang memasukan *syubhat* sebagai perkara yang halal.

Alasannya adalah sabda Nabi SAW. *“Seperti pengembala yang berada di dekat jurang”*. Ini menunjukkan bahwa ia belum masuk pada status haram, seorang muslim hanya dituntut untuk berhati-hati saja agar tidak terjerumus pada suatu keharaman.¹⁰⁶

¹⁰³ Yusuf Qardhawi, *Al Halal wal Haram fil Islam*, 62.

¹⁰⁴ Muhammad Nur Kholiq, “Studi Analisis Terhadap Produk Makanan dan Minuman Olahan yang Belum Bersertifikat Halal (Studi Kasus pada IKM di kota Semarang)” (Skripsi--IAIN Walisongo, Semarang, 2010), 42.

¹⁰⁵ Amir Mahmud, “Kajian Hadis tentang Halal, Haram, dan *Syubhat*”, *Jurnal Adabiyah*, Vol. 17, No. 2, 2017, 135.

¹⁰⁶ Ibid.

- c. Kelompok yang mengatakan bahwa *syubhat* bukanlah halal dan bukan pula haram, alasan pernyataan ini adalah sabda Nabi SAW. *Bahwa halal dan haram adalah suatu hal yang sudah jelas statusnya.*¹⁰⁷

Kategorisasi *syubhat* dalam tiga kelompok ini merupakan eksistensi *syubhat* itu sendiri, ia tidak bisa ditetapkan sebagai sesuatu yang haram atau yang halal. Lebih tepat jika *syubhat* mempunyai status sendiri, *syubhat* adalah *syubhat* yang ketetapan pengerjaannya dikembalikan kepada pelaku. Demikian karena Nabi SAW yang bersabda bahwa “banyak sekali manusia yang tidak mengetahui hal-hal dengan status halal atau haram (*syubhat*)”.¹⁰⁸

Rasulullah telah memerintahkan kepada umatnya untuk menjauhi perkara *syubhat* sebagaimana bunyi hadist Nabi:

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَذْرِيسٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي الْحَوَّاءِ السَّعْدِيِّ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مَا حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيْبُكَ فَإِنَّ الصَّدَقَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيْبَةٌ¹⁰⁹

Abu Musa al-Anshari menceritakan kepada kita, Abdullah bin Idris mengabarkan kepada kita, Syu'bah mengabarkan kepada kita dari Buraid bin Abi Maryam dari Abi al-Haura as-Sa'diy berkata: saya berkata kepada Hasan bin Ali: Apa yang engkau hafal dari Rasulullah? Hasan berkata (menjawab): yang saya hafal dari Rasulullah Saw: Tinggalkan perkara yang meragukanmu kepada perkara yang tidak meragukanmu. Karena kejujuran itu adalah

¹⁰⁷ Ibid.

¹⁰⁸ Ibid.

¹⁰⁹ HR. at-Turmudzi.

ketenangan hati sedangkan kedustaan itu adalah keraguan.¹¹⁰ (HR. at-Turmudzi)

Berdasarkan dalil di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Rasulullah telah memerintahkan untuk meninggalkan perkara-perkara *syubhat* dan mengambil perkara yang meyakinkan (halal dan haramnya). Maka jika seorang muslim mengamalkan atau mengikuti perintah Rasulullah tersebut, maka ia telah menjaga kehormatannya dari celaan dan menjaga dirinya agar tidak terjatuh ke dalam keharaman, perbuatan inilah yang mengantarkan kepada sikap *warā'*.

Menurut Ahmad Batahi Al-Khatabi yang dikutip oleh M.N. Kholiq, hukum meninggalkan *syubhat* ada tiga, yaitu: wajib, sunah dan makruh. Wajib apabila *syubhat* itu diyakini membawa pada yang haram. Sunah apabila *syubhat* itu lebih berat kepada yang haram. Adapun makruh apabila *syubhat* itu lebih berat kepada yang halal.¹¹¹

C. Kerangka Teoretik

Penggunaan teori adalah untuk menganalisis secara sistematis pada pembahasan hasil penelitian nantinya, setidaknya untuk menjelaskan, memberi arti, memprediksi, meningkatkan sensitivitas penelitian, membangun kesadaran hukum, dan sebagai dasar pemikiran.¹¹² Dalam penelitian transaksi *bill* hotel, penulis menggunakan beberapa teori yaitu teori akad, etika, *hilah*, dan *maṣlaḥah*. Teori akad digunakan untuk mengkaji masalah praktik

¹¹⁰ Muhammad Nur Kholiq, "Studi Analisis Terhadap Produk, 91-92.

¹¹¹ Ibid., 44.

¹¹² Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 55.

transaksi *bill* hotel di kota Palangka Raya. Teori ini digunakan untuk mengetahui akibat hukum terhadap transaksi *bill* hotel dari segi pindahnya kepemilikan yang berarti ikatan antara ijab dan kabul dalam sebuah transaksi.

Pengertian akad menurut para ahli hukum Islam (Jumhur Ulama) adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.¹¹³ Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al Fiqh al Islami wa Adillatuh* yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini menyebutkan bahwa akad adalah hubungan/ keterkaitan antara ijab dan kabul atas diskursus yang dibenarkan oleh *syara'* dan memiliki implikasi hukum tertentu.¹¹⁴ Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa akad adalah perikatan antara ijab dengan kabul secara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.¹¹⁵ Tujuan suatu akad harus sejalan dengan syariah. Ini berarti, apabila suatu akad dilaksanakan untuk tujuan yang merusak atau membahayakan, maka ia dapat dikatakan tidak sah atau batal.¹¹⁶

Untuk melihat tujuan akad transaksi *bill* hotel ini, maka penulis menggunakan teori etika dalam menganalisis alasan ASN melakukan transaksi *bill* hotel. Pada ranah praktis, etika digunakan manusia untuk menuntun kehidupannya dalam memahami alasan-alasan etis, misalnya alasan mengapa dan atas dasar apa ia mengikuti ajaran moral tertentu. Tahapan etis dalam

¹¹³ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 31.

¹¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 47.

¹¹⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 26.

¹¹⁶ Abdurrauf, "Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. IV, No. 1 (Januari 2012), 25.

hidup manusia diartikan sebagai pola hidup yang menganggap keutamaan-keutamaan moral sebagai hal yang terpenting. Sedangkan mengenai persoalan moral (moralitas) berkaitan dengan kualitas perilaku yang dijadikan pegangan manusia untuk melakukan apa yang dianggapnya baik dan apa yang dianggapnya benar.¹¹⁷

Etika itu mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam mengambil suatu keputusan “moral” dengan mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menemukan kebenaran atau kesalahan dari tingkah laku individu terhadap individu yang lain.¹¹⁸ Studi atau kajian tentang etika selalu berkaitan dengan tingkah laku, perbuatan-perbuatan dan tindakan manusia. Setiap tingkah laku itu dapat dipandang sebagai perbuatan yang memiliki nilai untuk diri sendiri (individu) atau orang lain (sosial), dan di dalam tingkah laku ini terdapat kualitas yang dapat disebut sebagai nilai-nilai normatif. Penilaian-penilaian atas tindakan manusia yang dinilai itulah yang disebut penilaian etis.¹¹⁹

Penilaian etis ini memprasyaratkan adanya pengetahuan atau kesadaran subjek atas tindakan yang dilakukannya. Jadi, segala perilaku subjek ini bisa dinilai secara etis sebatas perilaku itu adalah tindakan yang disengaja dengan kesadaran akan pilihan atau kehendaknya.¹²⁰ Berdasarkan hal itulah penulis akan melihat tindakan ASN dalam melakukan transaksi *bill* hotel ini apakah sesuai atau bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai etika. Jadi, teori

¹¹⁷ Ibid.

¹¹⁸ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 20.

¹¹⁹ Sumasno Hadi, “Studi Etika Tentang Ajaran-Ajaran Moral Masyarakat Banjar”, *Tashwir*, Vol. 3, No. 6 (April – Juni 2015), 210.

¹²⁰ Ibid., 211.

ini digunakan sebagai refleksi berfikir tentang perilaku ASN yang telah menjadi kebiasaan melakukan transaksi *bill* hotel yang digunakan untuk laporan keuangan perjalanan dinas atau laporan kegiatan.

Dalam mengkaji masalah transaksi *bill* hotel harus dilihat dengan cermat *naş* yang mengaturnya pada satu sisi dan kemaslahatan manusia pada sisi lain. Disinilah peran penggunaan teori *hilah* dan teori *maşlahah*, yang mana penulis gunakan untuk menganalisis transaksi *bill* hotel yang dilakukan ASN dengan alasan kemaslahatan bersama. *Hilah* adalah kata bentukan dari kata *tahulu* yang menunjukkan arti ragam dan keadaan. Bentuk jamak dari kata *hilah* adalah *hiyal* yang secara bahasa berarti kecerdikan, tipu daya, muslihat, dan siasat yang dicari untuk melepaskan diri dari suatu beban atau tanggung jawab.¹²¹ *Hilah* yang penulis maksudkan disini adalah sesuai konsep dari Ali Hasaballah dan Ibnu Qayyib al-Jauziyah yang mengatakan *hilah* yaitu tindakan yang menyebabkan pelakunya mengalami perubahan dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Kemudian penggunaan kata tersebut mengalami penyempitan makna, yakni cara terselubung yang mengantarkan kepada tujuannya. Seseorang tidak dapat sampai kepada tujuannya kecuali melalui kecerdikan dan kecerdasan (keahlian khusus).¹²²

Term *hilah* dikaitkan dengan bidang kajian hukum Islam (*fiqh*), diidentifikasi sebagai upaya mencari legitimasi hukum untuk kepentingan tujuan-tujuan. Tujuan dalam konteks ini, diartikan sebagai kepentingan khusus yang tidak memiliki kaitan langsung dengan hakikat aturan yang ditentukan

¹²¹ Elimartati, "Hilah Al-Syari'ah Sebagai Upaya dalam Mengujudkan Maqasid Syari'ah", *Juris*, Vol. 9, No. 1 (Juni 2010), 22.

¹²² Ibid.

oleh hukum syari'at. *Hilah* dapat dinilai sebagai jalan keluar, disamping itu juga, term ini sering dijadikan alasan untuk menghindar dari pembebanan hukum, karena *hilah* muncul sebagai reaksi dari nilai-nilai kemaslahatan yang oleh masyarakat, dipandang urgen, sedangkan nilai hukum dianggap belum menyentuh kebutuhan, yang oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai kebutuhan yang bersifat *daruri*. Dalam konteks ini, *hilah* merupakan bentuk penyimpangan dengan memanfaatkan term-term hukum yang legitimatif.¹²³

Hilah merupakan respon hukum terhadap perkembangan kebiasaan yang sudah menjadi tradisi di masyarakat, yang oleh Mazhab Hanafi diadopsi sebagai salah satu produk hukum. Namun demikian, Imam Abu Hanifah tidak terlalu mudah dalam menggunakan *hilah*. Beliau mengatakan bahwa *hilah* yang menyebabkan timbulnya prasangka buruk terhadap orang lain, itu dilarang. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila *hilah* bermaksud membatalkan aturan-aturan hukum dengan terang-terangan maka hukumnya terlarang, akan tetapi bila tidak, maka tidak dilarang¹²⁴

Selanjutnya penggunaan teori *maṣlahah* yaitu untuk menganalisis pemakaian *bill* hotel yang digunakan oleh ASN dari segi maslahatnya. Menurut al-Gazali, yang dimaksud *maṣlahah*, dalam arti terminologi *syar'i*, adalah memelihara dan mewujudkan tujuan *syara'* yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh al-Gazali bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai *maṣlahah*. Sebaliknya, setiap sesuatu

¹²³ Moh. Imron Rosyadi, "Hilah al-Hukmi Studi Perkembangan Teori Hukum Islam", *Jurnal Dosen STAI Taswirul Afkar Surabaya* (t.dt), 3.

¹²⁴ Ibid., 4-5.

yang dapat mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai *mafsadah*, maka mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian dikualifikasi sebagai *maṣlahah*.¹²⁵ Sementara menurut pandangan ‘Izz al-Din ‘Abd al-Salam, *maṣlahah* itu identik dengan *al-khaīr* (kebaikan), *al-naf’* (kebermanfaatan), *al-ḥusn* (kebaikan).¹²⁶ Menurut Al-Gazali *maṣlahah* itu ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:¹²⁷

1. *Maṣlahah* yang dibenarkan/ditunjukkan oleh *naṣ*/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan *maṣlahah mu’tabarah*. *Maṣlahah* semacam ini dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penetapan hukum Islam dan termasuk ke dalam kajian *qiyas*. Dalam hal ini para pakar hukum Islam telah konsensus.
2. *Maṣlahah* yang dibatalkan/digugurkan oleh *naṣ*/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan *maṣlahah mulgah*. *Maṣlahah* semacam ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini para pakar hukum Islam juga telah konsensus.
3. *Maṣlahah* yang tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu yang membenarkan atau menolak/menggugurkannya. *Maṣlahah* inilah yang dikenal dengan *maṣlahah mursalah*. Para pakar hukum Islam berbeda pendapat apakah *maṣlahah mursalah* itu dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam ataukah tidak.

¹²⁵ Asmawi, “Konseptualisasi Teori Maṣlahah”, *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, (22 November 2014), 314.

¹²⁶ Ibid.

¹²⁷ Datu Syaikh, “Teori Maṣlahah Al-Ghazali”, dalam <https://aliboron.wordpress.com/2010/10/26/teori-maslahah-al-ghazali/> (30 Juni 2019).

Dalam penjelasannya, al-Ghazali menganggap bahwa suatu kemaslahatan yang bertentangan dengan *naş* maka kemaslahatan demikian dianggap sebagai *maşlahah mulgah* sehingga harus ditolak, dan yang dipakai sebagai pegangan adalah *naş* terlebih dahulu.¹²⁸

Jika pada suatu kasus ditemukan dua kemudaratn maka diambil yang lebih ringan mudaratnya atau kata lain yang lebih besar maslahatnya. Sesuai dengan kaidah:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا بِارْتِكَابِ

أَخَفِّهِمَا

Apabila dua *mafsadah* bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya.¹²⁹

Didahulukannya kemaslahatan manusia dari sumber hukum lainnya karena pada dasarnya kemaslahatan manusia adalah tujuan di dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, memberikan perlindungan terhadapnya seharusnya menjadi prinsip hukum tertinggi atau sumber hukum paling kuat.¹³⁰

D. Kerangka Pikir

Praktik transaksi *bill* hotel adalah sebuah praktik yang dilakukan oleh ASN dan petugas *front office* sebuah hotel. Praktik transaksi ini terjadi di kota Palangka Raya, untuk keperluan laporan keuangan perjalanan dinas atau

¹²⁸ Imron Rosyadi, "Pemikiran at-Tufi tentang Kemaslahatan", *Suhuf*, Vol. 25, No. 1 (Mei 2013), 57.

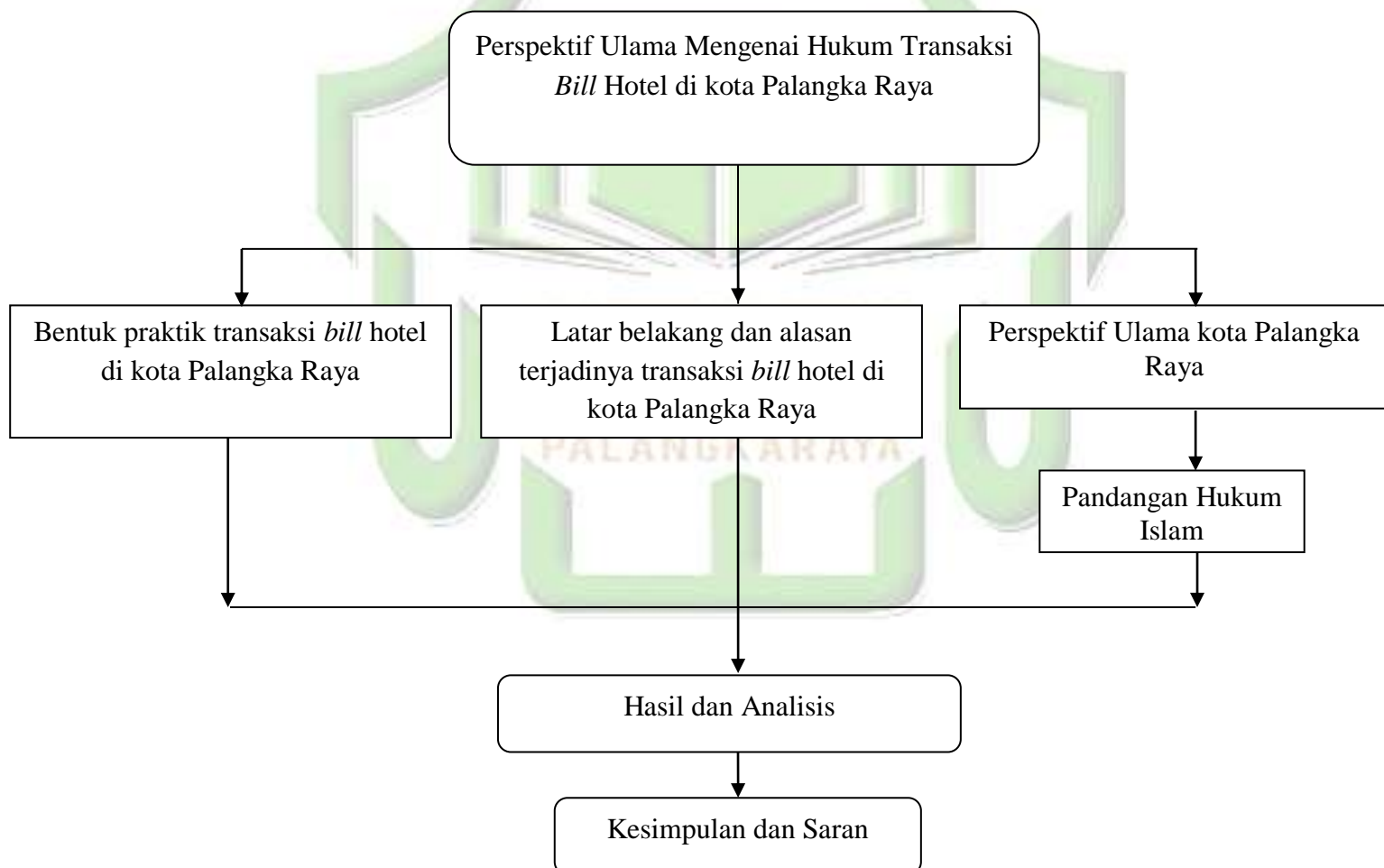
¹²⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), 74-75.

¹³⁰ Imron Rosyadi, "Pemikiran at-Tufi tentang Kemaslahatan, 57.

laporan kegiatan dalam memaksimalkan anggaran, yang apabila anggaran tersebut tidak digunakan akan dikembalikan, padahal anggaran belanja yang telah diberikan pada prinsipnya harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Hal ini akan menjadi masalah mengenai keadaan hukumnya karena objeknya merupakan transaksi *bill* hotel yang di dalamnya ada unsur *garar* (manipulasi).

Di satu sisi praktik transaksi ini mengandung unsur *garar* (manipulasi/tipuan), namun di sisi lain adapula manfaatnya, namun Islam menganjurkan untuk menjaga kesucian diri dari hal-hal yang buruk. Walaupun praktik tersebut tidak dapat disalahkan sepenuhnya namun tidak ada alasan untuk tidak mencari sebuah penyelesaiannya baik dalam aturan hukum Islam maupun aturan lainnya. Sehingga dalam memberikan tanggapan permasalahan tersebut penulis mencoba menggali dalam pandangan Ulama kota Palangka Raya mengenai praktik transaksi *bill* hotel dengan melihat maslahat dan mudaratnya dan membuatnya dalam bentuk penelitian sebagai kepastian bagi masyarakat dalam hal praktik transaksi *bill* hotel di kota Palangka Raya.

Bagan 1
Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam meneliti transaksi *bill* hotel perspektif Ulama kota Palangka Raya adalah selama 12 (Dua belas) bulan dari diterimanya judul penelitian, setelah itu seminar proposal dan mendapatkan izin penelitian hingga penyelenggaraan ujian munaqasah skripsi di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Berikut adalah tabel penelitian:

Tabel 1
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Agt-Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli
		2019							
1.	Perencanaan								
	Penyusunan Proposal								
	Seminar Proposal								
	Revisi Proposal								
2.	Pelaksanaan								
	Pengumpulan Data								
	Analisis Data								
	Pengambilan Kesimpulan								
3.	Pelaporan								

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian, dalam penelitian ini penulis memilih kota Palangka Raya sebagai tempat penelitian, dengan berbagai pertimbangan diantaranya sebagai berikut:

1. Tema dan permasalahan dalam penelitian ini ada ditemukan pada masyarakat di kota Palangka Raya yang melakukan transaksi *bill* hotel.
2. Data yang diperlukan memungkinkan untuk digali secara komprehensif dengan melibatkan masyarakat di kota Palangka Raya yang melakukan transaksi *bill* hotel.
3. Subjek dan objek penelitian ada di kota Palangka Raya.
4. Kesanggupan penulis untuk menyelesaikan penelitian.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Objek kajian empiris adalah fakta sosial (*socio-legal*). Pangkal tolak penelitian atau kajian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat, serta penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya.¹³¹

Penelitian ini meneliti model praktik hukum Islam yang hidup di masyarakat salah satunya seperti melakukan identifikasi perilaku hukum

¹³¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Bandar Maju, 2008), 121.

Islam suatu masyarakat. Dimana penulis mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat, dengan kata lain penulis melakukan suatu penelitian terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan (*fact-finding*), setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah (*problem solution*).¹³² Jenis penelitian ini sesuai dengan apa yang dimaksud dan diharapkan oleh penulis yaitu menekankan pada segi observasi dan wawancara yang akan dilakukan oleh penulis.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti mendapatkan informasi dan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.¹³³ Metode pendekatan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan *uṣūl fiqh*, dan pendekatan *fiqh*.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala penulis tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam pendekatan konseptual, penulis merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Dimana dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-

¹³² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), 16.

¹³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 133.

pandangan dan doktrin-doktrin yang ada,¹³⁴ salah satunya melalui pandangan Ulama kota Palangka Raya. Adapun dengan pendekatan *fiqh* penulis ingin memahami fenomena transaksi *bill* hotel berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an, hadis serta *ijma'* dalam kajian *fiqh* muamalah. Adapun dengan pendekatan *uṣūl fiqh* penulis ingin memahami fenomena transaksi *bill* hotel berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode *istinbāt* hukum yang dilakukan oleh para Ulama Palangka Raya, yang mana kaidah-kaidah itu biasanya disebut dengan dalil-dalil *syara'* yang umum (*al-adillah al-syar'iyah al-kulliyah*).

C. Objek Penelitian dan Subjek Penelitian

Objek atau persoalan yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah transaksi *bill* hotel di kota Palangka Raya dan Pandangan Ulama kota Palangka Raya terkait transaksi *bill* hotel di kota Palangka Raya yang didasarkan pada sumber hukum Islam dan metode *istinbāt* hukum.

Adapun subjek penelitian yaitu sumber utama data penelitian yang mana dalam penelitian ini adalah petugas *front office* hotel dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan transaksi *bill* hotel, serta Ulama yang memberikan pandangannya mengenai transaksi tersebut. Dalam menentukan subjek penelitian, penulis menetapkan kriteria-kriteria tertentu berdasarkan informasi yang dibutuhkan. Adapun kriteria-kriteria yang penulis tetapkan untuk subjek penelitian antara lain:

¹³⁴ Ibid., 178.

1. ASN (Aparatur Sipil Negara)

- a. Beragama Islam;
- b. Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Non PNS (Pegawai Negeri Sipil)/ Tenaga Honorer di sebuah instansi;
- c. Melakukan perjalanan dinas di kota Palangka Raya; dan
- d. Pernah melakukan transaksi *bill* hotel.

2. Petugas *Front Office*

- a. Bekerja di hotel yang ada di kota Palangka Raya;
- b. Bekerja di hotel berjenis melati sampai bintang 2 (dua);
- c. Pernah melakukan transaksi *bill* hotel.

3. Ulama

- a. Berdomisili di kota Palangka Raya (Ulama tradisional dan Ulama kontemporer).
- b. Memiliki keahlian melakukan *istinbāt* (mengambil hukum) dan memahaminya.
- c. Memahami *qiyas* serta dapat menggunakannya dalam usaha menghasilkan sebuah hukum.
- d. Memahami kaidah-kaidah *uṣūl fiqh* (cara memproduksi hukum).
- e. Pimpinan atau anggota aktif dalam organisasi masyarakat MUI/NU/Muhammadiyah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara dengan menggunakan pedoman *interview* wawancara yang sudah

dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta penulis sendirilah nantinya sebagai instrumen utamanya.¹³⁵ Berikut ini adalah beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban dari pihak yang diwawancarai.¹³⁶ Wawancara dilakukan di kota Palangka Raya, sedangkan yang diwawancarai adalah subjek dari penelitian ini ASN, petugas *front office*, dan Ulama kota Palangka Raya.

Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara semi terstruktur yaitu teknik dengan menggunakan pedoman wawancara yang sudah ditentukan penulis sebelumnya, namun penulis tetap memberikan kebebasan kepada para subjek untuk memberikan alternatif jawaban lain di luar pedoman wawancara yang sudah ditentukan tersebut.¹³⁷ Tujuan wawancara dari jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang terwawancara diminta pendapat, dan idenya.

Melalui teknik wawancara ini penulis melakukan dialog langsung terhadap para subjek terpilih dengan menggunakan panduan wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan untuk diajukan. Hal ini untuk

¹³⁵ Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum*, 107-108.

¹³⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 105.

¹³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, 73.

mempermudah dalam melakukan wawancara, penggalian data dan informasi. Adapun data yang digali melalui teknik ini sebagaimana yang tertuang pada daftar pertanyaan peneliti yang berada pada bagian lampiran skripsi.

2. Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan penulis turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.¹³⁸ Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, penulis mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya penulis melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga penulis dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus-menerus terjadi.¹³⁹

Lexy J. Moleong dalam bukunya *Metode Penelitian Kualitatif* mengklasifikasikan dua jenis pengamatan yaitu pengamatan berperan serta dan tidak berperan serta. Pengamatan berperan serta dapat dilakukan dengan dua peranan sekaligus, yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya.¹⁴⁰ Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam penelitian ini observasi yang penulis laksanakan yaitu

¹³⁸ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2012), 165.

¹³⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 224.

¹⁴⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Posadakarya, 2002), 126.

penulis berperan sebagai peneliti dan juga berperan sebagai pelanggan hotel (yang melakukan transaksi *bill* hotel). Sehingga data-data yang diinginkan penulis seperti persepsi petugas *front office* dan ASN yang melakukan transaksi *bill* hotel dapat diperoleh dengan mudah.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, film dan lain-lain.¹⁴¹ Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Teknik dokumentasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu berbentuk potret selama proses pengumpulan data, dokumen dalam penelitian ini antara lain:

- a. Gambaran umum lokasi penelitian;
- b. Nama-nama hotel di kota Palangka Raya;
- c. *Bill* hotel yang didapat dari transaksi penulis dengan petugas *front office* hotel di kota Palangka Raya;
- d. Tarif kamar/ *room rate* hotel L, NF, BT, dan MPS;
- e. SK MUI kota Palangka Raya.

¹⁴¹ Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan*, 82.

E. Teknik Triangulasi Data

Teknik triangulasi¹⁴² atau pengabsahan data adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.¹⁴³ Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang atau semacam cek audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data.¹⁴⁴

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif. Keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan secara pribadi,
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu,
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan,
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.¹⁴⁵

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait sebagaimana telah disebutkan di atas.
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek penelitian, yaitu hasil wawancara dengan petugas *front office* dan hasil

¹⁴² Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Lihat Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, 110.

¹⁴³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 83.

¹⁴⁴ Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, 387.

¹⁴⁵ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 178.

wawancara dengan ASN dan data hasil wawancara antar Ulama yang diteliti.

3. Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) penulis yaitu saat penulis melakukan transaksi *bill* hotel di hotel yang diteliti dengan data hasil wawancara penulis dengan ASN dan petugas *front office*.

F. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut.

Analisis data menurut Patton dalam Lexi J. Meoleong adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.¹⁴⁶ Dengan adanya metode deskriptif kualitatif, maka ada beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk memproses analisis data. Langkah-langkah tersebut adalah:

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data), adalah pengumpulan data dengan analisis data, yang mana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data,¹⁴⁷ dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu penulis mengumpulkan data dari subjek penelitian sebanyak-banyaknya mengenai transaksi *bill* hotel di kota Palangka Raya dan pandangan Ulama kota

¹⁴⁶ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 103.

¹⁴⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), 69.

Palangka Raya terkait transaksi *bill* hotel, dan dari observasi ke hotel yang melakukan transaksi *bill* hotel tersebut.

2. *Data Reduction* (Pengurangan Data), adalah pengolahan data yang mencakup kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkapnya, dan memilah-milahnya ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu atau tema tertentu.¹⁴⁸ Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Dalam penelitian ini berarti penulis setelah mendapatkan data mengenai transaksi *bill* hotel di kota Palangka Raya dan pandangan Ulama kota Palangka Raya terkait transaksi *bill* hotel dipaparkan apa adanya, maka setelah itu apa yang dianggap tidak pantas atau kurang valid akan dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan.
3. *Data Display* (Penyajian Data), ialah data yang dari penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekurangannya.¹⁴⁹ Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan demikian, kaitannya dengan penelitian ini yaitu data yang didapat dari penelitian tentang transaksi *bill* hotel di kota Palangka Raya dan pandangan Ulama kota Palangka Raya terkait transaksi *bill* hotel dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya.
4. *Data Conclousions Drawing/Verifying* atau penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan *display* data

¹⁴⁸ Ibid., 70.

¹⁴⁹ Ibid.

(penyajian data) sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh.¹⁵⁰ Kaitannya dengan penelitian ini adalah kesimpulan yang didapat dari studi tentang transaksi *bill* hotel perspektif Ulama kota Palangka Raya tidak menyimpang dari data yang dianalisis.



¹⁵⁰ Ibid.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Lokasi Penelitian

a. Sejarah Kota Palangka Raya

Sejarah pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai ibukotanya.¹⁵¹

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor: Des. 52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang

¹⁵¹ Pemerintah Kota Palangka Raya, "Selayang Pandang Sejarah Palangka Raya", dalam <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/> (29 Maret 2020).

berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan Kotapraja Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh Asisten Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J. M. Nahan.¹⁵²

Peningkatan secara bertahap Kecamatan Kahayan Tengah tersebut, lebih nyata lagi setelah dilantiknya Bapak Tjilik Riwut sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi. Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya, yang dipimpin oleh J.M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W.Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya.¹⁵³

Perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan membentuk 3 (tiga) Kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Palangka di Pahandut;
- 2) Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling;
- 3) Kecamatan Petuk Katimpun di Marang Ngandurung Langit.

¹⁵² Ibid.

¹⁵³ Ibid.

Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Pahandut di Pahandut;
- 2) Kecamatan Palangka di Palangka Raya.

Sehingga Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu Kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi serta dengan disyahrkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965 tanggal 12 Juni 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang otonom.¹⁵⁴

Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang otonom dihadiri oleh Ketua Komisi B DPRGR, Bapak L.S. Handoko Widjoyo, para anggota DPRGR, pejabat-pejabat Departemen Dalam Negeri, Deputi Antar Daerah Kalimantan Brigadir Jendral TNI M. Panggabean, Deyahdak II Kalimantan, utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan lainnya.¹⁵⁵

¹⁵⁴ Ibid.

¹⁵⁵ Ibid.

b. Letak Geografis Kota Palangka Raya

Secara geografis kota Palangka Raya terletak pada $113^{\circ}30'$ - $114^{\circ}07'$ Bujur Timur dan $1^{\circ}35'$ - $2^{\circ}24'$ Lintang Selatan. Wilayah administrasi kota Palangka Raya terdiri atas 5 (lima) wilayah kecamatan yaitu kecamatan Pahandut, Sabangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit yang terdiri dari 30 kelurahan, dengan luas masing-masing kecamatan $119,73 \text{ km}^2$, $640,73 \text{ km}^2$, $387,53 \text{ km}^2$, $603,14 \text{ km}^2$, $1.101,99 \text{ km}^2$. Kota Palangka Raya, berbatasan dengan wilayah berikut:¹⁵⁶

Sebelah utara: Kabupaten Gunung Mas

Sebelah timur: Kabupaten Gunung Mas

Sebelah selatan: Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah barat: Kabupaten Katingan.¹⁵⁷

Berdasarkan satuan Wilayah Administrasi Pemerintahan, kota Palangka Raya memiliki 5 (lima) kecamatan dan 30 (tiga puluh) kelurahan dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Pahandut terdiri dari 6 (enam) kelurahan, yaitu: Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Pahandut Seberang, dan Kelurahan Tanjung Pinang.

¹⁵⁶ BPS Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya dalam Angka Palangka Raya Municipality in Figures 2020* (Palangka Raya: BPS Kota Palangka Raya, 2020), 3-8.

¹⁵⁷ Ibid.

- 2) Kecamatan Jekan Raya terdiri dari 4 (empat) kelurahan, yaitu:
Kelurahan Palangka, Kelurahan Menteng, Kelurahan Bukit Tunggal, dan Kelurahan Petuk Katimpun.
- 3) Kecamatan Sebangau terdiri dari 6 (enam) kelurahan, yaitu:
Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Bereng Bengkel, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Danau Tundai, dan Kelurahan Kameloh Baru.
- 4) Kecamatan Bukit Batu terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu:
Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan, dan Kelurahan Habaring Hurung.
- 5) Kecamatan Rakumpit terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan, yaitu:
Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru, Kelurahan Pager, Kelurahan Gaung Baru, dan Kelurahan Bukit Sua.¹⁵⁸

¹⁵⁸ Pemerintah Kota Palangka Raya (BPPEDA), *Evaluasi 50 Tahun Pembakngunan Kota Palangka Raya (BAB III)* (Palangka Raya: t.p, 2007), 2.

c. Jumlah Penduduk kota Palangka Raya

Tabel 2
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan
di Kota Palangka Raya Tahun 2019

No	Kecamatan (Subdistrict)	Penduduk (orang) <i>Population(Person)</i>			
		Laki- Laki (Male)	Perempuan (Female)	Jumlah Total	Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)
1	Pahandut	45.057	43.674	88.731	103,2
2	Sabangau	10.310	10.199	21.009	109,1
3	Jekan Raya	70.958	69.215	140.173	102,5
4	Bukit Batu	6.713	6.154	12.867	106,0
5	Rakumpit	1.718	1.522	3.240	112,9
Palangka Raya		135.256	130.764	266.020	103,4

Sumber: BPS Kota Palangka Raya¹⁵⁹

Jumlah penduduk kota Palangka Raya tahun 2019 berdasarkan tabel di atas adalah 266.020 jiwa dengan 135.256 laki-laki dan 130.764 perempuan. Adapun untuk jumlah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas pada tahun 2019 adalah 221.685 orang dengan 142.867 orang termasuk angkatan kerja dan 78.809 orang bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya). Dari jumlah yang termasuk angkatan kerja, ada 134.616 orang bekerja dan 8.260 orang pengangguran. Dengan demikian, tingkat partisipasi

¹⁵⁹ BPS Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya*, 40.

angkatan kerja sebesar 64,45% dan tingkat pengangguran sebesar 5,78 %.¹⁶⁰

d. Nama-Nama Hotel di Kota Palangka Raya

Di kota Palangka Raya, hotel yang tercatat di website badan Pusat Statistik kota Palangka Raya ada sekitar 48 (empat puluh delapan) akomodasi hotel¹⁶¹ dan 60 (enam puluh) akomodasi selain hotel di Kota Palangka Raya, dengan berbagai jenisnya. Data akomodasi hotel dan akomodasi selain hotel yang tercatat beserta alamatnya sebagai berikut:

Tabel 3
Nama Akomodasi Hotel di Kota Palangka Raya Tahun 2019

No	Nama Hotel	Jenis	Alamat
1	Hotel Aquarius Boutique	Bintang 4	Jln. Imam Bonjol No. 5 Menteng Kec. Jekan Raya
2	Hotel M Bahalap	Bintang 4	Jln. RTA Milono Km. 1,3 Menteng Kec. Jekan Raya
3	Hotel Swissbell Danum	Bintang 4	Jln. Tjilik Riwut Km.5 No.9 Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya
4	Hotel Luwansa	Bintang 3	Jln. G-Obos No.102, menteng Kec. Jekan Raya
5	Hotel Amaris	Bintang 2	Jln. Letjend. S. Parman No.60 A
6	Hotel Batu Suli Internasional	Bintang 2	Jln. Raden Saleh No.4, Menteng Kec. Jekan Raya

¹⁶⁰ Ibid., 43.

¹⁶¹ Akomodasi adalah suatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan, misalnya tempat menginap atau tempat tinggal sementara bagi orang yang bepergian. Dalam kepariwisataan akomodasi merupakan suatu industri, jadi pengertian industri akomodasi adalah suatu komponen industri pariwisata, karena akomodasi dapat berupa suatu tempat atau kamar dimana orang-orang / pengunjung/ wisatawan dapat beristirahat/ menginap/tidur, mandi, makan dan minum serta menikmati jasa pelayanan dan hiburan yang tersedia.

7	Hotel Dandang Tingang	Bintang 2	Jln. Yos Sudarso No.13, Kec. Pahandut
8	Hotel Fovere	Bintang 2	Jln. G-Obos Induk No.97, Menteng Kec. Jekan Raya
9	Hotel Grand Global	Bintang 2	Jln. Tjilik Riwut No.10-13, Kec. Jekan Raya
10	Hotel Nascar Family	Bintang 2	Jln. Nyai Undang, Langkai, Kec. Pahandut
11	Hotel Neo Palma	Bintang 2	Jln. Tjilik Riwut Km.1 No.1 Bundaran Besar
12	Hotel Halmahera	Melati 3	Jln. Halmahera No. 21, Pahandut, Kec. Pahandut
13	Hotel Melati Mina	Melati 3	Jln. Nias No. 17
14	Hotel Melati Putir Sinta	Melati 3	Jln. Nias No. 66
15	Hotel Rahman	Melati 3	Jln. DR. Murjani No. 9
16	Hotel Aman	Melati	Jln. Raya Galaxi 2 Amaco No. 9
17	Hotel Ando Raya	Melati	Jln. Yos Sudarso No. 85
18	Artz Cafe dan Hotel	Melati	Jln. Seth Adji No. 31
19	Hotel Avicenna	Melati	Jln. Merak No. 1
20	Hotel Banama Tingang	Melati	Jln. Langkai Kec. Pahandut
21	Hotel Batu Suli	Melati	Jln. Raden Saleh
22	Hotel Bintang	Melati	Jln. Tjilik Riwut Km.13,5
23	Hotel Bravo	Melati	Jln. Tjilik Riwut No. 12
24	Hotel City Inn	Melati	Jln. Antang No. 9
25	Hotel Fairuz	Melati	Jln. Damang Leman No. 9
26	Hotel Foni	Melati	Jln. KS Tubun No. 28A
27	Hotel Global Express	Melati	Jln. A Yani No. 51
28	Hotel Grand Sakura	Melati	Jln. RTA Milono Km. 3,5
29	Hotel Hawaii	Melati	Jln. Bubut Km. 4,5 No. 3
30	Hotel Lampang	Melati	Jln. A. Yani No. 2
31	Hotel Mahkota	Melati	Jln. Nias No. 5
32	Hotel Marimar	Melati	Jln. Tjilik Riwut Km. 2,5 No. 243

33	Hotel Melati Wisata	Melati	Jln. RTA Milono No.12 Menteng Kec. Jekan Raya
34	Hotel Obelix Syariah	Melati	Jln. Rajawali No. 37
35	Hotel Panarung	Melati	Jln. DR Murjani No. 53
36	Hotel Payang	Melati	Jln. Nias No. 6
37	Hotel Putra Kahayan	-	Jln. Tamanggung Tilung I No.7 Menteng Kec. Jekan Raya
38	Hotel Ratama	Melati	Jln. Tjilik Riwut Km. 4
39	Hotel Royal Global	Melati	Jln. Tjilik Riwut No. 29
40	Rungan Sari Meeting Center Resort	Melati	Jln. Tjilik Riwut Km. 36
41	Hotel Sahid Raya	-	Jln. Bali No. 59
42	Hotel Sahid Tamara	Melati	Jln. RTA Milono Km. 3,5 No.162
43	Hotel Surya Kahayan	Melati	Jln. Diponegoro No. 35
44	Hotel Triana	Melati	Jln. Rajawali No. 12
45	Hotel Yanti	Melati	Jln. A. Yani No.82A
46	Annisa Dina Penginapan	Melati	Jln. A. Yani No. 98
47	Banua Lima Raya Penginapan	Melati	Jln. Tjilik Riwut Km. 10,5 No. 295
48	Duta Nansarunai	Melati	Jln. Tjilik Riwut Km. 5,5

Sumber: BPS Kota Palangka Raya/*Statistics of Palangka Raya Municipality* Tahun 2019 dan Website Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangka Raya Tahun 2017.

Tabel 4
Nama Akomodasi Selain Hotel di Kota Palangka Raya Tahun
2019

No	Penginapan	Jenis	Alamat
1	Ayu	Losmen	Jl. Kalimantan No.92
2	Cantik	Losmen	Jl. Halmahera No. 22
3	Krakatau	Losmen	Jl. Krakatau No. 18
4	Payang	Losmen	Jl. Jawa No. 6
5	Serasi	Losmen	Jl. dr. Murjani No. 56
6	Singgah Kudai	Losmen	Jl. Guntur No 10 Bukit Hindu
7	Agatha House	Wisma	Jl. Beruk Angis 1 No. 4
8	Anggrek	Wisma	Jl. Hausman Baboe No. 12
9	Anugrahno	Wisma	Jl. Bangas Permai No.9
10	Arjuna	Wisma	Jl. Arjuna No.152 B
11	Beliang Orent	Wisma	Jl. Beliang I A
12	Berkat Makmur	Wisma	Jl. Bukit Raya 9 No.45
13	Cendana	Wisma	Jl. Keruing, No. 07
14	Cendrawasih	Wisma	Jl. Cendrawasih, No. 5
15	Decost	Wisma	Jl. Antang Kalang No.49
16	Devine Grace	Wisma	Jl. Patimura, No. 44
17	Dian Wisata	Wisma	Jl. A. Yani, No. 68
18	Edelweis	Wisma	Jl. Pangeran Samudra, No. 9
19	Evania	Wisma	Jl. Tambunraya, No. 07
20	Grand Patria	Wisma	Jl. Moris Ismail 4, No. 1
21	Green House Asri	Wisma	Jl. Mahir Mahar, Km. 14
22	Ibrahim	Wisma	Jl. G. Obos 9
23	Lina	Wisma	Argopuro, No. 307
24	Liontine	Wisma	Jl. Sangga Buana 1, No. 32
25	Madagaskar	Wisma	Jl. Garuda 14, No. 07

26	Mahakam 1	Wisma	Jl. Damang Bahandang Balau
27	Mahakam 3	Wisma	Jl. Beliang, 11a
28	Malawen	Wisma	Jl. Bukit Raya 16, No. 12
29	Mihing Sawong	Wisma	Jl. Seth Adji, No. 128
30	Panglima Batur	Wisma	Jl. Panglima Batur, No. 35
31	Pangrango	Wisma	Jl. Pangrango, No. 72
32	Papi Inn	Wisma	Jl. Cristopel Mihing 1
33	Pisces	Wisma	Jl. Pisces Amaco
34	Sidomoro	Wisma	Jl. Nyai Undang, No. 18
35	Talenta	Wisma	Jl. Nusantara I
36	Tambun Raya	Wisma	Jl. Tambunraya, No. 33a
37	Teratai	Wisma	Jl. Bakut, No. 17
38	Thamrin 11	Wisma	Jl. Thamrin
39	Wagga Wagga	Wisma	Jl. Batusuli, No. 24
40	Yos Sudarso III	Wisma	Jl. Yos Sudarso 3
41	Am	Guest House	Jl. G. Obos No 33 D-1
42	Anak Raja	Guest House	Jl. Seth Adji No. 128
43	Antang	Guest House	Jl. Antang 1
44	Bukit Raya	Guest House	Jl. Batu Suli Gang Bersama No. 2
45	Ganova	Guest House	Jl. Kutilang, No. 11
46	Kutilang	Guest House	Jl. Kutilang, No. 140
47	Lavender	Guest House	Jl. Pm Noor
48	Orchid	Guest House	Garuda 10-A, No. 80
49	Rumah Tambi	Guest House	Jl. Pangeran Samudra, No. 49
50	Suja	Guest House	Jl. Menteng 12; No. 6
51	Syl	Guest House	Jl. Panglima Tampei, No. 34
52	Tilung	Guest House	Jl. Temanggung Tilung 18
53	Tulip	Guest House	Jl. Menteng 4

54	Ule	Guest House	Jl. Samudin Aman
55	Wagga Mama	Guest House	Jl. Sethadji, No. 26/114
56	Cemara	Mess	Jl. Cemara, No. 10
57	Menteng 24	Mess	Jl Menteng 24, No. 11
58	Kartika	Home Stay	Jl. Cilik Riwut, Km.1 Gang Sion, No.30
59	Subur Jaya	Home Stay	Jl. Cik Diktoro, No.14
60	Wagga Bella	Home Stay	Jl. Rajawali 2-B, No. 41

Sumber: BPS Kota Palangka Raya/Statistics of Palangka Raya Municipality Tahun 2019 dan Website Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangka Raya Tahun 2017.

Berdasarkan data pada tabel di atas maka didapat losmen berjumlah 6 (enam) buah, wisma berjumlah 34 (tiga puluh empat) buah, *guest house* berjumlah 15 (lima belas) buah, mess berjumlah 2 (dua) buah, *home stay* berjumlah 3 (tiga) buah, jadi total keseluruhan akomodasi selain hotel di kota Palangka Raya berjumlah 60 (enam puluh) buah.

2. MUI Kota Palangka Raya

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang menjadi tempat para ulama, zu'ama dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia, salah satunya di Kota Palangka Raya. Majelis Ulama Indonesia mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan negara yang aman, damai, adil dan makmur secara rohani dan jasmani yang diridhai Allah SWT. Pengabdian Majelis Ulama Indonesia tertuang dalam tujuh tugas MUI, yaitu:

- a. Sebagai pengawal bagi penganut agama Islam;
- b. sebagai pemberi edukasi dan pembimbing bagi penganut agama Islam;
- c. sebagai penjaring kader-kader yang lebih baik;
- d. sebagai pemberi solusi bagi masalah keagamaan di dunia internasional;
- e. sebagai perumus konsep pendidikan Islam;
- f. sebagai pengawal konten dalam media massa;
- g. sebagai organisasi yang menjalankan kerja sama dengan organisasi keagamaan.¹⁶²

Salah satu fungsi Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah memberikan fatwa kepada umat Islam dan pemerintah baik diminta maupun tidak diminta dan pemberi solusi pada masalah-masalah keagamaan, sehingga kedudukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat berperan dan penting dalam masyarakat Islam.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palangka Raya memiliki kantor sekretariat bertepatan di jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 04 (samping BI) Palangka Raya, yang di ketuai oleh KH. Zainal Arifin masa khidmat 2019 – 2023, yang mana beliau sudah tiga kali menjabat sebagai ketua MUI kota Palangka Raya.

¹⁶² Wikipedia, “Tugas Majelis Ulama Indonesia”, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia#Tugas/ (02 Mei 2020).

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini ASN (Aparatus Sipil Negara) dan petugas *front office* yang melakukan transaksi *bill* hotel serta Ulama kota Palangka Raya yang memberikan pandangan mengenai transaksi *bill* hotel. Penulis menetapkan beberapa kriteria dalam memilih subjek penelitian. Adapun identitas masing-masing subjek penelitian penulis uraikan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 5
Identitas Subjek Penelitian

No	Nama & Inisial	Pekerjaan	Alamat	Umur
1	AHN	Tenaga Non PNS di Instansi Pemerintahan/ Bid. penyelenggaraan Pemilu	Jl. Bunga Flamboyan, Kelurahan Mendawai, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Kalteng.	23 Tahun
2	ISA	Tenaga Non PNS Bidang Pelayanan Akademik di sebuah Institusi	Jl. Simpae Karuhei II, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya	30 Tahun
3.	AMW	Tenaga Non PNS di Instansi Keagamaan/ Bid. Keuangan	Jl. Griya Kecipir Indah	25 Tahun
4.	X	Petugas <i>Front Office</i> / resepsionis di Hotel BT	Tidak diketahui	Tidak diketahui
5.	Sg	Petugas <i>Front Office</i> / resepsionis di Hotel L	Tidak diketahui	Tidak diketahui
6.	DP	Petugas <i>Front Office</i> / Room Boy di Hotel NF	Jalan Rta. Milono km. 3, Samping	30 Tahun

			Kantor Gapensi	
7.	NA	Petugas <i>Front Office</i> / resepsionis/ Admin di Hotel MPS	Tidak diketahui	29 Tahun
8.	SB	Swasta/Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palangka Raya	Jl. RTA Milono Km. 4,5; komplek Bangas Permai; Gg. Sepakat 3 No. 124 Blog H.	56 Tahun
9.	SY	Dosen/ Wakil Ketua bidang Ekonomi Syariah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Tengah	Jl. Yos Sudarso No. 142, Mess Dosen UPR No. 104	56 Thn
10.	SBy	Swasta/ Wakil Ketua Bidang Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palangka Raya/ Ketua Komisi Seni Budaya Islam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Tengah	Jl. Akasia III No. 1, Rt 3, Rw. 7	53 Thn
11.	MAG	Swasta/ Penceramah/ Anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Tengah dan Anggota FKUB Kota Palangka Raya	Jl. Ramin I No. 08 Palangka Raya	43 Thn
12.	AH	Dekan FSY IAIN Palangka Raya/ Sekretaris Bidang Komisi Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Tengah/ Wakil Sekretaris Umum Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Palangka Raya	Jl. Meranti Gang Istiqomah, Pasarung, Palangka Raya	43 Thn

B. Hasil Penelitian

Pada penelitian ini, untuk memaparkan data transaksi *bill* hotel di kota Palangka Raya, peneliti memaparkan hasil wawancara yang dilakukan dengan subjek penelitian sebanyak 12 (Dua Belas) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang ASN (Aparatur Sipil Negara) dan 4 (empat) orang pegawai hotel atau petugas *front office* di 4 (empat) hotel yang penulis teliti, serta 5 (lima) orang Ulama kota Palangka Raya.

1. Praktik Transaksi *Bill* Hotel di Kota Palangka Raya dan Latar

Belakang Terjadinya Transaksi *Bill* Hotel di kota Palangka Raya

a. Subjek Pertama

Nama : AHN
 Pekerjaan : Pegawai Non PNS di Instansi Pemerintahan Bidang Penyelenggaraan Pemilu
 Alamat : Jalan Bunga Flamboyan, Kel. Mendawai, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara.
 Umur : 25 Tahun

Pada tanggal 02 April 2020 penulis wawancara secara *online* melalui media *WhatsApp* kepada AHN. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa responden menjawab bagaimana cara melakukan transaksi *bill* hotel? responden mengatakan:

Langsung saja ke hotelnya, kemudian kami datang ke resepsionis, *yaa* istilahnya seperti itu. kami tanyakan apakah boleh beli *bill* hotel disini? Karena diperlukan untuk laporan, biasanya seperti itu dan ada beberapa yang memang memperbolehkan dari pihak oknum hotelnya sendiri, si resepsionis. *yaa* itu ada dua kali, dua hotel yang bisa itu. Kalau untuk pemilihan hotelnya acak saja, tergantung resepsionisnya mau apa *nggak*. Kalau *nggak* mau *yaa* cari yang lain.¹⁶³

Selanjutnya penulis menanyakan berapa harga untuk selebar *bill*

hotel, responden menjawab:

Rata-rata itu menggunakan sistem hitungan persenan. Jadi biasanya itu harga 10% dari harga *bill* hotel yang diminta. Misalnya kita minta harga hotelnya Rp. 350.000,- untuk dua malam, itu *kan* kalau dijumlah jadi Rp.700.000,- *kan*, nah Rp.700.000,- dikalikan 10%, jadi membayarkan *bill* hotelnya itu seharga Rp.70.000,- itu salah satu contoh perhitungannya. Aku dulu pernah *sih* (memakai sistem perlembar), tetapi tidak di Palangka itu, salah satunya di Pangkalan Bun kemarin itu, itu pakai perlembar dia, perlembar itu ada yang harga Rp.100.000,- jadi harga satu lembar itu Rp.100.000,- gitu, jadi kita bebas ngisi sendiri, tapi itu dua tahun yang lalu *sih* waktu itu pernah melakukan penelitian di sana, penelitian gabungan dengan dosen.¹⁶⁴

Kemudian penulis menanyakan hotel mana saja yang ASN tahu di Palangka Raya yang bisa menjadi tempat transaksi *bill* hotel, responden menjawab:

“Kalau di Palangka Raya aku pernahnya hanya di hotel L, dan juga pernah di hotel yang ada di Pangkalan Bun ketika tugas kemarin.”¹⁶⁵

Selanjutnya penulis menanyakan alasan AHN ingin melakukan transaksi *bill* hotel, responden menjawab:

Kalau konteksnya di kantor, sedikitnya itu ada dua alasan, pertama memang ini sistemnya berbeda sekarang, dulu masih

¹⁶³ AHN, *Wawancara* (Palangka Raya, 02 April 2020).

¹⁶⁴ Ibid.

¹⁶⁵ Ibid.

yang terakhir aku pernah di hotel itu, kalau dulu memang kebiasaan di kantornya memang menggunakan sistem seperti itu, jadi jika tidak pakai *bill* hotel *yaa* tidak dapat apa-apa kami, begitu. Jadi pertama, karena pengaruh dari lingkungan kantornya yang memang kebiasaan di kantor itu, itukan saya awal-awal tahun kemarin itu, baru masuk, jadi ikut saja. Yang kedua, kembali ke prinsip yang saya sampaikan tadi, alasan kedua yaitu untuk memanfaatkan atau memaksimalkan anggaran, idealnya *kan* anggaran itu untuk digunakan *kan*. Saya misalnya ke Palangka *nih*, kalau misalnya kita ada punya rumah sendiri, untuk apa saya ke hotel misalnya saya ada rumah sendiri, lebih baik itu diuangkan, daripada kita harus ada di hotel, untuk memanfaatkan penginapan, kenapa tidak untuk diuangkan saja, itu *kan* memang untuk digunakan untuk orang yang melakukan perjalanan dinas, *kan* prinsipnya seperti itu, jadi saya berkeyakinan kalau itu diuangkan tidak apa-apa, karena memang kita seyogyanya saat melakukan perjalanan dinas memang ada di kota itu dan melakukan tugas yang diperjanjikan di perjalanan dinas itu.¹⁶⁶

Selanjutnya penulis menanyakan untuk apa saja *bill* hotel itu digunakan, responden menjawab:

Untuk laporan hasil perjalanan dinas, yang biasa kami sebut LHP. Saya terakhir membeli *bill* hotel itu tahun kemarin, karena memang dalam sistem kantor kami itu masih memperkenankan, itu hanya untuk dalam kantor. Masih memperkenankan adanya penggunaan *bill* hotel. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi, karena ada pemotongan anggaran, jadi anggaran di kantor kami itu dibatasi, sehingga ada kebijakan dari kantor untuk melakukan efisiensi anggaran, jadi untuk beberapa poin akomodasi itu dipotong, seperti peniadaan *bill* hotel. Sekarang untuk dinas keluar, ketika ada menginap di hotel itu, akan dibayarkan sesuai dengan *real* menginap, jadi misalkan saya menginap di hotel selama dua hari, dua hari itu yang dibayarkan, jadi tidak ada penambahan seperti beli *bill* selain dua itu.¹⁶⁷

¹⁶⁶ Ibid.

¹⁶⁷ Ibid.

b. Subjek Kedua

Nama : AMW

Pekerjaan : Pegawai Non PNS bidang Keuangan di Instansi
Keagamaan

Alamat : Jalan Griya Kecipir Indah

Umur : 25 Tahun

Pada tanggal 16 April 2020 penulis melakukan wawancara secara online melalui media *WhatsApp* kepada AMW. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa responden menjawab bagaimana cara melakukan transaksi *bill* hotel, responden mengatakan:

Kita datangi hotelnya, kenal tidak kenal biasanya mau saja bila di daerah itu. Hotelnya banyak saja yang bisa jual seperti itu. Kita 13 (Tiga belas) kabupaten/kota, nah 13 (Tiga belas) daerah itu ada semua (yang bisa melakukan transaksi). Tapi biasanya jika sampai ke Jakarta (luar pulau), kita *kan* sudah tahu jauh seperti itu, biayanya juga lumayan *lah* kesitu, jadi sulit mencari hotel yang bisa transaksi, apalagi yang dekat dengan tujuan kita berkunjung ke kota itu. Hotelnya itu yang lumayan *lah*, tapi semakin tinggi bintangnya itu semakin sulit, karena harga SBM (Standar Biaya Minimum) kita tidak mencukupi. Karena jika hotel bintang 5 (lima) itu, harganya sudah 1 (satu) malamnya misal Rp.800.000,- sedangkan standar biaya di kantor kita itu Rp.500.000,- tidak mungkin kita mau membayar Rp.300.000,- nya, tujuannya *kan* untuk meambil keuntungan.¹⁶⁸

Selanjutnya penulis menanyakan berapa harga untuk selembarnya *bill* hotel, responden menjawab:

¹⁶⁸ AMW, *Wawancara* (Palangka Raya, 16 April 2020).

“Tidak nentu, terkadang Rp.100.000,- bisa dapat dua (*bill* hotel).”¹⁶⁹

Kemudian penulis menanyakan hotel di kota mana saja yang pernah ASN datang untuk melakukan transaksi *bill* hotel, responden menjawab:

“Saya pernahnya di Katingan, Pangkalan Bun, Sampit, dan Buntok ketika perjalanan dinas keluar daerah. Kalau di Palangka Raya saya pernahnya menemani teman saja, beli di hotel NF.”¹⁷⁰

Kemudian penulis menanyakan alasan AMW ingin melakukan transaksi *bill* hotel, responden menjawab:

Tujuan utama untuk *memark up* harga. Misalnya di Katingan, kalaunya di katingan itu orang dinas tidak perlu sampai tiga hari, cukup dua hari. Otomatis di *bill* hotelnya itu satu malam ditulis, kalaunya ditulis dua malam itu mengembalikan nantinya. Misalnya seperti ini: satu malam harga kamarnya Rp.500.000 kita *markup* menjadi Rp.700.000,- sedangkan waktu untuk perjalanan dinasnya itu cuman memerlukan dua hari, jadi satu malam saja kan hitungannya itu, cuman di hotelnya itu ditulis dua malam, itu kan lebih dari me *markup* harga kan? Itu semakin ketahuan. Kalaunya untuk *bill* hotel ini biasa, pokoknya setiap orang yang kerja, kemudian membuat laporan perjalanan dinasnya menggunakan *bill* hotel, otomatis itu *memarkup* harga. Tapi, ada juga yang jujur. Dia menggunakan dana real, maksudnya menginap satu malam bayarnya Rp.300.000, ya Rp.300.000 itu dia tulis di notanya itu.¹⁷¹

Selanjutnya penulis menanyakan untuk apa saja *bill* hotel itu digunakan, responden menjawab:

¹⁶⁹ Ibid.

¹⁷⁰ Ibid.

¹⁷¹ Ibid.

“Untuk bukti penginapan pada laporan keuangan perjalanan dinas, tapi bisa juga untuk diperjual belikan kembali, tapi itu biasanya nota travel”.¹⁷²

c. Subjek Ketiga

Nama : ISA

Pekerjaan : Pegawai Non PNS bidang Pelayanan Akademik di
IAIN Palangka Raya

Alamat : Jl. Simpae Karuhei II, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya

Umur : 25 Tahun

Pada tanggal 02 April 2020 penulis melakukan wawancara secara langsung kepada ISA. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa responden menjawab bagaimana cara melakukan transaksi *bill* hotel? responden mengatakan:

Cara melakukan transaksinya, pertama bertanya terlebih dahulu ke teman-teman, mungkin ada salah satu kenalan bekerja di hotel, Tanya bisa tidak beli *bill* hotel, ada beberapa teman tidak bisa, walaupun teman dekat karena disitu sudah ada sistemnya, jadi tidak dijual, terus kalaunya nggak ada sistem atau ada sistem tapi hanya sekedar kwitansi jadi, itu kemungkinan besar bisa (melakukan transaksi). Sebagian saya *chat* terlebih dahulu, terus jika bisa saya datang, mungkin janji jam berapa, tunggu orangnya sepi atau tidak ada orang, tidak enak *kan bill* seperti itu. Tapi, ada juga sebagian yang datang langsung. Kalau langsung, maka ketika datang ke hotelnya tanya pelan-pelan dengan resepsionisnya apakah bisa beli *bill* hotel, kalau bisa maka langsung transaksi pada saat itu.¹⁷³

¹⁷² Ibid.

¹⁷³ Ibid.

Selanjutnya penulis menanyakan berapa harga untuk selemba *bill* hotel, responden menjawab:

Itu tergantung kelas hotel, tergantung kita akrab atau tidak dengan temannya, teman kita tadi itu, kalau kenal biasanya paling Rp.50.000,-¹⁷⁴

Kemudian penulis menanyakan hotel di kota mana saja yang pernah ASN datang untuk melakukan transaksi *bill* hotel, responden menjawab:

Kalau di Palangka Raya, pernahnya di hotel yang ada di dekat pelabuhan rambang. Biasanya yang di luar daerah saya belinya.¹⁷⁵

Selanjutnya penulis menanyakan alasan ASN melakukan transaksi *bill* hotel, responden menjawab:

Alasannya *kan* biasanya begini, kita ada perjalanan dinas misalnya, itu ada penginapan, kalaunya bendahara atau di instansi tersebut, dimintanya itu ada biaya makan, penginapan, dan segala macam *kan*, terus kalau di laporan tersebut yang diminta kwitansi, NCR, terus apalagi? ya begitulah, pokoknya *kan* kwitansi dan NCR. Disitu mereka kalau di hotel itu maunya *cash*. Terus kalau di kantor tidak ada *cash* seperti itu, sekarang pakai sistem transfer. Uang tidak ada keluar sebelum perjalanan dinas. Bisa juga untuk laporan ketika kita sudah kegiatan, minta laporan, laporan itu ada diminta kwitansi, kwitansi tidak ada seumpama atau lupa atau ketinggalan otomatis kita beli. Kalau saya pribadi gini contoh saja di RAP perjalanan dinas itu katakan lah Rp.300.000,- dengan Pph/Ppn katakan lah 15%. Kemudian saya menginap di hotel Rp.250.000,-/malam nah itu kurang lebih yang saya lakukan. Kadang-kadang juga bisa di RAP Rp.300.000 dan waktu melakukan perjalanan dinas itu menginap satu malam bayar Rp.300.000,- Entah itu termasuk *mark up* atau tidak.¹⁷⁶

Selanjutnya penulis menanyakan untuk apa saja *bill* hotel itu digunakan, responden menjawab:

¹⁷⁴ Ibid.

¹⁷⁵ Ibid.

¹⁷⁶ Ibid.

Bill hotel intinya untuk pertanggung jawaban perjalanan dinas, seumpama kita melakukan perjalanan dinas. Ada itu SPPD. SPPD tersebut diserahkan ke bendahara beserta *bill* hotel apabila menginap.

d. Subjek Keempat

Nama : X

Pekerjaan : Resepsionis/ Petugas *front office* di Hotel BT

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pada tanggal 07 April 2020 penulis melakukan observasi sekaligus wawancara secara langsung kepada X dengan mendatangi hotel BT. Dalam observasi didapatkan bahwa cara untuk mendapatkan *bill* hotel di hotel BT tempat X bekerja adalah dengan mendatangi petugas *front office*, dimana X lah yang menjadi petugas *front office* di hotel BT. Ketika mendatangi X, penulis bertanya apakah bisa membeli *bill* hotel disini? X menjawab “bisa, berapa?” kemudian penulis bertanya kembali satunya berapa? X menjawab: “1(satu) harganya Rp. 50.000,-

¹⁷⁷

Setelah melakukan transaksi *bill* hotel, penulis menyampaikan tujuan penulis ke hotel tersebut adalah melakukan wawancara jika hotel tersebut dapat melakukan transaksi *bill* hotel. Penulis kemudian menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa responden menjawab bagaimana ketentuan tarif dalam pembelian *bill* hotel, hasil wawancaranya sebagai berikut:

¹⁷⁷ X, Observasi (Palangka Raya, 07 April 2020).

“Selemba Rp. 50.000, seperti tadi mbak.”¹⁷⁸

Selanjutnya penulis menanyakan alasan petugas *front office* mau melakukan transaksi *bill* hotel, responden menjawab:

“Yaa.. untuk menambah pemasukan saja *sih* mbak.”¹⁷⁹

Kemudian penulis bertanya tentang keterlibatan pimpinan hotel. Responden menjawab:

“Tahu saja dia (pimpinan hotel) kalau beli nota-nota seperti ini.”

e. Subjek Kelima

Nama : SG

Pekerjaan : Resepsionis/ Petugas *front office* di Hotel L

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pada tanggal 07 April 2020 penulis melakukan wawancara secara langsung kepada SG dengan mendatangi hotel L. Wawancara penulis lakukan setelah diketahui hotel L bisa melakukan transaksi *bill* hotel. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa responden menjawab bagaimana ketentuan tarif dalam pembelian *bill* hotel, Responden mengatakan:

Satu malam selembarnya Rp.50.000,- kalau dua malam menginapnya 10% (harga kamar x 10% = harga *bill*), terserah saja memilih kelas hotelnya yang mana (menunjuk daftar harga kamar).¹⁸⁰

¹⁷⁸ X, Wawancara (Palangka Raya, 07 April 2020).

¹⁷⁹ Ibid.

¹⁸⁰ SG, Wawancara (Palangka Raya, 07 April 2020).

Selanjutnya penulis menanyakan alasan petugas *front office* mau melakukan transaksi *bill* hotel, responden menjawab:

“Masalahnya bukan kita yang *anu* kan, mereka (pegawai kantor) yang minta tolong. Jadi kita jual ke mereka”.¹⁸¹

Penulis menambahkan: “Atau menambah pemasukan bisa juga ya pak?” kemudian responden menjawab:

Mungkin saja. Apalagi kan tamunya sekarang sedikit, *yaa..* apalagi dampak ini (covid-19).¹⁸²

Kemudian penulis bertanya tentang keterlibatan pimpinan hotel. Responden menjawab:

“Iyaa tahu saja ada transaksi begini, dibolehkan saja.”

f. Subjek Keenam

Nama : DP
Pekerjaan : *Room Boy* di Hotel NF
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Dalam observasi didapatkan bahwa cara untuk mendapatkan *bill* hotel di hotel NF tempat DP bekerja adalah dengan mendatangi petugas *front office*. Ketika mendatangi petugas *front office*, penulis bertanya apakah bisa membeli *bill* hotel disini? Petugas *front office* menjawab “bisa, tulis saja disini mbak, harganya Rp.75.000,- selembarnya. Kami paling bisa menuliskan Rp. 600.000,- di *bill* nya mbak.” Kemudian penulis menulis nama, tanggal *check in* dan *check*

¹⁸¹ Ibid.

¹⁸² Ibid.

out, dan harga kamar hotel yang diinginkan (Rp. 500.000,-) selanjutnya petugas *front office* membuat *bill* hotel dengan mengetikkan data yang diinginkan penulis di komputer ¹⁸³

Selanjutnya pada tanggal 10 April 2020 dan 11 April 2020 penulis melakukan wawancara secara *online* kepada DP melalui media *Instagram*. Wawancara penulis lakukan setelah melakukan observasi ke hotel NF, dan diketahui di hotel NF dapat melakukan transaksi *bill* hotel. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis. Ketentuan tarif dan harga kamar hotel penulis dapatkan saat observasi. Adapun data yang digali saat wawancara adalah penulis menanyakan ketentuan dalam transaksi *bill* hotel, responden menjawab:

Beli *bill* itu dianggap menginap sungguhan, padahal mereka tidak menginap. Tapi, tidak semua seperti itu, lumayan banyak juga yang benar-benar menginap tapi disaat *check out* mereka minta di *bill* ditulis lebih mahal dibanding harga aslinya. Tujuannya sama *sih kayaknya* biar dapat untung dari situ, oleh karena mungkin biaya menginap dibayar atau ditanggung oleh kantor mereka, jadi mereka nyari untung dari situ. Kemungkinan besar seperti itu mbak. ¹⁸⁴

Penulis menambahkan, “boleh berarti mas, jika minta dilebihkan seperti itu, bayar lagi atau tidak itu mas?”

Boleh saja, lumayan banyak yang beneran menginap tapi minta dituliskan harga di *bill* nya lebih besar. Misalkan dia sebenarnya menginap satu malam yang harganya Rp. 270.000,-/ malam, terus dia minta di *bill* dibikinkan harga Rp.370.000,-/malam, berarti dia ngambil untung Rp.100.000,- kalau aku tidak salah, tidak ada biaya tambahan yang diminta oleh resepsionis. ¹⁸⁵

¹⁸³ Petugas *Front Office* NF, *Observasi* (Palangka Raya, 07 April 2020).

¹⁸⁴ DP, *Wawancara* (Palangka Raya, 10-11 April 2020).

¹⁸⁵ Ibid.

Kemudian penulis menanyakan alasan petugas *front office* mau melakukan transaksi *bill* hotel, responden menjawab:

Kalau alasan rincinya tidak ada sebenarnya, ya itu cuman rezeki tambahan aja buat resepsionis, biasa mereka setor ke bos, tapi memang ada juga kadang yang curang tidak setor ke bos, kalau seperti temanku kemarin dia setor ke bos, terus dia dikasih separuh dari harga kemarin (separuh dari Rp.75.000,-). Disini ada laporannya mbak, laporannya sekedar ditulis tangan mbak, cuman modal kejujuran saja, kalau tidak jujur ya tidak ditulis laporannya. Itu juga sebenarnya sekedar saja, menghindari sidak. Kadang-kadang ada semacam sidak dari kantor atau dinas apa, mungkin mereka curiga ada pegawai mereka membuat *bill* disini, jadi mereka ngecek ke hotel, catatan laporan tuh sebagai pengingat juga siapa dan dari mana saja yang beli *bill*. Itu kalau di hotel kami *sih* mbak, kalau hotel lain kurang tau bagaimana prosedur kalau ada orang jual beli *bill* itu.¹⁸⁶

Dari wawancara tersebut, penulis simpulkan bahwa peraturan tersebut dibuat oleh hotel (ada laporan tertulis di buku), dengan demikian pimpinan hotel telah mengizinkan adanya transaksi *bill* hotel di hotel NF.

g. Subjek Ketujuh

Nama : NA
 Pekerjaan : Karyawan/Admin/Resepsionis di Hotel MPS
 Jenis Kelamin : Perempuan

Pada tanggal 07 April 2020 penulis melakukan observasi dan wawancara pertama ke hotel MPS dan pada tanggal 05 Mei 2020 penulis melakukan wawancara kedua dengan NA secara langsung dengan mendatangi hotel MPS. Dalam wawancara ini penulis telah

¹⁸⁶ Ibid.

menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis. Ketentuan tarif dalam transaksi *bill* hotel dan harga kamar hotel telah penulis ketahui pada saat observasi. Adapun data yang digali saat wawancara adalah penulis menanyakan ketentuan dalam transaksi *bill* hotel, responden menjawab:

Kalau disini ini kalau minta notanya saja tidak bisa, paling tidak minimal harus menginap dahulu, dan itu tidak apa-apa harga paling murah Rp.40.000,- dan tidak bisa juga notanya nota kosong. Takutnya nanti kata bos itu misalnya ada apa-apa, kan biasa tu mereka, perusahaan minta *bill* nota kosong katanya buat rekapan di perusahaan, takutnya nanti jadi masalah begitu. Hotel S *kan* kelas melati *kan*, bukan hotel bintang lima itu *kan*, bukan bintang 2, atau sebagainya, pokoknya istilahnya hotel S ini *yaa* bintang 1 kalau tidak salah, takutnya kalau ada masalah apa-apa begitu mbak, standar hotel melati paling tidak *kan* segitu (Rp. 40.000,-). itu paling murah dek, kalau paling mahal itu Rp.150.000,- itu kamar di luar, itu macam-macam harganya disini. Kemarin memang ada Rp.200.000,-, dan Rp.200.000,- itu memang lengkap ada kulkas, ada sofanya di dalam cuman itu ada satu kamar saja adanya disini.¹⁸⁷

Kemudian penulis menambahkan: “Berarti bisa tidak menginap ya mbak?” lalu responden menjawab:

Bisa mbak, tapi ya itu mbak Rp.40.000,- paling, kan kemarin kata kaya mbak, bisa beli *bill* tidak? Terus saya jawab bisa, asalkan mbaknya menginap sehari, walaupun sebenarnya tidak menginap mbak, ya itu tarif kamarnya Rp.40.000,- Walaupun tidak menginap bisa, tapi kami tetap kamarnya itu dikosongkan. *Kan* mbaknya ini tidak menginap, jadi harga kamar Rp.40.000,- (harga kamar = harga *bill*) itu kamar yang mbak beli tadi, mbaknya pulang *nih*, tetap kami kosongkan, istilahnya di dalam itu ada orang¹⁸⁸

Selanjutnya penulis menanyakan alasan NA mau melakukan transaksi *bill* hotel, responden menjawab:

¹⁸⁷ NA, Wawancara (Palangka Raya, 07 April dan 05 Mei 2020).

¹⁸⁸ Ibid.

Sepertinya membantu (para ASN) saja mbak nggak ada (maksud) apa-apa, nggak ada alasan tertentu dan itu kalau memang tamunya itu menginap kalau seminggu atau sebulan, soalnya kan ada kerjaan (di kota ini), ada yang sebulan ada yang seminggu, itu bisa minta kalau tidak mau pakai nota yang kecil itu kami akan ketikkan (di komputer) tapi pakai cap, ada logo hotelnya. Itu tidak kami jual, itu kami kasih, cuma *kan* beliau memang menginap disini mbak, kalau sekedar cuma mau minta *bill* satu hari atau apa itu ya tadi, tapi tidak menginap kami kasih yang itu aja.¹⁸⁹

Dari wawancara tersebut, penulis simpulkan bahwa peraturan tersebut dibuat oleh hotel, dengan demikian pimpinan hotel telah mengizinkan adanya transaksi *bill* hotel di hotel MPS.

2. Pandangan Ulama Kota Palangka Raya terkait Transaksi *Bill* Hotel

a. Subjek Kedelapan

Nama : SB

Umur : 56 Tahun

Pendidikan Terakhir : Pondok Pesantren Gontor Ponorogo

Jabatan : Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia
(MUI) Kota Palangka Raya

Pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 penulis melakukan wawancara secara langsung kepada SB. Penulis mendatangi kediaman beliau di jalan RTA. Milono Km. 4,5; Komplek Bangas Permai; Gang Sepakat 3, No. 124 blok H. Mengingat beliau sebagai Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palangka Raya dan Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Tengah, oleh karena itu penulis

¹⁸⁹ Ibid.

bermaksud mewawancarai beliau. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa SB menjawab bagaimana pandangannya terkait transaksi *bill* hotel di kota Palangka Raya, beliau mengatakan:

Boleh, karena apa? Dibolehkan itu alasannya karena aku sebagai pembeli sebagai orang yang menginap sudah tahu harga. Kalau kita menginap atau masuk saja tahu mau pulang dikeluarkan *bill* ada harganya yang mengecewakan kita itu tidak sah, karena kita tidak tahu harga semula, jadi sahnya disitu adalah kita mengetahui. Nah itu hukum dasarnya. Kemudian *bill* ini, perdagangan ini bisa berubah menjadi haram manakala *bill* itu tadi direkayasa, atau di monopoli, semasanya dia (ASN) mengisi *bill* tadi, *kan* kita dikasih *bill* langsung bayar, tapi kita semasanya, nah itu tidak boleh, berarti tidak sesuai dengan kontrak tadi yang pertama, itu satu haram. Yang kedua rekayasa itu dimaksudnya begini, bukti pembayaran kwitansi ini dua-duanya akan menerima hal yang haram, misalnya contoh Rp.10.000,- menyewa semalam lah berarti halal, asalnya. Maka manakala aku meminta tolong dibuatkan dalam *bill* itu tiga hari, haramnya disitu. Karena Rp.10.000,- itu andaikata dia beri juga, dia betul saja disitu, hotel itu benar saja tadi, tetapi manakala dia menyetujui dia memberikan *bill* itu dengan rekayasa, maka hotel itu kena haramnya. Dua-duanya kena. Itu haramnya, ada rekayasa. Rekayasa itu bila satu saja yang membuat itu tidak mungkin pasti kedua belah pihak, karena pihak ketiga yang akan dirugikan (pihak kantor tempat ASN bekerja). Jadi, haramnya *bill* itu manakala di rekayasa. Itu kunci perdagangan. Sama saja bila kita belanja ke pasar tetapi meminta kwitansi berlebih, itu akhirnya menjadi haram. Itulah dari halal menjadi haram, itu tijarah.¹⁹⁰

Nah sekarang bicara, *bill* itu kan kaitannya dengan resepsionis atau si pengantar, padahal *bill* itu yang dimaksud kwitansi tadi, oleh sebab itu tepisahlah hukumnya, yang satu itu ijarah/upah/*tip*nya dalam bahasanya, *tip*. *Tip* itu boleh. Mubah. Kalau mubah berarti halal. *Tip* itu kenapa disebut dengan mubah, karena boleh diberi boleh tidak. kalau *tip* tidak ada yang bisa melarang, itu boleh karena kita merasa suka, kita beri. Kalau kita tidak suka tidak kita beri, itu tidak masalah. Itu ijarah namanya. Itu konsep, jadi konsep sebenarnya tentang *bill* itu asalnya kalau

¹⁹⁰ SB, Wawancara (Palangka Raya, 23 April 2020)

dari sisi jual beli itu sah, karena sudah ada tertera harga dan disepakati oleh kedua belah pihak, yang biasanya dikatakan haram itu adanya rekayasa atau monopoli pihak hotel terhadap tamu, itu saja sebenarnya kuncinya.¹⁹¹

Ringkasnya itu kalau tijarah halal hukum asalnya, tapi akan berubah menjadi haram manakala *bill* itu direkayasa atau dimonopoli. Rekayasanya ya tadi, bilangnyanya menginap dua malam ternyata semalam. Monopoli itu seumpunya harganya sudah disepakati Rp.250.000,- semalaman, tiba-tiba kita terima *bill* Rp.300.000,- itu namanya monopoli. itu haram, diluar akad. Kalau ijarah tadi itu hukumnya mubah. Boleh diberi, boleh tidak.¹⁹²

Dari penjelasan SB diketahui bahwa jika kasus seperti yang dilakukan AMW (menginap tetapi ketika *check out* dari hotel, di *bill* hotel di *mark up*) itu berarti tidak halal. Kemudian penulis menanyakan, jika kasus transaksi ini seperti kasus AHN dan ISA (membeli *bill*, tetapi tidak menginap di hotel), responden menjawab:

Tidak boleh, nah itu rekayasa tadi. Ya rekayasa itu riba. Dalilnya وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Kalau jual beli itu dalam bahasa hadis nabi itu sebarangpun harga itu tidak menjadi masalah, nilai sebuah produk entah itu penginapan ataupun barang itu tidak menjadi masalah. Aku seumpamanya modalnya Rp. 1000,-, kujual Rp.100.000,- itu tidak masalah. Yang dinilai hukum itu adalah kalau dia membeli barang Rp.100.000,- dia senang dia suka itu sah, jadi hitungannya adalah suka sama suka, rida sama rida, berubah menjadi haram manakal satu tidak ridho diantara keduanya, ya itu yang rekayasa tadi. Sekarang pertanyaannya yang dirugikan siapa? Itu melibatkan orang ketiga. Berarti dua inilah berbuat, dia satu kelompok mencurangi pemerintah itu haramnya. Sebenarnya kenapa dia harus memakai *bill-bill* seperti itu. Padahal sebaiknya dia mencari lagi kwitansi. Saya tidak di hotel tapi di rumah, lebih baik dia bikin kwitansi sendiri. Itu yang disebut *bill*. Kwitansi itu transaksi tadi, saya tidak di hotel tapi menginap di rumah ini, siapakah saudaranya *kah*. Kwitansi itu sudah sah, tidak mutlak harus.. nah kalau pemerintah itu disuruh nginap di Jakarta, tidak harus di hotel sebenarnya, kemanapun dia bisa, tetapi itu adalah kalau dalam bahasa kita di dalam organisasi itu biaya akomodasi. Akomodasi itu biar di lantai atau dimana, yang penting ada bukti

¹⁹¹ Ibid.

¹⁹² Ibid.

bahwa kita tidur. Kwitansi itu tidak ada masalah, kwitansi itu kan sebagai...ketimbang dia memperlakukan melibatkan orang lain, *bill*, maka dua-duanya salah.¹⁹³

Selanjutnya penulis menanyakan jika transaksi *bill* hotel dilakukan dengan alasan kemaslahatan bersama seperti uangnya digunakan untuk kepentingan lain di kantor ASN atau *disaving* untuk kegiatan lain yang mendesak bagaimana hukumnya, responden menjawab:

“Apabila diawali dengan hal yang haram, kelanjutannya pun tetap haram (haram *muthlaqon*)”.¹⁹⁴

b. Subjek Kesembilan

Nama : SY
 Umur : 56 Tahun
 Pendidikan Terakhir : S3
 Jabatan : Ketua Bidang Ekonomi Syariah
 (Pemberdayaan Ekonomi Umat) Majelis
 Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan
 Tengah

Pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 penulis melakukan wawancara secara langsung kepada SY. Penulis mendatangi kediaman beliau di jalan Yos Sudarso, Mess Dosen UPR No. 104. Mengingat beliau sebagai Ketua Bidang Ekonomi Syariah (Pemberdayaan

¹⁹³ Ibid.

¹⁹⁴ Ibid.

Ekonomi Umat) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Tengah, oleh karena itu penulis bermaksud mewawancarai beliau. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa SY menjawab bagaimana pandangannya terkait transaksi *bill* hotel di kota Palangka Raya, beliau mengatakan:

Yang dinamakan ijarah itu *kan* jelas dalam fatwa itu *kan* rukunnya ada, seperti pembelian, jadi yang dinamakan ijarah itu bisa dalam bentuk pembelian, bisa dalam bentuk sewa atau upah. Jadi disana beli masuk disana sudah. Jadi kalau dibungkus masuk ijarah saja. Ijarah kan pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu dengan, pembayaran atau upah tetapi tidak diikuti pemindahan kepemilikan. Jadi kalau tidak ada pemindahan itu termasuk upah, kalau dalam bentuk pemindahan kepemilikan maka pembelian, di hotel langsung dihotel. Namanya ijarah itu ya, kalau namanya ijarah ya memang upah mengupah tapi disitu juga terjadi pembelian. Dalam konteks *bill* itu bahasa kerennya saja ya tergantung hotel-hotelnya biasanya menyebutnya. *Bill* hotel haram bila tidak sesuai maka haram, memang awalnya itu jual beli itu *kan*. Semua itu dibolehkan kecuali yang diharamkan baik yang transaksinya atau konten yang dibelinya. Pokoknya kalau jual beli *bill* bila rekayasa maka haram. Kemudian mengupah, iya kisahnya tolong menolong, tapi kontennya keliru.¹⁹⁵

Kemudian penulis menanyakan akad apa yang benar untuk menyebutkan transaksi tersebut? Ijarah, jual beli atau apa? Responden menjawab:

Kamu mau mngarah kemana dua-duanya bisa menurut saya kalau menggunakan jual beli bisa juga. Dia memang melakukan ijarah/upah ya sekaligus pembelian tentang menginap hotel tadi, tetapi tidak dengan sebenarnya. Iya soalnya tidak benar hanya pembelian akadnya, akad jual beli tidak memenuhi unsur-unsur, syarat-syarat dalam pembelian. Jual belinya tidak masuk, karena jual belinya barang yang dijual adalah barang yang kontennya rekayasa. Barang yang haram, yang kedua jika memang kita

¹⁹⁵ SY, Wawancara (Palangka Raya, 24 April 2020).

mendapatkan *bill* dengan cara yang salah juga nah itu ijarah itu kita bayar sesuai, kita beli misalnya makanan kan termasuk, kemudian jasanya kan jasa ruangan jasa kita menikmati pijat apa segala itu kan? ini yang benar juga kan, jasa *laundry*, dan jasa lainnya. Ijarah ada dua macam bisa salah bisa benar, sudah ada jalan dua, kalau jual beli *bill* hotel hanya ada satu jalan kiri, kalau ijarah ya jadi guna manfaat tadi ada dua jalan, yang sebenarnya bisa, yang rekayasa bisa. walaupun sedikit kecil, nah misalnya kita minta tuliskan Rp. 400.000,-, langganan *sih*, nah langganan itu ada daya tariknya bonus nya kan? nah seperti itu. Jadi ijarah yang salah tadi dia bersekongkol.¹⁹⁶

Selanjutnya penulis menanyakan jika transaksi *bill* hotel dilakukan dengan alasan kemaslahatan bersama seperti uangnya digunakan untuk kepentingan lain di kantor ASN atau *disaving* untuk kegiatan lain yang mendesak bagaimana hukumnya, responden menjawab:

Tidak ada dasar tertulisnya, seandainya ada dasar tertulisnya masih bisa dipertimbangkan. Tertulis dan diketahui oleh semua orang di kantor, bahwa SOP di kantor mengatur hal demikian. Misal kata pimpinan di kantor: “kita tidak ada kas di kantor ini, tolong kalau bisa bagaimanapun caranya, agar kita memiliki kas disini, nah jadi sedapat mungkin yang tiga malam, dua malam saja menginap, semalamnya yaa itulah, tolong sesuai dengan berapa ininya laporkan ke bendaharawan, biar bendaharawan di kantor mencatat walau hanya dengan catatan yang ditulis tangan, tidak usah yang resmi.” Namun demikian sekali lagi itu diketahui oleh kantor kemudian benar-benar digunakan untuk keperluan mendesak itu masih bisa dipertimbangkan. Dipertimbangkan tadi iya untuk keperluan di kantor tadi, itu masih bisa dipertimbangkan, karena itu dikompensasi untuk kegiatan itu, namun perbuatannya masih tetap salah. Hukumnya tetap haram. Transaksinya sudah salah, namun untuk kemaslahatannya masih bisa dipertimbangkan. Berawal dari yang rusak padahal maksud baik. Jadi karena bermula dari sesuatu yang salah hukum akhirnya tetap salah (haram). Berawal dari yang rusak padahal maksud baik¹⁹⁷

¹⁹⁶ Ibid.

¹⁹⁷ Ibid.

c. Subjek Kesepuluh

Nama : SBy
 Umur : 53 Tahun
 Pendidikan Terakhir : S1
 Jabatan : Ketua Bidang Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palangka Raya

Pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 penulis melakukan wawancara secara langsung kepada SBy. Penulis mendatangi kediaman beliau di jalan Akasia III No. 1, Rt. 3, Rw. 7. Mengingat beliau sebagai Ketua Bidang Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palangka Raya, oleh karena itu penulis bermaksud mewawancarai beliau. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa SBy menjawab bagaimana pandangannya terkait transaksi *bill* hotel di kota Palangka Raya, beliau mengatakan:

*Oh iya, baik. Kalo maksud redaksi itu definisinya itu jelas, artinya kalo didalam paham *fiqh* ini termasuk dalam bab jual beli. Dalam *bābul ba'i* dalam kitab manapun dalam *fiqh* Islam itu ada tentang *bābul ba'i*. Nah dari perspektif Islam itu dalam hal jual beli itu didasari ada sebuah ayat yang menyatakan وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (Allah menghalalkan jual beli, dan mengharamkan riba).*

Nah kenapa demikian, masalah jual beli dan riba itu sangat-sangat tipis perbedaannya, ketika sebuah jual beli yang memenuhi syarat ada penjual ada pembeli kemudian ada ijab kabulnya maka sah lah jual beli tersebut. Namun dalam pandangan *fiqh* kadang kala jual

beli itu menjadi haram atau menjadi cacat didalam bahasa *fiqhnya* itu adalah *ba'iul garar*, jual beli yang cacat, cacat hukum dia, misalnya tadi membeli kucing dalam karung, atau sesuatu barang tersembunyi kemudian ditebak itu didalam karung itu misalnya berapa, harganya berapa, dibeli sekian. Dikira-kirakan, dia berspekulasi disitu nah ini sudah terindikasi jual beli yang *garar* adalah jual beli yang haram. Nah jadi, hukum jual beli itu sangat jelas sekali makanya Allah menghalalkan yang namanya jual beli tapi mengharamkan riba. Nah kemudian terkait dengan persoalan transaksi *bill* disini jelas sekali sangat-sangat *garar*, terjadi kebohongan gitukan, seseorang yang menyatakan dirinya misalnya bahwa dia melakukan perjalanan dia padahal tidak dia hanya membeli sebuah kwitansi saja maka dia membohongkan.¹⁹⁸

Jadi adanya semacam keterbukaan, keterbukaan tadi yang membuat sesuatu itu menjadi terang tidak ada sesuatu yang ditutupin, Nah makanya ibarat sebuah analoginya membeli sesuatu dalam karung tadi maka itu adalah menjadi *garar*. Ketika jual beli itu *garar*, cacat, ditutup-tutupi maka itu juga cacat ya, seperti itu kesimpulannya.¹⁹⁹

Kemudian penulis menanyakan akad apa yang benar untuk menyebutkan transaksi tersebut? Ijarah, jual beli atau apa? Responden menjawab:

Ijarah itu definisinya pemberian sesuatu yang dasarnya tidak didasari dengan hal-hal yang harapan, ya pemberian ikhlas gitukan?. Tapi kalau dia mengharap, inikan dibeli, iya kan? (berapa? ayo Rp.100.000,- ku buat kan dahulu) kata dia (resepsionis). Ini ada tarif, ini jual beli. Ya..ada tarif, kalau yang dikatakan ijarah itu tidak bernilai apa-apa, ijarah itu adalah pemberian, nah pemberian saja, tidak ada apa namanya bernilai angka gitunah kan. Itu yang namanya ijarah, pemberian. Kalo dia katakan ijarah yang dari pihak hotel itu, itu keliru, sebab dia ada nilai yang harus dia tebus. Ada nilai yang harus dia tebus, tidak boleh itu. Jadi tetap definisinya dia terjebak dalam *ba'iul garar*.²⁰⁰

¹⁹⁸ SBy, Wawancara (Palangka Raya, 28 April 2020)

¹⁹⁹ Ibid.

²⁰⁰ Ibid.

Selanjutnya penulis menanyakan jika transaksi *bill* hotel dilakukan dengan alasan kemaslahatan bersama seperti uangnya digunakan untuk kepentingan lain di kantor ASN atau *disaving* untuk kegiatan lain yang mendesak bagaimana hukumnya, responden menjawab:

Ada satu kaidah *fiqh* yg bisa dijadikan dalil dan sumber hukum, الصَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ (kemudaran itu membolehkan hal-hal yang dilarang).²⁰¹ Contoh seperti kasus kelaparan di hutan, dia tidak menemukan makanan buah, dan semacamnya yang bisa dan halal dimakan, lalu ia menemukan binatang haram seperti babi, tikus atau lainnya yg haram dimakan, maka boleh dan halal baginya untuk memakan babi atau tikus tersebut, dari pada ia mati kelaparan. Jadi dalam *uṣhūl fiqh* ada solusi untuk kasus di atas. Jadi pendapat kita bahwa ketika keadaan yg memaksa dan darurat, apalagi untuk kepentingan orang banyak, setidaknya ada nilai kebaikan untuk bersama yg menjadi dasar kebijakan sesuatu. Pada kasus di atas, ketika ia menggunakan uang hasil kwitansi untuk hal-hal lain yang mengandung kemaslahatan bersama di kantor, maka ijtihadnya boleh, dan nilai ijtihad itu ketika benar mendapat 2 dan ketika salah mendapat 1. Maksudnya ketika seseorang mengambil langkah ijtihad, langkah itu dilakukan karena tidak ada didapati dasar hukum sesuatu tersebut baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, sehingga memerlukan pemikiran atau akal yg mengambil peran. Tapi tetap perlu ada *framingnya*, maksudnya perlu dipertegas bahwa masalah tersebut tidak menjadi suatu rujukan sandaran yang selalu dijadikan sandaran hukum, demi menghindari adanya upaya pembenaran untuk meraih keuntungan, jadi *maṣlaḥah* yang menjadi *illat ul hukmi* (sebab hukum) benar-benar untuk kepentingan orang banyak, bukan kepentingan personal atau hanya beberapa gelintir orang saja. Terhadap persoalan ini, orang yang dimaksud (pelaku) adalah orang yang memang memiliki jabatan dan tanggung jawab yang besar di institusi tersebut, sehingga dia melakukan suatu upaya atau kebijakan tersebut dikarenakan tidak ada jalan lain yang lebih baik dari pada cara yang dia lakukan itu guna mempertahankan nama baik kelembagaan/institusi yang ia pimpin, atau untuk sebuah tanggung jawab bagi seorang kepala bagian misalnya sehingga upaya yang dilakukannya dapat menyelamatkan orang banyak dari jebakan-jebakan sistem administrasi yang kaku. Seperti yang adik

²⁰¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 72.

bilang "keperluan atau belanja kantor yang tidak ada dimasukkan dalam anggaran" sedangkan tuntutan tentang belanja sesuatu tersebut harus ada di masa itu, dan tidak boleh tertunda ke anggaran sesudahnya atau anggaran di tahun depannya.²⁰²

d. Sumber Kesebelas

Nama : MAG

Umur : 44 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1

Jabatan : Anggota Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Tengah dan Anggota FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kota Palangka Raya

Pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 penulis melakukan wawancara secara langsung kepada MAG. Penulis mendatangi toko beliau (Butik Raihan) di jalan Seth Adji. Mengingat beliau sebagai anggota Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Tengah, oleh karena itu penulis bermaksud mewawancarai beliau. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa MAG menjawab bagaimana pandangannya terkait transaksi *bill* hotel di kota Palangka Raya, beliau mengatakan:

²⁰² Ibid.

Menipu, tidak halal itu jelas, bukan *syubhat*. Kalo *syubhat* antara halal dan haram, itu jelas keharamannya, kenapa? menyewa kamar sebuah diolah tiga, jelas sudah. Itu bagaimana kasusnya, tidak ada, tidak ada ijarah itu, tidak ada jual beli, itu penipuan. Jual beli itu kalau yang halal, kalau yang haram tidak bisa jual beli. Bahkan syarat sah jual beli itu dek, nanti dibaca *bābul ba'i*, itu syaratnya adalah bendanya halal. Kalau ada orang jual babi, kita menukar babi itu tidak jual beli, tidak namanya jual beli. Makanya bahasa orang kampung biasanya bila orang dapat biawak (*handak menukari kada?*(mau membeli tidak?) mengganti *pangalih* katanya. Tidak ada tukar ya biawak, jual ya) karena syarat sah jual beli itu adalah sesuatu yang halal. Sekarang kalau menipu itu apakah jual beli? tidak jual beli. Saya yang menjual *bill* pun haram, karena saya tahu dia tidak menginap. Yang membeli pun haram, karena apa? karena dia tau dia tidak menginap. Berarti namanya sama saling tipu menipu. Ini tidak ada transaksi, ini tipu-menipu. Transaksi bodong namanya. Bukan ijarah, bukan wadiah, bukan musyarakah. Kalo ijarah kan jelas, menyewa hotel semalaman bayar semalaman, itu ijarah. Upahkan? Coba kamu buka nanti bab jual beli salah satu sah nya jual beli adalah sesuatu yang halal. Kalau sesuatu yang haram bagaimana bisa disebut jual beli. Kalau sewa lagi, sewa itu jelas kalau nginap semalaman, bayar semalaman itu sewa. Tapi kalau semalam tapi bilanganya tiga malam itu bukan sewa. Yang semalamannya mungkin sewa, Nah berartikan tipu dalamnya, dia memberikan upah itu karena ingin menipu, substansinya semua tipu itu.²⁰³

(Kalau dia menginap tetapi kamarnya misal 1 saja, tetapi di laporan jadi 2) Nah bikin laporannya itu yang haram. Sedangkan yang transaksi disitu halal, karena *bill* memang seperti itu. Transaksinya halal saja, kalau memang disitu tertulis tetap satu kamar, tapi kalau tertulis dua kamar, transaksinya tidak halal juga. Berarti ada kong kalikong antara penyewa dan yang menyewa. Kalau alasan membantu makanya ada istilah dalam Al-Quran *وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ* saling tolong menolonglah dalam kebaikan jangan saling tolong-menolong dalam kejahatan. Contoh, mohon maaf, ada pelacur kasian katanya tidak laku, aku membantu saja ini meniduri malam ini, apakah halal? tidak halal. Paham tidak maksud saya dek? jadi konsep membantu itu dalam Islam sesuatu yang halal, diridhoi oleh Allah. Kalau tidak diridhoi oleh Allah, tidak ada istilah membantu. Aku ikhlas karena Allah Ta'ala tapi kerjanya haram ya tetap haram. Kata pelacur: aku ikhlas melayani kamu *lillahita'ala*. tetap haram, kenapa? karena kerjanya haram. Aku

²⁰³ MAG, Wawancara (Palangka Raya, 03 Mei 2020).

mencuri ikhlas, jelas saja mencuri ikhlas, tapi yang dicuri tidak ikhlas. Jadi tidak ada istilah membantu, karena konsep agama namanya membantu itu adalah selama *'alal birri wat taqwa*. Kalo *'alal ismi wal'udwan* itu tidak bisa dan hotel kalau dia berbicara seperti itu dia tidak mengkaji tentang konsep agamanya, dia mengkaji mungkin tentang konsep bagaimana hotelnya bisa laku saja.²⁰⁴

e. Subjek Kedua Belas

Nama : AH

Umur : 43 Tahun

Pendidikan Terakhir : S3

Jabatan : Sekretaris Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Tengah dan Wakil Sekretari Umum Nahdhatul Ulama (NU) Kota Palangka Raya

Pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 penulis melakukan wawancara secara langsung kepada AH. Penulis mendatangi kantor tempat beliau bekerja (Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya) di jalan G. Obos komplek Islamic Center. Mengingat beliau sebagai Sekretaris Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Tengah dan Wakil Sekretaris Umum Nahdhatul Ulama (NU) Kota Palangka Raya, oleh karena itu penulis bermaksud mewawancarai beliau. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah

²⁰⁴ Ibid.

digali ini bahwa AH menjawab bagaimana pandangannya terkait transaksi *bill* hotel di kota Palangka Raya, beliau mengatakan:

Kalau dikaji melalui *uṣūl fiqh* itu praktik yang tidak baik, praktik buruk. Kenapa? Karena salah satu hal yang dilakukan itu ada istilah maghadir. Maghadir itu *maysir*, *garar*, *dirar* dan *riba*. *Maysir* itu judi, *garar* itu adalah tidak jelas, menipu. *Dirar* itu memudaratkan, dan *riba* itu *riba*. Gaya transaksi apapun namanya, apakah jual beli atau apa, itu adalah banyak yang tidak jelas, menipu. Itu yang pertama, karena dia menipu berarti masuk *garar* dia. Karena dia tidak jelas akhirnya memudaratkan. Apa memudaratkannya? memudaratkannya tadi yaitu menggunakan dana negara *kan* akhirnya, jadi dana negara terkuras.²⁰⁵ Dalam

kaidah *fiqh* ada disebutkan *أَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ*

عَلَى التَّحْرِيمِ (asal segala sesuatu itu boleh, transaksi akad apapun

boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya). Apa dalil yang mengharamkannya? *yaa* dalil yang itu tadi. Menimbulkan kemudharatan, menyimpulkan kegararan tadi. Kemudian dalam kaidah *fiqh* juga disebutkan *دَرْءُ الْمَقْلَبِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ*

(menolak kemudharatan itu lebih diutamakan dibanding mengambil kemaslahatan), itu mudarat maka harus ditolak. Berarti tidak boleh seperti itu, *kan* istilahnya begitu. Kita tidak bisa menetapkan hukum itu secara jumlah, maksudnya secara general, hal yang seperti itu, berarti harus ada perkasus. Jadi, secara umum tadi, itu termasuk ke dalam transaksi tidak halal, karena mudarat dan *garar*. Sekarang kita beralih ke tujuan dia itu kenapa berlaku demikian? Pertama kita lihat dari kaidah *fiqh*, apa

kaidah *fiqh* tentang niat itu? *الْأُمُورُ بِمَقْصِدِهَا* (setiap persoalan itu tergantung dengan niatnya), dengan pelakunya. Nah jadi dalam

hadis nabi *إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ فِرْعٍ مَانَوَى* (seseorang akan mendapatkan seperti apa yang ia niatkan) jadi, darimana kita mengetahui niat itu, dari ekspresinya, nah dari ekspresi orang. Berarti seperti ini, kalau dia *memark up* adalah untuk keuntungan pribadi maka itu jelas tidak boleh. Tapi, kalau dia untuk menjadikan bahwa dia punya rumah, kalau tidak punya *bill* hotel, sementara orang perjalanan dinas itu harus menginap, tidak bisa dibuktikan bahwa dia ini perjalanan dinas beberapa hari, masa menginap dimana? *Kan* tidak logis, jadi harus ada *bill* hotel, tapi dia tidak mengambil *mark up* itu, tidak *memark up*

²⁰⁵ AH, Wawancara (Palangka Raya, 11 Mei 2020).

hotel, lalu diarahkannya kemana duit itu? Nah ini permasalahan lagi kan, walaupun memang betul dia sebagai itu, tetapi kalau misalnya memang dijadikan juga untuk keuntungan pribadi, tentu masih tidak boleh, masih menjadi transaksi tidak halal juga. Nah itu kalau kita kaji lewat *azzari'ah* itu mendatangkan kepada keburukan. Itu namanya *sadd azzari'ah*. مَا أَدَّى إِلَى الْحُرَامِ

فَهُوَ حَرَامٌ itu kaidahnya (apa yang mendatangkan kepada haram maka dia menjadi haram).²⁰⁶

Ada seperti ini (kasusnya), *bill* hotel itu diperlukan tapi disana itu dia ada menjamu orang, membawa orang makan, sementara uang untuk memberi orang makan itu tidak ada anggarannya. Misal kita disini menyelenggarakan kuliah dosen tamu, dalam RAB, bahkan dalam hukum yang diakui tidak ada membawa dosen tamu makanan ke Kampung Lauk, itu tidak bisa dipertanggung jawabkan. Akhirnya dibuatlah seperti membeli ATK, jadi duit ATK ini nanti yang seakan-akan menukar ATK, lalu duit ATK ini yang akan dipakai untuk membayar makan ke Kampung Lauk, nah itu bisa dipertanggung jawabkan. Nah ini kasusnya seperti yang kamu jelaskan tadi *kan*? Misalnya membeli *bill* hotel itu sebagai laporan perjalanan dinas, yang kedua dana itu tidak dipakai untuk pegawai tersebut, tapi dipakai nanti untuk *menomboki* apa, yang di luar dari RAB. Nah ini kan ada kegiatan lain, *ditomboki* terlebih dahulu. Kegiatan lainnya apa misalnya? Di dalam perjalanan itu kan banyak saja misalnya apa *kah* atau misalnya bila tidak dipakai disitu bisa *disaving* bersama, atau semacamnya. Nah ini masuk hukum mana? Nah itu masuknya hukum *hilah*. *Hilah* itu maknanya adalah melakukan perbuatan legal untuk menghindari kewajiban yang lain. Itu awalnya. Kemudian pengertian, *hilah* itu mengalihkan sesuatu hukum kepada hukum yang lain. Nah itu namanya *hilah* juga. Bentuk *hilah* itu banyak macamnya: Melakukan sesuatu perbuatan yang pada dasarnya disyariatkan untuk kemaslahatan, ada seperti itu kan? Kemudian, melakukan sesuatu perbuatan yang pada dasarnya disyariatkan untuk keburukan. Ada juga. Nah yang ketiga, melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang tapi untuk kemaslahatan. Nah ini masuknya yang itu tadi. Masuk ke melakukan perbuatan yang diharamkan tetapi untuk tujuan kebaikan. Kebaikannya itu tadi yang dialihkan ke tujuan lain, misal *menomboki*, seperti membawa makan itu tadi, atau misalnya untuk *disaving*, atau untuk hal lainnya.²⁰⁷

Hilah yang jenis ketiga ini, hukumnya apa? nah hukum *hilah* yang ketiga ini Ulama berbeda pendapat, ada yang

²⁰⁶ Ibid.

²⁰⁷ Ibid.

menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak. Yang menyatakan boleh itu seperti apa? Pelaku tetap berdosa, *nah* itu. Walaupun tujuannya untuk kemaslahatan. Jadi masih boleh dilakukan, boleh saja seperti itu, tetapi yang melakukan tetap berdosa. *Nah* yang menyatakan tidak tadi, berarti haram.²⁰⁸

Kemudian penulis menanyakan akad apa yang benar untuk menyebutkan transaksi tersebut? Ijarah, jual beli atau apa? Responden menjawab:

Kalau aku lebih cenderung itu ke jual beli. Bukan upah. *Masa* upah di situ? Kalau kita menginap itu kan mending, tetapi ketika *prak* kita minta ini, apa sebutannya, tidak bisa disebut ijarah. Aku lebih menyatakan seperti ini: masuk transaksi batil,

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

(An-Nisa: ayat 29) Ini transaksi yang batil, apakah dia masuk ijarah, apakah jual beli, dua-duanya termasuk batil. Awalnya kan begitu. Aku tidak mau menyebutkan itu *syubhat*, karena dia sesuai dengan tujuannya. Kalau kita sebutkan dengan *syubhat* dia hubungannya antara halal dan haram, *kan* sebutannya *syubhat* itu begitu... الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ... yang halal itu jelas, haram itu jelas, berarti ini tidak jelas. Padahal *kan* kita punya tujuan, ada kemaslahatan tadi, walaupun itu tadi akhirnya tetap berdosa.²⁰⁹

C. Analisis Data

1. Praktik Transaksi *Bill* Hotel di Kota Palangka Raya

Berdasar hasil wawancara dengan AHN, ia melakukan transaksi *bill* hotel dengan mendatangi hotel yang disarankan oleh teman sekantornya. Ketika masuk ke dalam hotel langsung menuju *front office*, dan menanyakan kepada pegawai hotel apakah di hotel tersebut dapat melakukan transaksi *bill* hotel? jika pegawai hotel mengatakan bisa, maka

²⁰⁸ Ibid.

²⁰⁹ Ibid.

dilakukanlah transaksi *bill* hotel dengan harga yang disepakati kedua belah pihak.²¹⁰ Keterangan yang hampir sama juga diungkapkan oleh ISA dan AMW²¹¹ yang menyatakan transaksi *bill* hotel bisa dilakukan dengan langsung datang ke hotelnya dengan menanyakan bisa atau tidak membeli *bill* hotel di hotel tersebut, kemudian ISA menambahkan dapat pula dengan cara menghubungi terlebih dahulu penjaga *front office*, kemudian mengatur perjanjian untuk bertemu.²¹²

Cara untuk memilih hotel mana yang dapat melakukan transaksi *bill* hotel, seperti pernyataan di atas AHN memilih hotel yang direkomendasikan teman sekantornya.²¹³ Adapun menurut pendapat ISA, tidak ada kriteria khusus dalam memilih hotel mana yang akan didatangi, hanya biasanya memilih hotel berjenis melati atau yang paling tinggi adalah hotel berjenis lantai 2 (dua). Menurutnya, jika hotel jenis lantai 4 (empat) ke atas itu tidak bisa karena sistem pelaporannya yang sudah sulit.

214

AMW juga menyatakan hal yang serupa, ia menjelaskan hotel yang dipilih itu berbagai macam, tidak ada kriteria khusus, tetapi dilihat jika berbintang tinggi pasti akan sulit untuk *memark up* harganya, sedangkan SBM (Standar Biaya Minimum) yang diberikan kantor tidak akan

²¹⁰ AHN, Wawancara (Palangka Raya, 02 April 2020).

²¹¹ AMW, Wawancara (Palangka Raya, 16 April 2020).

²¹² ISA, Wawancara (Palangka Raya, 02 April 2020).

²¹³ AHN, Wawancara (Palangka Raya, 02 April 2020).

²¹⁴ ISA, Wawancara (Palangka Raya, 02 April 2020).

mencukupi. Biasanya hotel yang dipilih AMW sekelas hotel bintang 2 (dua) atau penginapan seperti yang ada di *airyrooms traveloka*.²¹⁵

Mendapatkan selembbar *bill* hotel dapat dilakukan dengan dua cara, bisa dengan langsung membeli tanpa harus menginap terlebih dahulu, dan bisa pula dengan menginap terlebih dahulu.²¹⁶ Menurut ISA, jika tidak menginap, hanya membeli *bill* hotel saja, maka faktor akrab atau tidaknya dengan orang yang menjual *bill* hotel (pegawai hotel) akan mempengaruhi harga, kemudian ISA menambahkan biasanya menemukan harga Rp. 50.000,- untuk selembbar *bill* hotel.²¹⁷ Pernyataan sedikit berbeda disampaikan oleh AHN, dimana harga selembbar *bill* hotel apabila tidak menginap adalah menggunakan sistem hitungan persenan, biasanya 10% dari harga *bill* hotel yang diminta, misal memilih harga penginapan yang Rp. 250.000,- maka harga *bill* hotelnya adalah 10% dari Rp. 250.000,- yaitu Rp. 25.000,-.²¹⁸ Sejalan dengan pernyataan AHN, petugas *front office* Sg juga menyebutkan di hotel tempatnya bekerja transaksi *bill* hotel memakai sistem persenan, satu malam selembarnya Rp.50.000,- kalau menginap dua malam maka harganya 10% dari harga kamar yang dipilih, terserah saja memilih kelas hotelnya yang mana.²¹⁹

AHN menambahkan, bahwa ia pernah mendapatkan hotel yang memakai sistem per lembar, yaitu seharga Rp. 100.000,- per lembar,

²¹⁵ AMW, Wawancara (Palangka Raya, 16 April 2020).

²¹⁶ *Observasi transaksi bill hotel ke beberapa hotel di Palangka Raya* (Palangka Raya, 07 April 2020).

²¹⁷ ISA, Wawancara (Palangka Raya, 02 April 2020).

²¹⁸ AHN, Wawancara (Palangka Raya, 02 April 2020).

²¹⁹ Sg, Wawancara (Palangka Raya, 07 April 2020).

kemudian diisi sendiri *bill* hotelnya.²²⁰ Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh ISA dan AHN, AMW membeli *bill* hotel dengan menginap di hotel terlebih dahulu. Untuk harga selembarnya *bill* hotel yang dibeli AMW itu tidak menentu, tergantung hotel masing-masing, biasanya ada yang seharga Rp. 100.000,- bisa mendapat 2 (dua) *bill* hotel. Cara AMW *memark up* harga penginapan itu adalah, misal: yang melakukan perjalanan dinas ada 4 (empat) orang, tetapi sewa kamarnya hanya dua kamar saja. Jadi, 2 (dua) orang sisanya membeli *bill* hotel lalu *memark up* harganya dua kali lipat, kemudian keuntungannya dibagi bersama rekan-rekannya yang melakukan perjalanan dinas.²²¹

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, jika ditemukan dengan hasil wawancara pada penjaga *front office* di beberapa hotel di Palangka Raya, tampaknya pernyataan AHN, ISA dan AMW terkait dengan sistem transaksi *bill* hotel berkesesuaian. Sebagaimana observasi penulis kepada X bahwa orang yang membeli *bill* hotel akan dikenakan biaya Rp. 50.000,- per lembar, dimana *bill* hotel tersebut sudah ada tanda tangan petugas *front office* dan stempel hotel, kemudian pembeli menulis sendiri harga penginapan yang diinginkannya.²²²

Pernyataan hampir sama diutarakan oleh DP, yang menyebutkan harga untuk selembarnya *bill* hotel apabila tidak menginap adalah Rp. 75.000,- dengan cara menulis nama, tanggal *check in* dan *check out* dan memilih harga kamar yang diinginkan, kemudian petugas *front office* akan

²²⁰ AHN, Wawancara (Palangka Raya, 02 April 2020).

²²¹ AMW, Wawancara (Palangka Raya, 16 April 2020).

²²² X, Wawancara (Palangka Raya, 07 April 2020).

mengetiknya di sistem komputer dan jadilah *bill* hotel dengan harga kamar yang diinginkan. Harga kamar paling besar yang dapat dituliskan oleh petugas *front office* adalah Rp. 600.000,-. DP pun menambahkan bahwa tidak sedikit orang yang benar-benar menginap, tetapi pada saat *check out* mereka minta harga penginapan ditambahkan dari harga sebenarnya, misal: ada orang menginap 1 (satu) malam yang harga Rp. 270.000,-/malam, kemudian ia minta di *bill* hotel ditulis harga Rp. 370.000/malam,-, berdasarkan pernyataan DP, petugas *front office* tidak ada meminta biaya tambahan.²²³

Berbeda dengan pernyataan dua orang petugas *front office* di atas, harga selebar *bill* hotel di hotel tempat NA bekerja adalah sama dengan harga kamar hotel yang dipilih pembeli. Pembeli dapat memilih harga kamar termurah (Rp. 40.000,-) jadi harga *bill* nya adalah Rp. 40.000,-, tetapi pembeli dapat meminta kepada petugas *front office* untuk menuliskan harga kamar di *bill* hotel sesuai harga kamar yang diinginkan, maksimalnya adalah Rp. 200.000,- (harga kamar termahal). NA menambahkan, di hotel tempatnya bekerja tidak membolehkan menjual *bill* hotel kosong. Untuk yang benar-benar menginap juga ada, misal: orang yang menginap seminggu atau sebulan kemudian pada saat *check out* bisa minta ketikkan harga sesuai yang dikehendaki, tetapi tidak boleh lebih dari Rp. 200.000,-/malam, didalamnya sudah ada cap stempel hotel

²²³ DP, Wawancara (Palangka Raya, 10-11 April 2020).

dan *bill* hotel tersebut hanya diberikan saja kepada penginap, tidak dijual.²²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas jika dikaitkan dengan teori akad, maka transaksi di atas merupakan transaksi yang mengandung unsur *garar* (tipuan). Menurut madzhab Syafi'i, *garar* adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan/ akibat yang menakutkan. Begitu juga yang disampaikan Imam as-Sarakhsi serta Ibnu Taimiyah yang memandang *garar* dari segi adanya ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad.²²⁵ Dalam transaksi *bill* hotel, ASN membeli *bill* hotel (padahal tidak menginap) atau *mark up* harga penginapan (setelah *check out* menginap) dan hal tersebut diketahui dan disetujui oleh petugas *front office*, sehingga transaksi tersebut mengandung tipuan karena yang tertulis dalam *bill* hotel adalah tidak sebenarnya.

Adiwarman A. Karim menyebutkan dalam bukunya Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, bahwa terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Haram zatnya (*haram liẓātihi*);²²⁶ *haram liẓātihi* menurut mazhab

Maliki ialah haram semenjak semula, seperti perbuatan zina, shalat

²²⁴ NA, *Wawancara* (Palangka Raya, 07 April dan 05 Mei 2020).

²²⁵ Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Garar Dalam Transaksi Ekonomi", *Al-Iqtishad*, Vol. I, No. 1 (Januari 2009), 55.

²²⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

tanpa berwudhu, memakan bangkai, babi dan darah. Semua ini diharamkan semenjak semula karena mendatangkan kerusakan.²²⁷

- b. Haram selain zatnya (*haram ligairihi*);²²⁸ *haram ligairihi* menurut mazhab Maliki ialah semua perbuatan yang sebelumnya oleh *syara'* hukumnya wajib atau mubah namun karena ada suatu hal yang baru sehingga perbuatan itu diharamkan, seperti shalat memakai pakaian yang diperoleh dari mencuri, menjual sesuatu yang disertai tipuan, perkawinan yang hanya membolehkan suami pertama kembali mengawini bekas istrinya yang ditalak tiga, dll. Haram di sini karena sesuatu yang baru bukan dari asal perbuatan itu karena sesudah diteliti dapat mendatangkan kerugian dan kerusakan. Haram seperti ini dinamakan haram *saddan lizzāri'ah*.²²⁹
- c. Tidak sah (lengkap) akadnya.²³⁰

Dalam transaksi *bill* hotel yang mengandung tipuan maka terlarangnya transaksi tersebut adalah faktor haram selain zatnya (*haram ligairihi*), bukan termasuk haram zatnya, karena transaksi *bill* hotel pada dasarnya boleh, namun karena ada rekayasa (tipuan) mengakibatkan transaksi tersebut haram. Dasar pelarangan penipuan dalam perjanjian menurut hukum Islam adalah hadis Nabi yang berbunyi:

²²⁷ Chaerul Uman, dkk., *Uṣūl Fiqih 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 236.

²²⁸ Karim, *Bank Islam Analisis*, 30.

²²⁹ Uman, dkk., *Uṣūl Fiqih 1*, 236.

²³⁰ Karim, *Bank Islam Analisis*, 30.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُيْبَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي²³¹

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW berdekatan dengan selonggok makanan lalu baginda memasukkan tangannya ke dalam longgokan itu. Tiba-tiba jari baginda terkena sesuatu yang basah. Baginda bertanya: "Apa semuanya ini wahai tuan punya makanan? Orang itu menjawab: "Terkena hujan, wahai Rasulullah." Baginda bersabda: "Mengapa tidak kamu letakkan di atas supaya orang ramai dapat melihatnya. Sesiapa yang menipu maka dia bukan dari kalanganku.

Tujuan suatu akad transaksi harus sejalan dengan syari'ah. Ini berarti, apabila suatu akad dilangsungkan untuk tujuan yang merusak atau membahayakan, maka ia dapat dikatakan tidak sah atau batal.²³² Tidak sah akad dalam transaksi *bill* hotel mengakibatkan akad dalam transaksi tersebut masuk ke dalam akad yang tidak sah kategori batil, artinya akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara'* sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Ulama *fiqh* menyatakan bahwa akad batil mengandung esensi yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.²³³

Berdasarkan uraian di atas, mendapatkan *bill* hotel dapat dilakukan dengan dua cara, bisa dengan langsung membeli tanpa harus menginap

²³¹ HR. Muslim dan at-Tirmidzi.

²³² Abdurrauf, "Penerapan Teori Akad, 25.

²³³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 23.

terlebih dahulu, dan bisa pula dengan menginap terlebih dahulu. Dalam artian jika menginap terlebih dahulu maka betul saja *bill* hotel itu didapatkan setelah ASN melakukan *check out* dari hotel, namun *bill* hotel yang didapatkan adalah hasil *mark up* dari harga kamar hotel yang sebenarnya. Menurut penulis dua cara tersebut adalah sama-sama mengandung mudarat. Namun jika dibandingkan, tidak menginap di hotel hanya membeli *bill* hotel kosong saja dan menulis harga kamar sesuai yang dikehendaki itu lebih mudarat dibandingkan menginap di hotel dan ketika *check out* memark up harga kamar hotel sesuai yang dikehendaki.

Dalam *fiqh* ada kaidah yang berbunyi *الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخَفِ* yang artinya “kemudharatan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan.”²³⁴ Yang menjadi syarat kaidah ini adalah ketika dua mudarat itu tidak bisa dihindari semuanya, tapi masih bisa menghindari salah satunya dan tahu mudarat yang lebih ringan, maka itulah yang harusnya dilakukan.²³⁵ Menurut penulis jika memang transaksi *bill* hotel tidak dapat dihindari lagi, maka dengan kaidah di atas, melakukan transaksi *bill* hotel dengan menginap terlebih dahulu, masih dapat diterima. Dengan catatan tetap menginap di hotel, namun saat *check out* hanya membeli *bill* hotel tambahan tanpa harus memark up harga. Namun tetap, apabila uang dari RAB perjalanan dinas sudah dicairkan, maka uang tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi,

²³⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 75.

²³⁵ Musyaffa Addariny, “Mengambil yang Lebih Ringan Mudaratnya” dalam <https://muslim.or.id/45976-mengambil-yang-lebih-ringan-mudharatnya.html/> (17 Juli 2020).

melainkan disumbangkan kepada orang yang membutuhkan seperti diberikan kepada badan sosial, panti asuhan, dll.

2. Latar Belakang Terjadinya Transaksi *Bill* Hotel di Kota Palangka Raya

Berdasarkan hasil wawancara dengan AHN, ISA dan AMW, *bill* hotel digunakan untuk bukti keuangan pada laporan perjalanan dinas dan laporan kegiatan yang mengundang tamu dari luar daerah, tambah ISA.²³⁶ AHN menjelaskan bahwa alasannya membeli *bill* hotel adalah yang pertama karena kebiasaan di kantornya memang menggunakan sistem seperti itu, jadi AHN mengikuti cara seperti itu juga (untuk laporan). Kemudian alasan yang kedua untuk memanfaatkan atau memaksimalkan anggaran, bagi AHN idealnya anggaran ada untuk digunakan. Karena AHN mempunyai tempat tinggal di Palangka Raya, jadi jika dinas ke Palangka Raya, ia lebih memilih menginap di rumah selama perjalanan dinas berlangsung dan untuk bukti penginapan dilakukan lah transaksi *bill* hotel untuk mendapatkan *bill* hotel.²³⁷

Dari pemaparan AHN, maka sebenarnya alasannya melakukan transaksi *bill* hotel adalah karena mengikuti teman sekantornya dan untuk mengambil keuntungan. Pernyataan yang hampir sama juga diungkapkan oleh AMW yang menyatakan alasannya melakukan transaksi *bill* hotel adalah untuk *mark up* harga penginapan agar mendapatkan keuntungan.

²³⁶ AHN, ISA, dan AMW, *Wawancara* (Palangka Raya, 02 April dan 16 April 2020).

²³⁷ AHN, *Wawancara* (Palangka Raya, 02 April 2020).

Tambahnya, membeli *bill* juga bisa untuk diperjual-belikan kembali, tetapi itu biasanya adalah nota travel.²³⁸

Sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan AMW, ISA melakukan transaksi *bill* hotel adalah karena alasan yang terdesak, misal: ketika mengadakan kegiatan yang mengundang tamu dari luar daerah, maka harus ada *bill* hotel sebagai pelengkap laporan pertanggung jawabannya, jika *bill* hotel yang asli hilang atau tercecer, maka dilakukanlah transaksi *bill* hotel di hotel yang dipilih. ISA pun melakukan transaksi *bill* hotel bisa dikatakan karena takut rugi, sebab apabila mencari penginapan yang harganya sama dengan RAB, maka ketika RAB tersebut dicairkan, ada pajak atas biaya akomodasinya, yang berarti uang yang dipakai terlebih dahulu untuk menginap di hotel akan mendapatkan ganti kurang dari harga di RAB karena diberlakukan pajak di instansi/lembaga tersebut.²³⁹

Namun, alasan tersebut menurut penulis tetap masuk dalam kategori untuk mengambil keuntungan, sebab ketika uang belum dicairkan, ISA pasti sudah mengetahui berapa pajak yang akan dipungut dari pencairan dana tersebut, dengan demikian, jika ISA tetap mencari penginapan yang jauh kurang dari RAB, maka keuntungan untuk pribadi akan didapatkan ISA. ISA pun menambahkan terkadang instansi tempatnya bekerja juga melakukan transaksi *bill* hotel, kemudian uangnya *disaving* untuk kantor/

²³⁸ AMW, *Wawancara* (Palangka Raya, 16 April 2020).

²³⁹ ISA, *Wawancara* (Palangka Raya, 02 April 2020).

instansi tersebut dan digunakan jika ada kebutuhan-kebutuhan mendesak.²⁴⁰

Adapun untuk alasan petugas *front office* melakukan transaksi *bill* hotel, menurut Sg dan X adalah untuk mengambil keuntungan dan juga sebagai penambah pemasukan untuk hotel,²⁴¹ karena hotel tempat Sg dan X bekerja itu sepi pengunjung. Hampir serupa dengan pendapat NA yang menyatakan alasan hotel mau memberlakukan transaksi tersebut adalah untuk menambah pemasukan hotel karena sepi pengunjung dan juga untuk menolong para pembeli yang biasanya adalah ASN (Aparatur Sipil Negara), yang mana ASN (Aparatur Sipil Negara) membeli atau meminta *bill* hotel untuk rekapan di perusahaannya. Tidak ada alasan lain, tambahannya.²⁴² Berbeda halnya dengan pendapat DP, menurutnya alasan pegawai hotel mau melakukan transaksi *bill* hotel adalah sebagai tambahan rezeki untuk para petugas *front office* dan untuk menolong para pembeli yang menginginkan *bill* hotel.²⁴³

Terkait keterlibatan para pemilik atau pimpinan hotel mengenai transaksi *bill* hotel, dari hasil wawancara penulis kepada petugas *front office* didapatkan bahwa para pemilik atau pemimpin hotel mengetahui adanya transaksi *bill* hotel tersebut. Menurut NA pemilik atau pimpinan hotel lah yang telah membuat sistem demikian (pada hotel tempat NA

²⁴⁰ Ibid.

²⁴¹ Sg dan X, *Wawancara* (Palangka Raya, 07 April 2020).

²⁴² NA, *Wawancara* (Palangka Raya, 05 Mei 2020).

²⁴³ DP, *Wawancara* (Palangka Raya, 10-11 April 2020).

bekerja),²⁴⁴ hampir serupa dengan pernyataan DP yang menyebutkan bahwa petugas *front office* akan menyetorkan uang dari hasil transaksi *bill* hotel kepada pemilik atau pimpinan hotel, akan tetapi, menurut DP adapula petugas *front officenya* yang mengambil uang hasil menjual *bill* hotel untuk keuntungan sendiri (tidak disetorkan ke pemilik atau pimpinan hotel).²⁴⁵

Berdasarkan paparan data di atas, setidaknya ada beberapa alasan yang melatarbelakangi para pihak melakukan transaksi *bill* hotel diantaranya:

- a. Bagi ASN: yang *pertama* memanfaatkan atau memaksimalkan anggaran kantor, *kedua* karena ingin mengambil keuntungan pribadi, *ketiga* untuk keperluan mendesak seperti dialihkan untuk dana kegiatan lain atau sebagai dana *saving* di instansi/lembaga tersebut).
- b. Bagi petugas *front office*: yang *pertama* untuk menambah pemasukan hotel, *kedua* mendapatkan keuntungan pribadi, *ketiga* menolong ASN yang ingin bertransaksi *bill* hotel.

Kebanyakan ASN melakukan transaksi tersebut untuk melengkapi bukti menginap saat melakukan perjalanan dinas. Menjadi persoalan yang dilematis bilamana saat melakukan perjalanan dinas, ternyata ASN memiliki sanak saudara di kota tempat dinas tersebut. Misalnya saja ketika ASN memiliki orang tua di kota tersebut yang lama tidak dikunjungi, pastilah untuk menghormati orang tua ASN, ada rasa ingin menginap di rumah orang tua tersebut, bukan di hotel. Namun, *bill* hotel haruslah

²⁴⁴ NA, Wawancara (Palangka Raya, 05 Mei 2020).

²⁴⁵ DP, Wawancara (Palangka Raya, 10-11 April 2020).

didapatkan agar perjalanan dinas terbukti di kota itu. Menurut penulis ketika dihadapkan dengan persoalan seperti ini, ada dalam *fiqh* terdapat kaidah إِذَا جُمِعَ الضَّرَرَانِ أَسْقَطُ الْأَكْبَرُ لِلْأَصْغَرِ yang artinya “Jika ada dua mudarat yang berkumpul, maka yang lebih besar harus digugurkan, untuk melakukan yang lebih kecil.”²⁴⁶

Jika dikaitkan dengan kaidah di atas, mudarat yang dilakukan ASN adalah melakukan penipuan dengan membeli *bill* hotel di kota tersebut, jika ia menginap di rumah orang tuanya. Mudarat selanjutnya orang tuanya kecewa atau tidak nyaman (karena ingin berlama-lama menemui anak tersebut) jika ia menginap di hotel. Menurut penulis lebih baik ASN melakukan mudarat mengecewakan orang tuanya dibandingkan melakukan penipuan. Sebab, waktu untuk mengunjungi orang tuanya bisa saja dilakukan saat istirahat dari pekerjaan dinas tersebut kemudian menjelaskan kepada orang tuanya agar tidak kecewa karena kedatangannya yang hanya sebentar, karena itu sudah merupakan resiko pekerjaan yang harus ditanggung oleh ASN.

Kemudian alasan selanjutnya ASN dan alasan petugas *front office* adalah untuk mengambil keuntungan dalam transaksi *bill* hotel. Al-Qur'an telah menjelaskan prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam bermu'amalah atau bertransaksi, diantara prinsip-prinsip dasar yang dimaksud adalah sebagai berikut:

²⁴⁶ Musyaffa Addariny, “Mengambil yang Lebih Ringan Mudaratnya” dalam <https://muslim.or.id/45976-mengambil-yang-lebih-ringan-mudharatnya.html/> (17 Juli 2020).

- a. Asas suka sama suka (*al-tarāḍi*), prinsip ini terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ²⁴⁷

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.²⁴⁸

Kerelaan dalam ayat di atas merupakan kerelaan yang sebenarnya, bukan kerelaan yang bersifat semu dan seketika. Kerelaan ini harus diekspresikan dalam berbagai bentuk muamalah yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan, baik ketika akad itu berlangsung maupun sesudahnya.²⁴⁹ Dalam hasil penelitian, praktik transaksi *bill* hotel mengandung asas suka sama suka atau kerelaan kedua belah pihak (ASN dan petugas *front office*), akan tetapi kerelaan tersebut diekspresikan dalam suatu transaksi yang mengandung tipuan untuk mengambil keuntungan pribadi, dengan kata lain kedua belah pihak mendapatkan harta atau rezeki dari transaksi *bill* hotel adalah dengan cara yang batil. Pihak yang dirugikan dalam transaksi ini adalah pihak ketiga (kantor atau institusi tempat ASN bekerja) dan juga Negara.

²⁴⁷ An-Nisa, 4: 29.

²⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 83.

²⁴⁹ Darmawati H, "Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah", *Sulesana*, Vol. 12, No. 2 (2018),

- b. Asas tolong-menolong/ saling membantu.²⁵⁰ Diantara ayat Al-Qur'an yang menekankan keharusan tolong-menolong salah satunya adalah surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ²⁵¹

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.²⁵²

Tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat memang menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari dapat dipahami bahwa tolong menolong merupakan perilaku yang memberi manfaat kepada orang lain. Islam mewajibkan tolong menolong antar umat beragama, namun Islam juga memberikan batasan sebagaimana ayat di atas yaitu tolong-menolong hanya dilakukan dalam hal kebaikan dan taqwa, dan melarang untuk tolong-menolong dalam hal berbuat dosa dan pelanggaran.

Berdasarkan analisis penulis, dalam transaksi *bill* hotel dalih tolong-menolong hanya untuk menutupi kecurangan yang telah dilakukan ASN dan juga petugas *front office*, jika petugas *front office* mengetahui bahwa *bill* hotel akan digunakan sebagai laporan ASN, maka petugas *front office* telah membantu ASN berbuat dosa, sebab petugas *front office* telah memberi *bill* dengan keadaan kosong atau berisi tetapi tidak sesuai kenyataan, artinya ASN tidak mengingap di

²⁵⁰ Ibid.

²⁵¹ Al-Maidah, 4: 2.

²⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 106.

hotel tersebut. Sama halnya apabila petugas *front office* mengizinkan harga penginapan di *bill* hotel dinaikkan (tidak sesuai dengan harga menginap sebenarnya) ketika ASN *check out* dari hotel sehabis menginap, yang berarti bahwa petugas *front office* telah memberikan kesaksian tertulis yang palsu.

Jika dikaitkan dengan teori etika, alasan ASN melakukan transaksi *bill* hotel telah melanggar norma dasar etika (*bribery, coercion, deception, theft, dan unfair discrimination*²⁵³) karena ASN telah melakukan manipulasi dalam membuat laporan pertanggung jawaban keuangan perjalanan dinas atau laporan hasil pertanggung jawaban kegiatan. Manipulasi masuk ke dalam ranah *deception*, yaitu tindakan memanipulasi orang atau perusahaan dengan menyesatkannya. Dengan kata lain, *deception* adalah kegiatan menipu, sengaja menyesatkan dengan tindakan atau perkataan yang tidak benar, mengetahui dan melakukan membuat pernyataan yang salah atau representasi²⁵⁴, selaras dengan transaksi *bill* hotel yang merupakan transaksi yang di dalamnya mengandung unsur tipuan.

Alasan ASN dalam melakukan transaksi *bill* hotel salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi itu sesuai dengan prinsip dasar etika *egoism*. *Egoism* atau *egoisme* merupakan standar yang mengacu pada kepentingan diri sendiri.²⁵⁵ ASN dalam melakukan

²⁵³ Mahendra Adhi Nugroho, "Konsep Teori dan Tinjauan Kasus Etika Bisnis PT Dirgantara Indonesia (1960 - 2007)", *Economia*, Vol. 8, No. 1 (April 2012), 24-25.

²⁵⁴ Ibid.

²⁵⁵ Ibid.

transaksi *bill* hotel mengabaikan nilai-nilai kejujuran, karena menurutnya anggaran yang disediakan kantor merupakan hak yang dapat dimilikinya, dan anggaran tersebut harus dihabiskan (memaksimalkan anggaran).

Adapun alasan ASN selanjutnya, melakukan transaksi *bill* hotel karena untuk kebutuhan bersama di kantor, yang mana uang yang didapat dari pembelian *bill* hotel dapat dialihkan untuk kegiatan yang lain, artinya uang tersebut berasal dari negara (anggaran di kantor) dan untuk negara pula (untuk kegiatan lain di kantor). Menurut penulis alasan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan baik, walau pada hakikatnya transaksi yang dilakukan adalah kurang pantas. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar etika *utilitarianisme* yang mana menurut prinsip ini suatu tindakan dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat (*the greatest happiness of the greatest number*).²⁵⁶ Jika suatu perbuatan mengakibatkan manfaat paling besar, dalam arti memajukan kesejahteraan, kebahagiaan, serta kemakmuran bagi orang banyak maka itu adalah perbuatan baik.²⁵⁷ Ukuran baik tidaknya suatu tindakan dilihat dari (1) akibat, konsekuensi, atau tujuan dari tindakan itu, apakah memberi manfaat atau tidak; (2) dalam mengukur akibat dari suatu tindakan, satu-satunya parameter yang penting adalah jumlah kebahagiaan atau

²⁵⁶ Staff UNY, "Teori Etika Perkembangan Perilaku Moral", *Etika Bisnis*, t.d.t., 3.

²⁵⁷ Muhammad Maiwan, "Memahami Teori Etika: Cakrawala dan Pandangan", *Mimbar Demokrasi*, Vol. 12, No. 2 (April 2018), 204.

jumlah ketidakbahagiaan; (3) kesejahteraan setiap orang sama pentingnya.²⁵⁸

3. Pandangan Ulama Kota Palangka Raya terkait Transaksi *Bill* Hotel

Setelah membandingkan hasil wawancara bersama Ulama kota Palangka Raya yang telah penulis wawancarai yakni SB, SY, SBy, MAG dan AH, semua menyatakan transaksi *bill* hotel yang mengandung rekayasa atau tipuan adalah haram, namun ada salah satu kasus dalam transaksi tersebut yang dibolehkan oleh 2 (dua) Ulama untuk dilakukan dengan alasan tertentu.

Dari pembahasan sebelumnya diketahui beberapa alasan yang menyebabkan ASN melakukan transaksi *bill* hotel, alasannya adalah sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan anggaran kantor karena anggaran ada untuk digunakan, kemudian uangnya dipakai untuk kepentingan pribadi, dengan cara membeli *bill* hotel di kota tempat melakukan perjalanan dinas (tidak menginap di hotel, tetapi menginap di rumah sanak saudara/kerabat yang berada di kota tempat dinas dilakukan);
- b. *Memark up* biaya untuk keuntungan pribadi dengan cara menaikkan harga kamar penginapan di *bill* hotel atau dengan membeli *bill* hotel tambahan pada saat *check out* sehabis menginap;
- c. Digunakan untuk keperluan di kantor tempat ASN bekerja, yang mana uangnya akan dialihkan untuk kepentingan lain di kantor/ *disaving*.

²⁵⁸ Staff UNY, "Teori Etika Perkembangan, 3.

Caranya adalah membeli *bill* hotel di kota tempat melakukan perjalanan dinas atau tempat kegiatan dilaksanakan (tidak menginap di hotel) atau dengan cara mencari penginapan yang kurang dari harga yang telah dianggarkan, jadi dana lebihnya untuk *disaving* pihak kantor.

Menurut Ulama kota Palangka Raya untuk alasan yang pertama dan kedua mereka sepakat mengatakan transaksi *bill* hotelnya adalah haram. Adapun untuk alasan yang ketiga, 2 (dua) Ulama menyatakan boleh dengan alasan adanya kemaslahatan. Adapun terkait akad praktik transaksi ini, ada 1 (satu) Ulama yang menerangkan transaksi ini merupakan jual beli, 2 (dua) Ulama menyebutkan transaksi ini merupakan jual beli dan ijarah, dan 2 (dua) Ulama menyebut transaksi batil/ transaksi tidak halal.

Dalam khazanah ijtihad penentuan hukum suatu situasi atau hal baru sudah menjadi hal yang wajar bila para Ulama berbeda pendapat dalam menyikapinya. Mengenai perbedaan pendapat para Ulama di kota Palangka Raya berikut penulis paparkan di bawah ini.

a. Pendapat yang Melarang Transaksi untuk Kepentingan Pribadi

Ulama yang tergolong dalam kelompok ini adalah SB, SY, SBy, MAG dan AH, dengan kata lain semua Ulama yang penulis wawancarai sepakat bahwa transaksi *bill* hotel yang mengandung tipuan dan untuk keuntungan pribadi adalah haram. Berdasarkan alasan umumnya dari transaksi *bill* hotel tersebut mengandung *garar* atau tipuan, sehingga transaksi tersebut memudaratkan. Menurut AH

memudaratkannya itu adalah ASN menggunakan dana negara untuk keuntungan pribadinya, dan akhirnya dana negara terkuras.²⁵⁹

Berdasarkan kaidah *fiqh* *أَلْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَاحُهُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى*

التَّحْرِيمِ (Hukum asal sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang

menunjukkan keharamannya).²⁶⁰ Dalil yang mengharamkan transaksi tersebut adalah karena menimbulkan kemudharatan, sebab transaksi tersebut mengandung *garar* atau tipuan yang dilakukan oleh ASN dan petugas *front office* untuk sebuah laporan perjalanan dinas atau laporan kegiatan tempat ASN bekerja. *Garar* dilarang dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Larangan *garar* didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa Ayat 29 yang berbunyi:

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ²⁶¹

Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.²⁶²

Dari ayat di atas, penjelasan jalan yang batil itu dapat berupa hal-hal yang memberikan kerugian untuk salah satu pihak, seperti *maysir*, *garar* dan *riba*. Adapun menurut Sayyid Sabiq yang menjelaskan

²⁵⁹ AH, Wawancara, (Palangka Raya, 11 Mei 2020).

²⁶⁰ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: Noerfiqri, 2019), 60.

²⁶¹ An-Nisa, 4: 29.

²⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 83.

tentang *garar* yaitu “*Bai’ul garar adalah setiap jual beli yang memuat ketidaktahuan atau memuat pertaruhan dan perjudian.*”²⁶³

Dalam kaidah *fiqh* disebutkan *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ*

(*menolak mafsadah harus didahulukan daripada meraih maslahat*)²⁶⁴,

karena perbuatan ASN tersebut menguras uang negara maka mudaratnya harus ditolak. Jadi, untuk alasan ASN melakukan transaksi *bill* hotel dengan tipuan, untuk keuntungan pribadi atau mengambil untung untuk diri sendiri dari jalan yang haram, maka Ulama sepakat dalam keharaman transaksi *bill* hotel tersebut dan penulis pun setuju dengan pendapat kelompok ini.

b. Pendapat yang Melarang Mutlak

Ulama yang tergolong dalam kelompok ini yaitu SY, MAG, dan SB. Dasar pendapat kelompok ini bermuara pada keharaman transaksi *bill* hotel dari awal transaksi tersebut dilakukan. Seperti yang penulis jabarkan dalam sub bab praktik transaksi *bill* hotel, terlihat bahwa praktik transaksi tersebut mengandung unsur tipu-menipu. Baik yang dilakukan oleh ASN maupun petugas *front office*.

Menurut MAG jika hotel melakukan transaksi tersebut maka, pihak hotel hanya mengkaji bagaimana hotelnya bisa laku di pasaran, dengan melakukan praktik transaksi *bill* hotel untuk menarik konsumen ke hotel tersebut, tetapi pihak hotel tidak mengkaji konsep agamanya.

²⁶³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 161.

²⁶⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 191.

MAG menambahkan jika berbicara agama, maka sepatutnya empat mazhab tidak membolehkan hal tersebut karena mengandung penipuan.²⁶⁵

Hampir sama dengan pernyataan MAG, SB pun menjelaskan haramnya transaksi *bill* hotel itu manakala di rekayasa. Rekayasa dalam transaksi *bill* hotel itu bila satu saja yang membuat tidak mungkin, pasti kedua belah pihak, dan berakibat pihak ketiga akan dirugikan. Maksud pihak ketiga adalah pihak kantor dari tempat ASN bekerja atau Negara. SB berpendapat apabila dimulai dari yang haram, maka selanjutnya pun akan haram (haram *muthlaqon*), walaupun alasannya untuk kepentingan bersama di kantor (tempat ASN bekerja) bukan untuk kepentingan pribadi.²⁶⁶

Menurut penulis rekayasa yang dijelaskan SB sesuai dengan pengertian penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP²⁶⁷, yakni rangkaian kebohongan yang dilakukan ASN dan petugas *front office* adalah membuat *bill* yang isinya tidak sama dengan kenyataan dan itu berakibat laporan pertanggung jawaban perjalanan dinas atau laporan kegiatan tersebut memakai bukti *bill* palsu, dan yang dirugikan adalah Negara.

²⁶⁵ MAG, Wawancara (Palangka Raya, 03 Mei 2020).

²⁶⁶ SB, Wawancara (Palangka Raya, 23 April 2020).

²⁶⁷ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XXV, Pasal 378 tentang Perbuatan Curang.

Menurut analisis penulis kelompok ini masuk ke dalam kelompok yang memasukkan *syubhat* sebagai perkara yang haram. Alasannya adalah sabda Nabi SAW “*Barangsiapa yang menghindar dari yang samar maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang terjatuh dalam perkara yang samar maka sangat tinggi sekali potensinya untuk terjerembab pada sesuatu yang haram.*

268

Keharaman mutlak yang disampaikan oleh kelompok ini adalah sebab kelompok Ulama ini memelihara sikap *warā'* terhadap transaksi yang tidak ada dijelaskan dalam *naş* ataupun hadis Nabi, Seperti yang dijelaskan MAG:

Jadi tinggal kita saja memelihara diri kita (karena barang siapa yang tidak memelihara pada yang *syubhat* maka ia akan terjatuh kepada yang diharamkan. Itu berjalan nanti, asal nya niatnya ingin menghabiskan uang negara, kan seperti itu. Ketika itu habis nanti sulit, akhirnya melakukan suap, dll. Diawali dengan kwitansi palsu, nanti perjalanan pula palsu, semuanya akhirnya membawa kepada yang haram (barang siapa yang tidak bisa memelihara yang *syubhat*, maka dia akan membawa kepada pekerjaan yang haram).²⁶⁹

Pengertian *warā'* menurut Imam Muhammad bin Ismail, adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang belum jelas halal dan haramnya karena takut terjatuh pada perkara yang haram.²⁷⁰ Sabda Nabi Muhammad SAW:

²⁶⁸ Mahmud, “Kajian Hadis tentang Halal, 135.

²⁶⁹ Ibid.

²⁷⁰ Kholiq, “Studi Analisis Terhadap Produk, 42.

فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي
يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ²⁷¹

Barangsiapa yang menghindarkan diri dari perkara *syubhat*, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang terjerumus dalam perkara *syubhat*, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan-Nya.²⁷²

Terhadap persoalan *syubhat*, Islam memberikan suatu garis yang disebut *warā'* (sikap berhati-hati karena takut berbuat haram), dimana dengan sifat ini seorang muslim diharuskan menjauhkan diri dari masalah yang masih *syubhat* sehingga ia tidak akan terseret kepada perbuatan yang haram.²⁷³

Apabila transaksi *bill* hotel yang mengandung tipuan diperbolehkan, baik dengan alasan apapun, seperti alasan untuk menggapai kemaslahatan bersama (uangnya dialihkan untuk kepentingan mendesak di kantor) diperbolehkan, maka ditakutkan dapat menjadi bibit yang kurang baik sehingga masyarakat khususnya ASN terbiasa dengan hal-hal yang pada dasarnya dilarang dalam Islam. Kondisi inilah yang ditakutkan akan menjadi rantai pelanggaran syariat yang akan dianggap lumrah dalam masyarakat khususnya ASN.

²⁷¹ HR. Bukhari No. 2051 dan Muslim No. 1599.

²⁷² Tuasikal, "Hadist Al-Arbain, 1.

²⁷³ Qardhawi, *Al Halal wal Haram fil Islam*, 62.

c. Pendapat yang Membolehkan Transaksi untuk Kemaslahatan

Ulama yang tergolong dalam kelompok ini adalah SBy dan AH. Pendapat ini berhubungan dengan alasan ASN yang ketiga yaitu transaksi *bill* hotel dilakukan untuk kepentingan bersama di kantor tempat ASN bekerja yaitu uang hasil pencairan *bill* hotel digunakan untuk keperluan lain yang mendesak di kantor tersebut, misal mengadakan kegiatan yang tidak ada dianggarkan sebelumnya. Karena alasan tersebut kelompok Ulama ini berpendapat bahwa transaksi *bill* hotel boleh dilakukan.

AH menjelaskan bahwa dalam menetapkan hukum tidak bisa secara general, karena dalam transaksi *bill* hotel ditemukan beberapa kasus yang berbeda. Jadi, menetapkan hukumnya itu perkasus. Kalau secara umum transaksi *bill* hotel memang merupakan transaksi tidak halal karena mudarat dan *garar*. Kemudian dilihat dari alasan ASN melakukan transaksi *bill* hotel, ada kaidah *fiqh* yang berbunyi ²⁷⁴ *الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا* (segala perkara bergantung kepada niatnya).²⁷⁵ Jadi,

dengan kaidah tersebut, melihat hukum transaksi *bill* hotel adalah dengan melihat alasan yang menjadi penyebab ASN melakukan transaksi. Kebolehan transaksi dengan alasan yang ketiga ini adalah mengacu pada nilai kemaslahatan yang terkandung di dalamnya.

²⁷⁴ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 113.

²⁷⁵ Maksud dari kaidah ini adalah bahwa hukum yang menjadi konsekuensi atas setiap perkara haruslah selalu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari perkara tersebut. Lihat Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 29.

Menurut penulis, jika dikaitkan dengan teori *hilah* maka transaksi *bill* hotel dengan alasan kemaslahatan ini masuk dalam macam *hilah* yang dijelaskan oleh Ali Hasaballah dan Imam al-Syatibi. Sebelum masuk ke dalam macam-macam *hilah*, perlu diketahui pengertian *hilah* terlebih dahulu. *Hilah* adalah kata bentukan dari kata *tahulu* yang menunjukkan arti ragam dan keadaan. Bentuk jamak dari kata *hilah* adalah *hiyal* yang secara bahasa berarti kecerdikan, tipu daya, muslihat, dan siasat yang dicari untuk melepaskan diri dari suatu beban atau tanggung jawab.²⁷⁶

Adapun Ali Hasaballah mengemukakan pengertian *hilah* secara istilah yaitu tindakan yang menyebabkan pelakunya mengalami perubahan dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Kemudian penggunaan kata tersebut mengalami penyempitan makna, yakni cara terselubung yang mengantarkan kepada tujuannya. Seseorang tidak dapat sampai kepada tujuannya kecuali melalui kecerdikan dan kecerdasan (keahlian khusus).²⁷⁷

Kemudian Imam Malik, yang salah satu pendapatnya mengemukakan pengertian *hilah* sebagai upaya mendahulukan amalan zahir meskipun diperkenankan untuk membatalkan hukum *syar'i* dan mengubahnya menjadi hukum yang lain. Dengan demikian dalam kenyataannya amalan tersebut cenderung untuk menciptakan kaidah-kaidah hukum Islam (yang baru). Selanjutnya menurut Ibnu

²⁷⁶ Elimartati, "Hilah Al-Syari'ah Sebagai Upaya, 22.

²⁷⁷ Ibid.

Qayyib al-Jauziyah mengemukakan definisi *hilah* adalah sebuah tindakan khusus yang menyebabkan pelakunya mengalami perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Kemudian penggunaan kata tersebut berkembang menjadi istilah yang lebih khusus dan berakibat mengalami penyempitan makna yakni kiat atau cara terselubung yang mengantarkan seseorang untuk mencapai tujuan dan maksudnya. Cara ini tidak ditemukan kecuali dengan kecakapan dan keahlian khusus.²⁷⁸ Definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyib ini senada dengan definisi yang dikemukakan oleh Ali Hasaballah di atas.

Pembagian *hilah* menurut Ali Hasaballah adalah sebagai berikut:

1) Sebab-sebab *syar'iyah* yang diciptakan untuk maksud tertentu bila dijalankan menurut garis syariat. 2) Tindakan-tindakan yang pada dasarnya disyariatkan bila dimaksudkan untuk tujuannya untuk diciptakan atau digunakan untuk mencapai tujuan yang akan diciptakan yang termasuk hal yang dibolehkan oleh syariat. 3) Transaksi-transaksi yang pada dasarnya sesuai dengan syariat akan tetapi dilakukan untuk mencapai sesuatu yang diharamkan. 4) Akad yang pada dasarnya diharamkan bila dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharamkan. 5) *Hilah* dengan melakukan perbuatan haram untuk mencapai maksud yang hak.²⁷⁹

²⁷⁸ Ibid., 22-23.

²⁷⁹ Ibid., 24-25.

Adapula macam-macam *hilah* menurut Al-Syatibi, ada *hilah* yang tidak diperselisihkan tentang keharamannya, ada *hilah* yang tidak diperselisihkan tentang kebolehan, dan ada *hilah* yang menjadi lapangan ikhtilaf di kalangan Ulama karena tidak adanya dalil yang *qat'ī* dan *wad'ī* yang menjelaskan kebolehan atau larangannya. Tidak adanya penjelasan bahwa tujuan yang disepakati itulah yang dimaksud oleh *syar'i* dan tidak ada pula indikasi atau keterangan bahwa hal itu bertentangan dengan kemaslahatan yang dibuat oleh *syar'i* sesuai dengan maslahat yang difardukan. Sehingga *hilah* yang poin ini diperselisihkan.²⁸⁰

Jadi ketika dikaitkan dengan transaksi *bill* hotel dengan alasan untuk kemaslahatan bersama di kantor, maka menurut penulis transaksi tersebut dapat masuk ke dalam macam *hilah* yang kelima yang dijelaskan oleh Ali Hasaballah dan macam *hilah* yang ketiga yang dijelaskan oleh Imam Al-Syatibi. Karena transaksi *bill* hotel awalnya adalah perbuatan yang dilarang atau diharamkan karena mengandung tipuan, namun kegunaan *bill* hotel tadi adalah untuk sebuah kemaslahatan di kantor tempat ASN bekerja. Adapun yang perlu digarisbawahi kategori *hilah* ini menjadi lapangan ikhtilaf bagi Ulama, ada yang membolehkan ada yang tidak. Yang membolehkan berpendapat bahwa perbuatan tersebut boleh karena tujuannya tadi baik, namun pelaku tetap berdosa karena melakukan tipuan.

²⁸⁰ Ibid.

Terhadap persoalan transaksi *bill* hotel dengan alasan yang ketiga ini (kemaslahatan), SBy berpendapat bahwa pelaku (ASN) pastilah orang yang memang memiliki jabatan dan tanggung jawab yang besar di institusi/lembaga tersebut, sehingga ia melakukan suatu upaya atau kebijakan tersebut dikarenakan tidak ada jalan lain yang lebih baik dari pada cara yang ia lakukan itu, guna mempertahankan nama baik kelembagaan/institusi yang ia pimpin, atau misal untuk sebuah tanggung jawab bagi seorang kepala bagian sehingga upaya yang dilakukannya dapat menyelamatkan orang banyak dari jebakan-jebakan sistem administrasi yang kaku. Keperluan atau belanja kantor misalnya yang tidak ada dimasukkan dalam anggaran-anggaran sedangkan tuntutananya tentang belanja sesuatu tersebut harus ada di masa itu, dan tidak boleh tertunda ke anggaran sesudahnya atau anggaran di tahun depannya. Menurut SBy ketika keadaan yang memaksa dan darurat, apalagi untuk kepentingan orang banyak, setidaknya ada nilai kebaikan untuk bersama yang menjadi dasar kebijakan sesuatu, maka hal-hal yang dilarang bisa diperbolehkan.²⁸¹ Tetapi, perlu ada *framing*, maksudnya perlu dipertegas bahwa masalah tersebut tidak menjadi suatu rujukan sandaran yang selalu dijadikan sandaran hukum, demi menghindari adanya upaya pembenaran untuk meraih keuntungan. Jadi maslahat yang menjadi *illatul hukmi* (sebab hukum) benar-benar untuk kepentingan orang

²⁸¹ SBy, Wawancara (Palangka Raya, 28 April 2020).

banyak, bukan kepentingan personal atau hanya segelintir orang saja.²⁸²

Dari penjelasan pendapat Ulama Palangka Raya yang tergolong ke dalam kelompok ini dapat penulis pahami bahwa mereka lebih melihat kepada sisi manfaat yang ditimbulkan dari transaksi *bill* hotel dengan alasan yang ketiga ini, yaitu adanya kemaslahatan untuk orang banyak. Orang banyak disini dalam artian adalah seluruh staf dan pegawai yang ada di kantor tersebut, atau mahasiswa yang membutuhkan dana terdesak, atau biasa disebut dana taktis.

Selanjutnya transaksi dengan alasan kemaslahatan ini, penulis kaitkan dengan teori *maṣlaḥah*, baik dilihat dari makna, macam-macam dan syarat *maṣlaḥah*. Yang pertama jika dikaitkan dengan makna *maṣlaḥah*, menurut penulis transaksi *bill* hotel dengan alasan uangnya *disaving* untuk kegiatan yang lain memenuhi makna kemaslahatan sebab kemaslahatan sendiri diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat.²⁸³ Kemaslahatan juga harus mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia. Selain itu, ia juga harus menolak kerusakan.²⁸⁴ Kaidah *fiqh* menyatakan: *إِعْتِبَارُ*

²⁸² Ibid.

²⁸³ Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), 220.

²⁸⁴ Ibid., 222.

وَدَرْءُ الْمَصَالِحِ (Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan)²⁸⁵.

Dengan demikian, bila dilihat transaksi *bill* hotel dengan alasan yang ketiga ini, bagi pihak kantor (tempat ASN bekerja) memberikan manfaat yakni tercapainya kegiatan-kegiatan yang membutuhkan dana secara mendesak dan menjaga nama baik kelembagaan/institusi di hadapan orang banyak. Menurut penulis, manfaat seperti ini dapat diterima secara akal sehat oleh seluruh staf dan pegawai di kantor/lembaga tersebut, sehingga meraih manfaat dianjurkan dari segi *maṣlaḥah*. Selain itu, penulis beranggapan bahwa menolak kemafsadatan dalam praktik transaksi *bill* hotel dengan alasan yang ketiga ini adalah bila tidak dilakukan maka terpotongnya anggaran untuk tahun depan, juga tidak adanya dana yang tersimpan untuk kegiatan-kegiatan mendesak tersebut.

Kemudian yang kedua, untuk melihat apakah kemaslahatan transaksi *bill* hotel dengan alasan yang ketiga ini sesuai dengan konsep *maṣlaḥah* yang dibolehkan atau tidak, penulis mengkajinya melalui syarat-syarat *maṣlaḥah*. Adapun syarat-syarat *maṣlaḥah*, diantaranya:

- 1) *Maṣlaḥah* itu harus hakikat bukan dugaan;
- 2) *Maṣlaḥah* itu harus bersifat umum dan menyeluruh;
- 3) *Maṣlaḥah* itu harus sesuai dengan *syara'*.²⁸⁶

²⁸⁵ Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah*, 104.

²⁸⁶ Uman, *Uṣūl Fiqih I*, 137-138.

Syarat yang pertama menyatakan bahwa kemaslahatan itu harus pasti, bukan dugaan. Menurut penulis transaksi *bill* hotel dengan alasan yang ketiga ini sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa ia mengandung kemaslahatan bagi para pihak di kantor/lembaga/institusi tersebut, diantaranya memberikan manfaat bagi orang-orang yang membutuhkan dana terdesak, jadi kantor memiliki cadangan keuangan. Tak kalah penting manfaat tersebut dapat diterima secara rasional.

Kemudian syarat yang kedua, menurut penulis transaksi *bill* hotel dengan alasan yang ketiga ini bersifat umum, sebab kemaslahatan tidak hanya dirasakan satu pihak saja, namun dirasakan oleh petugas *front office*, ASN yang melakukan transaksi, dan seluruh staf/ASN di lembaga/institusi tersebut apabila membutuhkan dana terdesak. Bahkan apabila itu dilakukan oleh suatu institusi, maka akan menguntungkan mahasiswa yang membutuhkan dana terdesak. Namun perlu digaris bawahi jika pihak hotel tidak mengetahui adanya transaksi *bill* hotel, maka yang diuntungkan hanyalah petugas *front office*, dan apabila ASN yang melakukan transaksi tersebut tidak memberitahukan secara pasti bahwa uangnya akan dimasukkan dalam dana taktis atau dana simpanan untuk keperluan mendesak, maka pihak-pihak di kantor tidak mengetahui secara pasti uang itu akan dikemakan, hal tersebut bisa mengakibatkan kecurigaan nantinya diantara para staf di kantor/lembaga/institusi tersebut. Dengan alasan

tersebut dapat dikatakan transaksi *bill* hotel dengan alasan yang ketiga ini tidak sepenuhnya mengandung kemaslahatan yang menyeluruh.

Kemudian syarat yang terakhir *maṣlaḥah* itu harus sesuai dengan *syara'*. Jika dikaitkan, maka kemaslahatan yang dirasakan dalam transaksi *bill* hotel dengan alasan yang ketiga ini bertentangan dengan *syara'*, sebab transaksi tersebut mengandung unsur tipuan dan merupakan praktik tolong-menolong dalam berbuat dosa, hal tersebut berarti bertentangan dengan dalil tentang keridhaan dan tolong menolong dalam kebaikan.

Para Ulama *uṣhūl fiqh* meninjau *maṣlaḥah* sebagai dalil hukum dari segi ada atau tidaknya kesaksian *syara'*, baik kesaksian tersebut bersifat mengakui ataupun tidak. Dalam hal ini jumhur ulama membagi *maṣlaḥah* menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Maṣlaḥah al-mu'tabaroh*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh *syara'*, maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar dan bentuk jenis kemaslahatan tersebut.
- 2) *Maṣlaḥah al-mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'* karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*.
- 3) *Maṣlaḥah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan tidak pula dibatalkan/ditolak *syara'* melalui dalil yang rinci.²⁸⁷

²⁸⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Uṣūl Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 316.

Dalam transaksi *bill* hotel terdapat dalil yang menunjukkan keharaman transaksi ini yakni mengandung tipuan, maka dari itu kemaslahatan disini tergolong *maṣlaḥah al-mulḡah*. Kemaslahatan ini dipandang batil oleh *syara'* dan tidak berlaku untuk menetapkan suatu hukum. Kemaslahatan ini terkesan dibuat-buat, karena transaksi *bill* hotel ini dikaitkan dengan hal-hal yang sudah jelas dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadis untuk alasan kemaslahatan. Dalam penjelasannya, al-Ghazali menganggap bahwa suatu kemaslahatan yang bertentangan dengan *naṣ* maka kemaslahatan demikian dianggap sebagai *maṣlaḥah al-mulḡah* sehingga harus ditolak, dan yang dipakai sebagai pegangan adalah *naṣ* terlebih dahulu.²⁸⁸ Sehingga kemaslahatan ini seharusnya dihilangkan.

Berdasarkan uraian di atas, bila ditinjau dari *maṣ laḥ ah* maka transaksi *bill* hotel dengan alasan yang ketiga ini (untuk kemaslahatan) sudah mencakup makna kemaslahatan sebab ia mengandung manfaat yang dapat diterima oleh akal sehat. Namun kemaslahatan transaksi dengan alasan yang ketiga ini tidak memenuhi beberapa syarat *maṣlaḥah* yakni syarat berlaku menyeluruh dan sesuai *syara'* sehingga transaksi tersebut tidak sesuai dengan *maṣlaḥah* yang sebenarnya, yang mengakibatkan kemaslahatan ini merupakan kemaslahatan yang tertolak atau *maṣlaḥah al-mulḡah*. Jadi, dalam menetapkan hukum transaksi *bill* hotel dengan alasan yang ketiga ini tetap berpegang pada

²⁸⁸ Imron Rosyadi, "Pemikiran at-Tufi tentang Kemaslahatan, 57.

naş terlebih dahulu yaitu haram karena mengandung tipuan yang dilarang oleh *syara*'.

d. Penggolongan Akad Transaksi *Bill* Hotel

1) Pendapat yang Mengatakan Transaksi Jual Beli

Ulama yang tergolong dalam kelompok ini adalah SBy. Kelompok ini berpandangan bahwa transaksi *bill* hotel tidak dapat dikatakan ijarah, sebab ada tarif yang dikenakan oleh petugas *front office*, seperti satu malam Rp. 50.000,- dan jika dua malam maka memakai persenan (10%) dari harga kamar penginapan. Menurut SBy ijarah tidak didasari dengan hal-hal yang harapan, seharusnya upah tersebut diberikan secara ikhlas berapapun nominalnya oleh ASN tanpa ada tarif dari petugas *front office*, jadi tidak ada harga yang harus ditebus. Maka dari itu transaksi ini menurut beliau lebih tepat disebut *ba'i* atau jual beli yang mengandung *garar*.²⁸⁹

Menurut penulis, apa yang disampaikan beliau sesuai dengan pengertian jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yakni *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.²⁹⁰ Yang menjadi objek jual belinya yakni benda yang bernama *bill* hotel, harga *bill* hotel ditetapkan oleh petugas *front office*.

²⁸⁹ SBy, Wawancara (Palangka Raya, 28 April 2020).

²⁹⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 15.

Menurut jumhur Ulama, rukun jual beli terdiri dari: *'āqid/ al-mutā'aqidaīn/ 'āqidāni* (penjual dan pembeli), *ṣigat/ akad* (ijab dan kabul), *ma'qūd alaīh* (objek akad).²⁹¹ Berdasarkan rukun tersebut artinya transaksi *bill* hotel memiliki rukun jual beli yang lengkap. Namun ketika diteliti objek dalam jual beli ini mengandung unsur keharaman yang bukan dari zatnya, yakni mengandung unsur *garar* (manipulasi);²⁹² Transaksi ini masuk ke dalam jual beli batil, yang mana hukum jual beli ini adalah bahwa agama tidak menganggapnya terjadi. Jika tetap dilakukan, maka tidak menciptakan hak kepemilikan.

Menurut analisis penulis pendapat ini dapat dibenarkan apabila yang dilakukan ASN adalah tidak menginap, hanya membeli *bill* hotel saja. Namun ketika ASN tersebut menginap maka dapat dikatakan itu berhubungan dengan transaksi jasa atau ijarah.

2) Pendapat yang Mengatakan Transaksi Ijarah dan Jual Beli

Ulama yang tergolong dalam kelompok ini adalah SB dan SY. Menurut kelompok ini dalam transaksi *bill* hotel dapat dikatakan jual beli dan dapat juga dikatakan ijarah. Menurut SY jika melihat dari dua kasus dalam transaksi *bill* hotel, kasus yang pertama ASN tidak menginap di hotel, ia hanya mencari hotel

²⁹¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 55.

²⁹² Imam Isnawi dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa *garar* adalah jual beli yang mengandung dua kemungkinan dan kemungkinan besarnya adalah adanya ketidakjelasan di dalamnya. Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Ibid., 96.

yang menjual *bill* hotel.²⁹³ Hal tersebut disebut jual beli *bill* hotel dengan objek *bill* hotel.

Kasus yang kedua ASN menginap di hotel, memakai layanan kamar hotel dan pada saat *check out* meminta di *bill* dilebihkan/*dimark up* dari harga kamar yang asli, hal tersebutlah yang menurut SY dikatakan ijarah, ada ijarah yang benar dan ada ijarah yang salah. Ijarah yang benar adalah pada saat ASN memakai layanan kamar yang telah tersedia, *laundry*, pijat, dll, dan bayar sesuai dengan apa yang dilakukannya. Namun ketika ASN pada saat *check out* meminta kepada petugas *front office* untuk isi *bill* dirubah maka ASN memberikan upah kepada petugas *front office* untuk melakukan hal yang salah dalam artian mereka tolong menolong dalam hal kemungkar (bersekongkol *memark up*) hal inilah yang disebut ijarah yang salah.²⁹⁴

Sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan SY, namun penulis menganggap bahwa maksud yang dituju adalah sama. Menurut SB transaksi *bill* hotel itu ada *tijārah* (jual beli) dan ada ijarah. Kalau *tijārah* halal hukum asalnya, beliau mengatakan bahwa *bill* itu halal karena sebagai bukti kesepakatan, tapi akan berubah menjadi haram manakala *bill* itu direkayasa atau dimonopoli. Rekayasanya adalah menulis di *bill* hotel tidak sesuai kenyataan. Kalau ijarah tadi hukumnya mubah, boleh diberi, boleh

²⁹³ SY, Wawancara (Palangka Raya, 24 April 2020).

²⁹⁴ Ibid.

tidak. Berkaitan dengan memberi *tip* kepada si resepsionis, dalam hal resepsionis misal membawakan barang milik ASN ketika menginap di hotel tersebut, atau melakukan pekerjaan yang lain.²⁹⁵

Menurut penulis, pendapat kelompok ini memandang transaksi *bill* hotel berkaitan dengan jasa yang diberikan pihak hotel. Karena hotel menurut pengertian yang diberikan oleh Dinas Pariwisata-Depparpostel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan, untuk menyediakan jasa penginapan, makan dan minum, serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial.²⁹⁶ Maka dari itu pengertian ijarah yang diberikan oleh SB dan SY adalah berkaitan dengan jasa hotel seperti *laundry*, pijat, membawakan tas ke kamar (oleh petugas *front office*), dll. Namun ketika berbicara mengenai *bill* hotelnya saja (tidak menginap di hotel) maka kelompok ini menyebutkan jual beli. Jual beli *bill* hotel yang hukumnya adalah haram (ada rekayasa).

3) Pendapat yang mengatakan Transaksi Batil/ Tipuan

Ulama yang tergolong dalam kelompok ini adalah MAG dan AH. Kelompok ini berpendapat bahwa transaksi *bill* hotel tidak dapat dikatakan jual beli ataupun ijarah, seperti yang disampaikan MAG bahwa transaksi tersebut adalah tipu-menipu. Menurutnya, salah satu syarat sah jual beli adalah sesuatu yang halal, jadi

²⁹⁵ SB, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 April 2020).

²⁹⁶ Maria Retnaningrum, "Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan Beach Resort Hotel Di Pantai Jungwok, Gunungkidul" (Skripsi-- Universitas Atma Jaya, Yogyakarta , 2012), 16.

transaksi ini tidak dapat dikatakan jual beli, walaupun nanti dikatakan jual beli maka jual beli yang *garar* dan tidak sah. Sama halnya dengan ijarah, walaupun dianalogikan bahwa petugas *front office* itu memberikan jasa untuk memberi *bill* hotel kosong/ *bill* hotel yang sudah di *mark up*, tetap substansinya adalah tipu-menipu, ASN memberikan upah untuk menipu dan petugas *front office* pun tahu kebenarannya, artinya dengan berbuat seperti itu ia juga menipu.²⁹⁷

Hampir sama dengan pernyataan MAG, AH berpendapat bahwa transaksi ini masuk ke dalam transaksi batil, seperti di terangkan dalam firman Allah:

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ²⁹⁸

Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.²⁹⁹

Menurut AH ini adalah transaksi yang batil, jual beli ataupun ijarah dua-duanya termasuk batil. Transaksi *bill* hotel menurutnya bukanlah *syubhat*, karena transaksi tersebut sesuai dengan tujuannya. Kalau disebut dengan *syubhat* berarti hubungannya antara halal dan haram, sesuai dengan الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ،

(yang halal itu jelas, haram itu jelas), berarti مُشْتَبِهَاتٌ

²⁹⁷ MAG, Wawancara (Palangka Raya, 03 Mei 2020).

²⁹⁸ An-Nisa, 4: 29.

²⁹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 83.

transaksi ini tidak jelas. Padahal menurutnya di dalam transaksi tersebut ada tujuan, seperti transaksi *bill* hotel dengan alasan yang ketiga seperti yang penulis paparkan pada sub bab sebelumnya, ada kemaslahatan tujuannya, walaupun pada akhirnya yang melakukan transaksi tersebut tetap berdosa.³⁰⁰

Menurut penulis kelompok ini mendasari penyebutan transaksi *bill* hotel ini sebab melihat kepada syarat sah jual beli ataupun syarat sah ijarah, yang menyatakan bahwa objek haruslah dibolehkan oleh *syara'*. Jika disebut jual beli maka *bill* hotel tersebut melanggar *syara'* karena mengandung tipuan di dalamnya, begitu pun jika disebut ijarah maka upah yang diberikan oleh ASN adalah tujuannya untuk menipu dan jasa yang diberikan petugas *front office* adalah jasa menipu, dengan demikian jelaslah transaksi tersebut tidak halal atau merupakan transaksi yang batil.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan Ulama dalam penyebutan akad transaksi tersebut adalah karena perbedaan sudut pandang Ulama tersebut. Pendapat yang pertama melihat dari segi diberlakukannya tarif, pendapat yang kedua melihat dari menginap atau tidaknya ASN saat melakukan transaksi *bill* hotel, dan pendapat yang ketiga melihat dari segi halal atau tidaknya transaksi tersebut. Adapun penulis berpendapat bahwa akad dalam transaksi *bill* hotel adalah akad jual beli yang

³⁰⁰ AH, Wawancara (Palangka Raya, 11 Mei 2020)

batil dan ijarah yang batil. Hal ini didasarkan pada pengertian ijarah dalam fatwa DSN MUI No. 09 Tahun 2000, akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Jadi, apabila transaksi *bill* hotel objeknya adalah manfaat jasa petugas *front office*, maka diberikanlah upah kepada petugas *front office* atas jasanya yang mau melakukan *mark up* harga penginapan/ memberikan *bill* hotel tambahan. Kemudian, syarat objek ijarah dalam Fatwa DSN-MUI No. 9 Tahun 2000, salah satunya adalah manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan (tidak diharamkan), sedangkan dalam transaksi *bill* hotel jelas manfaat jasa tersebut adalah yang diharamkan karena menipu, jadi ijarah disini adalah ijarah yang batil (syarat objeknya tidak terpenuhi).

Adapun jual beli adalah ketika ASN meminta untuk dibuatkan *bill* hotel padahal ia tidak menginap di hotel tersebut, maka objek jual belinya adalah *bill* hotelnya. Berdasarkan pengertian jual beli menurut *syara'* adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Dalam arti disini harta atau barang yang dimaksud adalah *bill* hotel, *bill* hotel tersebut memiliki nilai ketika ASN menggunakannya untuk laporan perjalanan dinas. Kemudian memberi kepemilikan artinya yang awalnya *bill* hotel adalah milik hotel setelah itu diberikan kepada

ASN, maka ASN memiliki *bill* tersebut atas kesepakatan bersama. Namun, seperti halnya ijarah di atas, jual beli ini mengandung tipuan, maka disebutlah jual beli *bill* hotel yang batil.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari penelitian ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada praktiknya, mendapatkan *bill* hotel dilakukan dengan dua cara yaitu: *pertama*, langsung membeli *bill* hotel tanpa harus menginap di hotel, yang *kedua* menginap terlebih dahulu di hotel. Dalam kasus menginap terlebih dahulu di hotel ada dua cara yang ASN lakukan yaitu: *memark up* harga kamar pada saat *check out* atau membeli *bill* hotel tambahan pada saat *check out*. Kedua cara tersebut mengandung unsur tipu-menipu, maka terlarangnya transaksi tersebut adalah faktor haram *ligairihi* (selain zatnya) dan akad dalam transaksi *bill* hotel termasuk akad yang tidak sah kategori batil, sehingga seluruh akibat hukum akad transaksi ini tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.
2. Transaksi *bill* hotel dilakukan karena untuk memenuhi laporan bukti perjalanan dinas atau laporan hasil kegiatan ASN. Adapun alasan para pihak melakukan transaksi *bill* hotel adalah sebagai berikut:
 - a. ASN: 1) Memaksimalkan anggaran kantor; 2) Mengambil keuntungan pribadi. 3) digunakan untuk kepentingan lain di kantor (seperti: untuk dana *saving* di instansi/kantor tempat ASN bekerja atau ketika *bill* asli hilang).

- b. Petugas *front office*: 1) Menambah pemasukan hotel; 2) Mendapatkan keuntungan pribadi; dan 3) Menolong ASN yang ingin bertransaksi *bill* hotel.
3. Dari pendapat Ulama kota Palangka Raya, dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yakni:
 - a. Kelompok yang mengharamkan untuk keuntungan pribadi, semua Ulama termasuk dalam kelompok ini, alasan diharamkannya adalah karena transaksi tersebut adalah memakan harta dengan cara yang batil (tipu-menipu);
 - b. Kelompok yang mengharamkan secara mutlak (3 Ulama), dengan alasan sesuatu yang diawali dengan yang haram (tipuan), maka kelanjutannya pun tetap haram, sebab jalan kejujuran masih bisa ditempuh;
 - c. Kelompok yang membolehkan untuk kemaslahatan (2 Ulama), dengan alasan transaksi *bill* hotel dilakukan untuk kepentingan bersama di kantor tempat ASN bekerja dengan cara uang hasil pencairan *bill* hotel digunakan untuk keperluan lain yang mendesak di kantor tersebut/ dana *saving*.

Adapun terkait akad praktik transaksi ini, 1 (satu) Ulama yang menyebutkan transaksi ini merupakan jual beli, 2 (dua) Ulama menyebutkan transaksi ini merupakan jual beli dan ijarah, dan 2 (dua) Ulama menyebut transaksi batil/ transaksi tidak halal.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait transaksi *bill* hotel menurut pandangan Ulama kota Palangka Raya, penulis mempunyai beberapa saran untuk dicermati dan harapannya ditindaklanjuti. Beberapa saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepada Ulama Kota Palangka Raya dan lembaga yang terkait (MUI Kota Palangka Raya atau MUI provinsi Kalimantan Tengah), lebih baik mengadakan sosialisasi, penyuluhan, dakwah dan lain sebagainya, agar masyarakat mengetahui dan paham jika transaksi *bill* hotel yang mengandung rekayasa untuk sebuah laporan perjalanan dinas atau laporan kegiatan itu hukumnya haram, hendaknya memberikan perhatian kepada masyarakat khususnya pihak hotel dan para ASN tentang hal-hal yang sifatnya kontemporer, jika kita lihat pada kenyataan fenomena seperti praktik transaksi *bill* hotel masih marak dilakukan oleh kebanyakan ASN dan dianggap hal yang lumrah.
2. Kepada para pihak (ASN dan petugas *front office*/pihak hotel) seyogyanya agar bersikap jujur dan mengedepankan kebenaran. Khususnya kepada ASN agar menggunakan dana anggaran yang telah disiapkan sesuai porsinya tanpa teralih kepada kepentingan-kepentingan yang lain.
3. Kepada pimpinan hotel dan pimpinan instansi/kantor/lembaga tempat ASN bekerja diharapkan dapat memperbaiki sistem di hotel dan instansi/kantor/lembaganya agar tidak ada celah yang dapat dilakukan untuk merekayasa *bill* hotel.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan E-Book

- Affandi, M. Yazid. *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, t.th.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Halal wa al-Haram fi al-Islam*, terj. Tim Penerbit Jabal. Bandung: Jabal, 2009.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Anwar, Shabri Shaleh. *Pelopor al-Qur'an Kota Seribu Parit Indragiri Hilir: KH. Bustani Qadri*, t.dt.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- BPS Kota Palangka Raya. *Kota Palangka Raya dalam Angka Palangka Raya Municipality in Figures 2020*. Palangka Raya: BPS Kota Palangka Raya, 2020.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press, 2003.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2012.
- Hafizh (al), Ibnu Hajar Al-'Asqalani. *Bulughal Maram min Adillatil Ahkam*, terj. Ahmad Najieh. Semarang: Pustaka Nuun, 2011.

- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ibrahim, Diski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfiqri, 2019.
- Karim, Adiwarmen A. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Mas'adi, Ghufroen A. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Posadakarya, 2002.
- Mubarak, Jaih. *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Muthahari, Murtadha dan A.Bagir. *Pengantar Uşul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Bandar Maju, 2008.
- Nuh, Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Pemerintah Kota Palangka Raya (BPPEDA). *Evaluasi 50 Tahun Pembangunan Kota Palangka Raya (BAB II)*. Palangka Raya: t.p, 2007.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*. Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2009 .

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, dkk. Cet. IV. Jakarta: Pena, 2006.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Shiddieqy (ash), Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Skousen. *Pengantar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salembak Empat, 2007.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, cet 19, 2013.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Uşûl Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Tim. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Tim. *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya*. Fakultas Syariah: IAIN Palangka Raya, 2020.
- Uha, Ismail Nawawi. *Fiqh Mu'amalah Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010.
- Uman, Chaerul, dkk. *Uşûl Fiqih 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Utsman, Sabian. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Zulkifli, Sunarto. *Dasar-Dasar Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

B. Jurnal, Skripsi, Tesis, dsb.

- Abdurrauf. "Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. IV, No. 1. Januari 2012.
- Ali, Muchtar. "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah", *Ahkam*, Vol. XVI, No. 2. Juli 2016.

- Asmawi. "Konseptualisasi Teori Maṣlaḥah", *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*. 22 November 2014.
- Aziz, Muhammad Nur. "Peran Ulama dalam Perang Sabil di Ambarawa Tahun 1945". Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, t.th.
- Elimartati. "Hilah Al-Syari'ah Sebagai Upaya dalam Mengujudkan Maqashid Syar'iah", *Juris*, Vol. 9, No. 1. Juni 2010).
- Fatimah, Siti. "Pendalilan Usaha Hotel Syariah Tanpa Sertifikasi Di Kota Palangka Raya". Skripsi--IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2017.
- H, Darmawati. "Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah", *Sulesana*, Vol. 12, No. 2. 2018.
- Hadi, Sumasno. "Studi Etika Tentang Ajaran-Ajaran Moral Masyarakat Banjar", *Tashwir*, Vol. 3, No. 6. April – Juni 2015.
- Hosen, Nadrattuzaman. "Analisis Bentuk Garar Dalam Transaksi Ekonomi", *Al-Iqtishad*, Vol. I, No. 1. Januari 2009.
- Kholiq, Muhammad Nur. "Studi Analisis Terhadap Produk Makanan dan Minuman Olahan yang Belum Bersertifikat Halal (Studi Kasus pada IKM di kota Semarang)". Skripsi--IAIN Walisongo, Semarang, 2010.
- Mahmud, Amir. "Kajian Hadis tentang Halal, Haram, dan Syubhat", *Jurnal Adabiyah*, Vol. 17, No. 2. 2017.
- Maiwan, Muhammad. "Memahami Teori Etika: Cakrawala dan Pandangan", *Mimbar Demokrasi*, Vol. 12, No. 2. April 2018.
- Muchlisoh, Amaliya Fahimatul. "Jual Beli Rambut di Salon Kecantikan Perspektif Ulama Kota Palangka Raya". Skripsi--IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2019.
- Najmi, Nurun. "Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Di Kabupaten Aceh Besar Menurut Akad *Ijarah Bi Al-Amal*". Skripsi--UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018.
- Nugroho, Mahendra Adhi. "Konsep Teori dan Tinjauan Kasus Etika Bisnis PT Dirgantara Indonesia (1960 - 2007)", *Economia*, Vol. 8, No. 1. April 2012).
- Retnaningrum, Maria. "Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan Beach Resort Hotel Di Pantai Jungwok, Gunungkidul". Skripsi--Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2012.

Rosyadi, Moh. Imron, "Hilah al-Hukmi Studi Perkembangan Teori Hukum Islam", *Jurnal Dosen STAI Taswirul Afkar Surabaya*, t.dt.

Rosyadi, Imron. "Pemikiran at-Tufi tentang Kemaslahatan", *Suhuf*, Vol. 25, No. 1. Mei 2013.

Saputri, Yegi dan Jhon Fernos, "Mekanisme Penerbitan Cek Dan Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran Giral pada pt. Bank tabungan Negara (tbk) Cabang Padang", t.dt.

Tuasikal, Muhammad Abduh, "Hadist Al-Arbain An-Nawawiyah-06 Hati-Hati Dengan Syubhat dan Jaga Hati", *Buletin Rumaycho.com*. Yogyakarta: Rumaycho, t.th.

UNY, Staff. "Teori Etika Perkembangan Perilaku Moral", *Etika Bisnis*, t.dt.

C. Situs Internet

Addariny, Musyaffa. "Mengambil yang Lebih Ringan Mudaratnya" dalam <https://muslim.or.id/45976-mengambil-yang-lebih-ringan-mudharatnya.html/>. 17 Juli 2020.

Pegi-Pegi. "Istilah Perhotelan yang Harus Kamu Ketahui", dalam <https://www.pegipegi.com/travel/30-istilah-perhotelan-yang-harus-kamu-ketahui/>. 15 Januari 2020.

Pemerintah Kota Palangka Raya. "Selayang Pandang Sejarah Palangka Raya", dalam <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/>. 29 Maret 2020.

Syaikh, Datu. "Teori Maṣlaḥah Al-Ghazali", dalam <https://aliboron.wordpress.com/2010/10/26/teori-maṣlaḥah-al-ghazali/>. 30 Juni 2019.

Wikipedia. "Tugas Majelis Ulama Indonesia", dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia#Tugas/. 02 Mei 2020.

D. Hasil Wawancara dan Observasi

AHN. *Wawancara*. Palangka Raya, 02 April 2020.

AMW. *Wawancara*. Palangka Raya, 16 April 2020.

DP. *Wawancara*. Palangka Raya, 10-11 April 2020.

ISA. *Wawancara*. Palangka Raya, 02 April 2020.

MAG. *Wawancara*. Palangka Raya, 03 Mei 2020.

NA. *Wawancara*. Palangka Raya, 07 April dan 05 Mei 2020.

Observasi awal penulis (sebelum penelitian) dengan mendatangi hotel L dan BT. Palangka Raya, 15 Juni 2019.

Observasi transaksi bill hotel ke beberapa hotel di Palangka Raya. Palangka Raya, 07 April 2020.

Petugas *Front Office* NF. *Observasi*. Palangka Raya, 07 April 2020.

SB. *Wawancara*. Palangka Raya, 23 April 2020.

SBy. *Wawancara*. Palangka Raya, 28 April 2020.

SG. *Wawancara*. Palangka Raya, 07 April 2020.

SY. *Wawancara*. Palangka Raya, 24 April 2020.

X. *Observasi*. Palangka Raya, 07 April 2020).

X. *Wawancara*. Palangka Raya, 07 April 2020.

